

Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., M.AP

# **DAMPAK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN TERHADAP KEHIDUPAN PETANI**



**DAMPAK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN  
TERHADAP KEHIDUPAN PETANI**

**Dr. GEDE WIRATA, S.Sos., SH., M.AP**



**pena persada**  
**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

**DAMPAK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN  
TERHADAP KEHIDUPAN PETANI**

**Penulis:**

**Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., M.AP**

**ISBN: 978-623-315-305-8**

**Editor:**

Wiwit Kurniawan

**Design Cover:**

Retnani Nur Brilliant

**Layout:**

Nisa Falahia

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email: [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website: [penapersada.com](http://penapersada.com) Phone: (0281) 7771388

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin  
penerbit

## KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaanNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “ **DAMPAK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN TERHADAP KEHIDUPAN PETANI**”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perubahan penggunaan lahan pertanian khususnya persawahan untuk kepentingan non-pertanian seperti industri serta permukiman termasuk perkantoran dan sarana prasarana pariwisata yang terjadi terus menerus, mempunyai konsekuensi logis adalah budaya pertanian dengan sistem subaknya yang merupakan salah satu modal dasar pariwisata budaya Bali semakin terdegradasi, termasuk para petani yang belum siap untuk bersaing di dunia modern dan industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain pariwisata dengan leluasa mengeksploitasi lahan pertanian untuk kepentingannya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Lahan Persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan .....	1
B. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan .....	3
BAB II. DEMOGRAFI KECAMATAN DENPASAR SELATAN .....	8
A. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin .....	8
B. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan ....	9
C. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
BAB III. IDEOLOGI YANG BEKERJA DI BALIK TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN .....	11
A. Ekonomi Kapitalis.....	11
B. Gaya Hidup .....	23
BAB IV. IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN PADA KEHIDUPAN PETANI DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN .....	60
A. Implikasi terhadap Infrastruktur .....	60
B. Implikasi terhadap Struktur Sosial.....	82
C. Implikasi terhadap Suprastruktur .....	159
BAB V. PENUTUP .....	195
DAFTAR PUSTAKA .....	197

# BAB I.

## PENDAHULUAN

### A. Lahan Persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan

Penyusutan lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai akibat di wilayah tersebut dipandang semakin strategis bagi pengembang sektor-sektor, seperti *property*, usaha ekonomi nonpertanian. Wilayah tersebut relatif dekat dengan Kota Denpasar sehingga menarik bagi pengembang hunian dan bisnis. Atas posisinya yang strategis itulah lahan di Kecamatan Denpasar Selatan menjadi menarik bagi para pengembang.

Karena tergiur oleh harga yang mahal, sebagian petani pemilik lahan di Kecamatan Denpasar Selatan kemudian menjual tanahnya. Sementara sebagian lainnya ada pula yang mengalihfungsikannya menjadi sarana penunjang kegiatan bisnis nonpertanian seperti dikontrakkan/disewakan, dibangun rumah-rumah sewaan/tempat indekos, rumah toko (ruko). Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena umumnya mereka tidak memiliki akses (*skill*) untuk memasuki lapangan kerja formal nonpertanian. Selain itu, semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggeluti pekerjaan pertanian dikhawatirkan mengancam kesinambungan tradisi agraris sistem *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja. Akibatnya, timbul masalah sosial yang pelik yang pada gilirannya berimplikasi pada kehidupan para petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang semula sebagai pemilik lahan. Lama-kelamaan bisa berubah menjadi buruh tani di lahannya sendiri yang telah dikuasai oleh para investor luar.

Pada umumnya para petani telah tergoda dengan harga tanah yang mahal dan berharap dengan menjual lahan sawahnya mereka akan bisa hidup berkecukupan. Namun, petani kurang menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan pandangan yang

dikemukakan oleh Gramsci bahwa hegemoni adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu (Tilaar, 2003:77). Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan. Di samping itu, bahwa kesepakatan terjadi lewat penawaran harga yang menggiurkan.

Para pengusaha/investor/kaum kapitalis menyadari bahwa sasaran mereka adalah masyarakat petani yang konsumtif dan tidak memiliki pengetahuan, tentang rencana besar kaum kapitalis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Agung (2010:143) bahwa modernisasi adalah citra keasyikan yang menjanjikan, di mana saat ini dunia mengalami kemajuan sosial dan ini kemajuan teknologi. Bahkan, ada petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang telah menjadi contoh nyata akibat dari pengaruh globalisasi teknologi ini. Ada petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang menjual tiga hektar sawah, punya rumah, mobil, motor, setelah jual sawahnya, sekarang sepeda saja tidak punya. Ada juga petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang menjual tanah 24 are seharga 120 juta, setelah itu menyesal dia menjual tanahnya, petani tersebut balik mau membeli lagi dengan harga 450 juta dan hanya mendapat 3 are.

Contoh yang dikemukakan tersebut merupakan fatalisme yang dialami petani yaitu fatalisme yang diakibatkan oleh gaya hidup. Gaya hidup di sini sebagai sarana yang digunakan kaum kapitalisme yang berwujud hegemoni teknologi dan hegemoni harga sawah yang selangit. Petani disuguhi kehidupan-kehidupan yang instan dan citra keasyikan dunia modern saat ini (Barker, 2009:143). Ketika petani telah masuk perangkap hegemoni kapitalis, maka secara tidak langsung petani akan menerima apa yang dihegemonikan tersebut seperti teknologi dan harga tanah yang tinggi. Ketika ingin memiliki teknologi berupa kendaraan, rumah, dan teknologi lainnya petani harus memerolehnya dengan uang. Petani tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi segala keinginannya. Sehubungan dengan itu, modal tanah

sawayalah yang bisa menjadi uang. Di tengah kebimbangan dan keinginan kuat untuk memiliki gaya hidup itu, petani ditawarkan dengan hegemoni harga tanah yang sepiantas dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, petani merelakan tanahnya diambil oleh investor lewat transaksi keuangan dan tanpa ada perlawanan.

#### **B. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan**

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan hingga kini masih terus terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Penurunan Luas Tanah Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2010 s/d Tahun 2014**

Tahun	Sawah (Ha)	% Penurunan	Tegal/Huma (Ha)	% Penurunan	Total (Ha)	% Penurunan
2010	924	-	230	-	1.154	-
2011	924	0 %	230	0 %	1.154	0 %
2012	897	- 2,92 %	183	- 20,43 %	1.080	- 6,41 %
2013	847	- 5,57 %	183	0 %	1.030	- 4,63 %
2014	845	- 0,24 %	183	0 %	1.028	- 0,19 %

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Data di atas menunjukkan dalam kurun waktu 2010-2011 tidak terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, dari 1.154 hektar pada tahun 2011 menjadi 1.080 hektar pada tahun 2012 atau luas lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebesar - 6,41 %. Alih fungsi lahan tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2012-2013, yaitu dari 1.080 hektar pada tahun 2012 menjadi 1.030 hektar pada tahun 2013 atau mengalami penurunan - 4,63 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2014, laju alih fungsi lahan nampaknya mengalami penurunan, yaitu dari 1.030 hektar pada tahun 2013 menjadi 1.028 hektar pada tahun 2014 atau mengalami penurunan - 0,19 %.

Untuk lahan sawah sepanjang tahun 2010-2011 juga tidak terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi alih fungsi lahan sawah, dari 924 hektar pada tahun 2011 menjadi 897 hektar pada tahun 2012 atau luas lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebesar - 2,92 %. Alih fungsi lahan sawah tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2012-2013, yaitu dari 897 hektar pada tahun 2012 menjadi 847 hektar pada tahun 2013 atau mengalami penurunan - 5,57 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2014, laju alih fungsi lahan sawah nampaknya mengalami penurunan, yaitu dari 847 hektar pada tahun 2013 menjadi 845 hektar pada tahun 2014 atau mengalami penurunan - 0,19 %. Sedangkan untuk lahan pertanian yang berupa tegal/huma hanya mengalami alih fungsi lahan pada tahun 2011-2012 yaitu dari 230 hektar pada tahun 2011 menjadi 897 hektar pada tahun 2012 atau mengalami alih fungsi sebesar - 20,43 %.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian dibenarkan oleh Ketut Redi, petani penggarap di Dukusari, Sesetan, yang kutipan wawancaranya sebagai berikut

*Mangkin keweh ngerereh carik ring Sesetan, santukan sami sampun dados bangunan umah, wenten dados sekolah, wenten dados karaoke, lan sane tiosan disamping nike mangkin sampun nenten wenten toye, nike mawinan meweh idup tiang dados petani, tiang mangkin usan nanem padi santukan nenten wenten toye, mangkin tiang nandur punyan biyu, tiang ngubuh sapi, mangde wenten tiang anggen nyekolaang pianak, tiang nenten medruwe kebiasaan napi-napi, tiang wantah dados petani kemanten* (terjemahan “Sekarang susah mencari tanah sawah di Sesetan, karena semua sudah jadi bangunan rumah, ada yang jadi sekolah, ada yang jadi karaoke, dan yang lainnya, disamping itu, sekarang sudah tidak ada air irigasi, itu yang menyebabkan hidup saya susah menjadi petani, saya sekarang berhenti menanam padi krn sudah tdk ada air irigasi, sekarang saya menanam pohon pisang, saya memelihara sapi, supaya ada yang dipakai menyekolahkan anak, saya tidak mempunyai keahlian

apa-apa, saya hanya jadi petani saja) (hasil wawancara dengan Ketut Redi, petani penggarap di Dukusari, Sesetan, pada tanggal 2 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa saat ini di Kelurahan Sesetan sulit ditemukan tanah sawah. Hampir semua tanah sawah sudah beralih fungsi menjadi bangunan rumah, sekolah, karaoke, dan sebagainya. Ditambah dengan tidak adanya pengairan irigasi, maka hidup Ketut Redi mengalami kesulitan, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki keahlian selain menjadi petani. Oleh karena itu, Ketut Redi sulit untuk berganti profesi/pekerjaan untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anaknya, Ketut Redi mengandalkan hasil dari menanam pisang dan memelihara sapi.

Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh I Nyoman Arsana, petani penggarap lainnya yang berdomisil di jalan raya Sesetan sebagaimana diutarakan sebagai berikut :

..... disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan beton, apakah itu jadi rumah, jadi toko, jadi sekolah dan lain sebagainya. alih fungsi lahan pertanian di daerah Sesetan terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 80 an, waktu itu saya menjadi penggarap lahan sawah, lama kelamaan beriringnya waktu seperti sekarang ini, sawah sudah tidak ada, irigasi juga sudah tidak ada, sehingga saya berhenti jadi petani. Ketika berhenti jadi petani saya mengalami masa-masa sulit perekonomian, saya mencoba berdagang dengan jualan rujak, gagal..ganti profesi buka bengkel motor, gagal juga ... saya hanya tahunya jadi petani, tidak bisa mengerjakan apa-apa selain menjadi petani. Sehingga saya sekarang tidk memiliki pekerjaan tetap, saya hanya bisa minta sama anak-anak (I Nyoman Arsana, Wawancara 3 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi rumah, toko, sekolah, dan sebagainya mulai terjadi di Kelurahan Sesetan sejak tahun 80-an. Mengingat sawah di jalan raya Sesetan sudah tidak ada lagi, I Nyoman Arsana mencoba beralih profesi dengan berdagang, jualan rujak, buka bengkel motor, tapi selalu mengalami

kegagalan. Hal ini disebabkan yang bersangkutan tidak memiliki keahlian lain selain bertani juga.

Alih fungsi lahan persawahan yang terjadi di Kelurahan Sesetan, juga terjadi di Desa Pemogan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kepaon dan petani yang bertempat tinggal di jalan Kepaon Pemogan, yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

Tanah sawah banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan, dan bangunan itu yakin tidak ada ijinnya, semestinya pemerintah bagian tata kota yang lebih sering turun untuk mengecek IMB agar alih fungsi bisa diperlambat atau ditertibkan (I Wayan Mardia, Wawancara 5 Agustus 2015).

Kemudian ditambahkan pendapatnya mengenai penyebab terjadinya alih fungsi lahan sebagai berikut:

Menurut *tiang* (saya) alih fungsi lahan disebabkan karena jadi petani sudah tidak menjanjikan lagi seperti apa yang sudah *tiang* jelaskan tadi, disamping itu lebih cepat mendapatkan uang. Contoh : kalau jadi petani hanya mendapat hasil 100 ribu per are per 110 hari, kalau tanah dikontrakkan 1 are 3 jt per tahun itu sudah kontrakan tanah paling murah, itu kalau tanah dikontrakkan. Kalau tanahnya dijual di daerah ini harga tanah sekarang 650 juta per are tinggal mengalikan saja. Uangnya taruh di bank didepositokan tinggal menikmati hasil. Di samping tanah dikontrakkan atau dijual, juga ada alih fungsi diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, contoh; dulu dalam satu keluarga punya anak 3 atau 4 kemudian semua sudah nikah dan punya anak, sehingga dalam rumah tersebut menjadi sesak, sehingga orang tua mereka atau kakeknya menyuruh anak-anaknya membuat rumah di lahan yang mereka miliki agar bisa lebih mandiri. Inilah yang menjadi penyebab, kenapa alih fungsi lahan begitu marak, di samping gaya hidup di jaman sekarang yang serba ada (I Wayan Mardia, Wawancara 5 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa di Desa Pemogan juga banyak tanah sawah yang beralih fungsi menjadi bangunan. I Wayan Mardia menuding bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak ada ijinnya, sehingga yang bersangkutan menyarankan agar Bagian Tata Kota turun ke lapangan untuk memeriksa IMB. Penyebab alih fungsi lahan, masih menurut I Wayan Mardia, karena bertani sudah tidak menguntungkan lagi. Dengan perhitungan sederhana dikemukakan bahwa dari 1 are tanah petani hanya mendapat Rp.100 ribu per 110 hari. Jadi, dalam 1 tahun dihasilkan hanya Rp. 330 ribu per are tanah. Sedangkan kalau dikontrakkan 1 are tanah paling sedikit mendapat Rp. 3 juta per tahun. Apalagi kalau dijual per are bisa berharga Rp. 650 juta. Hasil penjualan tanah dapat didepositokan dan petani tinggal menikmati bunga depositonya. Namun menurut I Wayan Mardia, penyebab alih fungsi lahan bukan hanya itu saja. Dari sisi kebutuhan petani akan bangunan rumah juga menjadi penyebab lain alih fungsi lahan. Misalnya pertambahan jumlah keluarga akan diikuti pertambahan kebutuhan rumah, sehingga untuk memenuhinya, mereka terpaksa mendirikan rumah di atas sawah yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal atau desakan kepentingan bisnis saja, namun faktor internal dari petani sendiri seperti misalnya kebutuhan membangun rumah di atas lahan sawah untuk keluarga yang semakin bertambah juga menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian.

## BAB II. DEMOGRAFI KECAMATAN DENPASAR SELATAN

### A. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar akhir Tahun 2014 diketahui bahwa ,jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan adalah 266.420 orang, yang terdiri atas 136.090 orang laki-laki dan 130.330 orang berjenis kelamin perempuan. Secara terperinci tabel di bawah menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur (Tahun)	Total		
	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
0 - 9	23.940	22.810	46.750
10 - 19	19.450	20.130	39.580
20 - 29	32.020	31.580	63.600
30 - 39	26.410	24.990	51.400
40 - 49	19.580	17.250	36.830
50 - 59	9.320	8.200	17.520
60 - 69	3.770	3.480	7.250
70 - keatas	1.600	1.890	3.490
<b>Jumlah</b>	<b>136.090</b>	<b>130.330</b>	<b>266.420</b>

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas selain menunjukkan adanya populasi berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Distribusi penduduk yang tergolong berumur produktif (sekitar umur 20-49 tahun) relatif mendominasi yaitu umur 20-29 tahun sebesar 23,87%; umur 30-39 tahun sebesar 19,29% dan umur 40-49 tahun sebesar 13,82%, sehingga penduduk yang berusia produktif tersebut sebesar 56,48%.

## B. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan

Karakteristik wilayah yang sedang mengalami proses-proses urbanitas seperti halnya di Kecamatan Denpasar Selatan ditandai dengan semakin terdesaknya sektor tradisional seperti dalam bidang pertanian menuju perkembangan sektor-sektor lain semakin pesat. Data berikut memberi gambaran mengenai sektor-sektor yang sedang berkembang di Kecamatan Denpasar Selatan.

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
Pertanian	1.103	3,03
Perdagangan	7.522	20,67
Bekerja di sektor Industri	3.158	8,67
Jasa dan Pariwisata	13.849	38,04
Sektor Kesehatan	311	0,85
Perbankan/Lembaga Keuangan	1.210	3,32
Angkutan	1.965	5,40
Lain-lain	7.286	20,02
<b>Jumlah</b>	<b>136.090</b>	<b>266.420</b>

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pada sektor jasa dan pariwisata menduduki peringkat pertama (38,04%), menyusul sektor perdagangan pada peringkat kedua (20,67%) dan sektor lainnya pada peringkat ketiga (20,02). Peringkat selanjutnya diduduki masing-masing sektor industri, sektor angkutan, pertanian, sektor perbankan/lembaga keuangan dan sektor kesehatan. Dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang bekerja sebagai petani hanyalah 3,03%.

### C. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jarak Kecamatan Denpasar Selatan relatif dekat dengan wilayah pusat pendidikan terutama Kota Denpasar. Hal itu secara signifikan memengaruhi kemajuan tingkat pendidikan penduduk setempat. Mengingat jaraknya relatif dekat, maka pendidikan, baik pada strata menengah maupun perguruan tinggi, umumnya ditempuh di kota tersebut. Jarak tempuh dari Kecamatan Denpasar Selatan ke Kota Denpasar yang hanya sekitar 5-10 km biasanya hanya memerlukan waktu perjalanan kurang dari 30 menit dengan menggunakan sepeda motor. Di samping itu, kemajuan tingkat pendidikan penduduk juga dikondisikan oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang cukup memadai di wilayah setempat, terutama sampai pada jenjang pendidikan menengah. Gambaran umum kemajuan tingkat pendidikan tersebut tampak dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>%</b>
Tidak/Belum pernah sekolah	25.192	9,46
Belum tamat SD	61.455	23,25
Tamat SD/ Sederajat	53.933	20,25
Tamat SLTP/Sederajat	42.476	15,94
Tamat SLTA/Sederajat	51.454	19,32
Tamat Diploma	18.665	7,00
Sarjana ke atas	12.746	4,78
<b>Total</b>	<b>266.421</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan adanya perkembangan pemerataan di bidang pendidikan yang dialami penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan. Di samping meratanya kesempatan mengenyam pendidikan, strata pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi populasinya cukup besar.

### **BAB III.**

## **IDEOLOGI YANG BEKERJA DI BALIK TERJADINYA ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN**

#### **A. Ekonomi Kapitalis**

Alih fungsi lahan sawah sebagai lahan pertanian ke nonpertanian menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah secara nasional yang secara langsung juga ikut membantu masyarakat memanfaatkan peluang.

Alih fungsi lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, kebijaksanaan arah pembangunan, dan mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi sebagai akibat perencanaan tata ruang sering berubah-ubah dan lemahnya mekanisme kontrol oleh pemerintah kepada pemilik lahan. Alih fungsi lahan terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri, dengan mengusung ideologi kapitalisme dan ekonomi pasar.

Dalam hal ini identitas masyarakat petani masa lalu telah terampas akibat kekalahan dalam kontestasi yang terjadi dalam masyarakat kolonial. Dalam posisi ini keterpinggiran masyarakat petani terdominasi oleh ruang dan waktu karena eksistensi kekuasaan yang dominan, seperti pengusaha, pemerintah, dan kapitalis. Kapitalis sebagai pihak dominan memandang semua hal atau objek bisa dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi yang lain masyarakat sulit mendapatkan kehidupan yang layak akibat modernisasi zaman, yang mendorong setiap individu bersaing dan berkompetisi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah

satu di antaranya adalah kebutuhan tempat tinggal yang sangat meningkat. Sementara lahan-lahan tak produktif telah habis, terdesak oleh pembangunan. Adanya kebutuhan yang sedemikian banyaknya menjadi peluang yang besar bagi kaum kapitalis untuk menanamkan modalnya. Kuatnya modal materialisme membuat semua hal yang diinginkan menjadi mungkin terjadi, termasuk juga melakukan alih fungsi lahan pertanian. Kaum kapitalis kini mulai menyisir lahan-lahan produktif. Salah satu di antaranya lahan pertanian sawah, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan dan Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar

Kapitalis untuk melanggengkan tindakannya berkolaborasi dengan penguasa yaitu memakai dalih pembangunan yang direstui oleh pemerintah. Oleh karena itu aktivitasnya untuk menyukseskan pembangunan sebagai bagian dari program pembangunan menjadi legal. Karena pada hakikat pembangunan sebenarnya merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Namun, dalam hal ini pembangunan telah disalahgunakan menjadi faktor terjadinya alih fungsi lahan persawahan yang mengakibatkan marginalisasi petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini terlihat pada wawancara dengan I Ketut Windya, penduduk di Kelurahan Sesetan sebagai berikut.

Keadaan pertanian di Kelurahan Sesetan cenderung menghilang setelah sawah-sawah banyak yang beralih fungsi dan terjual menjadi pengembangan perumahan, pertokoan atau sentra-sentra bisnis lainnya. Tidak hanya sawah, jalur hijau pun dilabrak oleh para pemilik modal untuk dialihfungsikan dengan dalih pembangunan. Hal ini terjadi karena *pekaseh* sama sekali tidak diajak untuk memutuskan kegiatan semacam ini (hasil wawancara dengan I Ketut Windya, penduduk di Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015)

Dari wawancara di atas, tergambar seperti yang diutarakan oleh Peet dan Hartwick (1999: 71) yaitu dalam hegemoni pembangunan berkelanjutan, aparaturnya yang memproduksi pengetahuan menciptakan "ekonomi politik". Maksudnya adalah untuk melancarkan suatu proyek tertentu pemilik modal akan berafiliasi dengan pihak pemilik modal entah modal kuasa seperti pemerintah atau pemilik modal intelektual seperti universitas. Sehingga tidak mengherankan jika ada lembaga-lembaga riset dan universitas dirancang untuk melakukan studi kelayakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan pemodal. Hal itu bertujuan agar rencana proyek tersebut dapat berjalan mulus tanpa ada perlawanan dari para petani. Di sini tampak jelas sekali bahwa perubahan terjadi akibat proses alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan perumahan atau fungsi lain di Kecamatan Denpasar Selatan menyisakan berbagai macam persoalan. Setelah lahan persawahannya beralih fungsi menjadi lahan permukiman atau fungsi lainnya, kondisi masyarakat petani mengalami pergeseran. Hal itu terjadi sebab lahan pertanian sudah berkurang sehingga kesempatan untuk mengembangkan usaha dalam bidang pertanian semakin terbatas. Keterbatasan pengembangan usaha dalam bidang pertanian sangat mempengaruhi penurunan pendapatan petani serta berbagai hal yang bersentuhan dengan pola kehidupan masyarakat petani sehari-hari. Kondisi seperti ini menempatkan masyarakat petani dalam posisi *subaltren*. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Ni Komang Ariani, penduduk di Kelurahan Pedungan, sebagai berikut.

Dulu sebelum sawahnya dijual, petani menggarap dua hektar sawah, dan setelah banyak petani yang menjual sawahnya, petani menggarap atau mengerjakan sawah hanya satu hektar atau bahkan kurang dari satu hektar. Keadaan ini tentu mengakibatkan penghasilan petani menjadi berkurang, ditambah lagi kegiatan bertani kurang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Generasi muda di Kelurahan Pedungan ini enggan untuk mengambil pekerjaan bertani, mereka lebih banyak beralih ke pekerjaan di sektor jasa karena areal

sawahnya sudah terjual kepada para pemilik modal (hasil wawancara dengan Ni Komang Ariani, penduduk di Kelurahan Pedungan, pada tanggal 3 Desember 2015).

Dari hasil wawancara di atas, tampak bahwa penyusutan lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan, khususnya di Kelurahan Pedungan semakin meluas. Berdasarkan hasil wawancara di atas, alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan perumahan atau fungsi lainnya berdampak kepada kondisi kehidupan petani itu sendiri. Ini berdampak pada kondisi ekonomi yaitu berkurangnya pemasukan (uang), peran sosial, orientasi nilai budaya, stratifikasi sosial, dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha. Dengan demikian, masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan berada pada posisi tertindas. Dalam hal ini Gramsci (dalam Ratna, 2013:463) menyatakan bahwa *subaltern* adalah orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Beberapa perubahan yang tercermin adalah terjadinya peningkatan tenaga kerja yang bergerak di luar sektor pertanian. Seharusnya hal itu dapat meningkatkan, baik perekonomian maupun pendapatan petani setempat dengan menjadi buruh sampingan, tetapi realitasnya tidak demikian. Terbukti terjadi peningkatan pekerja buruh musiman pada masa pembangunan infrastruktur seperti saat ini terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal tersebut terungkap pada wawancara dengan I Gede Puruhita, penduduk Desa Pemogan berikut ini.

Terjadi eksodus besar-besaran dari Pulau Jawa ke Bali khususnya buruh bangunan, yang secara tidak langsung mempengaruhi warga lokal dalam mendapatkan pekerjaan sampingan. Dengan kata lain warga atau penduduk Kecamatan Denpasar Selatan tidak mendapat pekerjaan di daerahnya sendiri. Hal ini diakibatkan pemilik modal atau pengembang yang umumnya datang dari luar, secara langsung membawa pekerja atau buruh mereka sendiri di samping buruh luar lebih murah jika dibandingkan dengan buruh lokal (hasil wawancara dengan I Gede Puruhita, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 5 Agustus 2015)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa akibat dari gencarnya pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan, membuat perubahan terbesar terjadi pada komponen status dalam masyarakat yang menimbulkan perubahan status antara orang yang memiliki lahan dan orang yang tidak memiliki lahan atau buruh tani. Pemilik lahan tetap memiliki posisi stratifikasi sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki lahan. Bahkan, dapat dikatakan ada pembagian kelas, yakni ada golongan yang menindas dan ada golongan yang ditindas. Dengan demikian, petani menjadi kaum *subaltern* atau kaum yang menjadikan kelompok lain berbeda, yang berada lebih di bawah (Ratna, 2013:463). Sehubungan dengan itu, peluang orang yang tidak memiliki lahan semakin kecil dan semakin sempit dalam memperbaiki nasibnya. Karena hanya tetap bertahan pada buruh tani, lebih-lebih lagi kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan, mengakibatkan posisi petani menjadi terpinggirkan atau termarginalkan.

Terkait dengan hal ini tampaknya pemerintah perlu menerapkan regulasi terhadap proses alih fungsi lahan terutama lahan persawahan yang subur dan produktif. Hal itu penting sebab fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masalah lahan persawahan setiap tahun mulai menyempit atau berkurang, kalau tidak mau dikatakan hilang sama sekali. Di samping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat pedesaan. Hal lain yang juga diperlukan adalah sosialisasi, musyawarah, atau kesepakatan bersama dengan masyarakat, terutama para pemilik lahan untuk menghindari permasalahan atau konflik.

Pihak pemilik modal diharapkan memiliki tanggung jawab sosial (*corporatesocial responsibility*), misalnya dengan memberdayakan masyarakat sekitar proyek pengembangan perumahan atau proyek lainnya. Adapun bentuk pemberdayaan adalah dengan memberikan bantuan terhadap

pengembangan ekonomi masyarakat petani, terutama adalah tenaga kerja generasi muda. Tanggung jawab sosial ini dimaksudkan untuk menghindari kesenjangan sosial masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada konflik sosial di masyarakat pedesaan.

Marginalisasi yang disebabkan adanya alih fungsi lahan persawahan adalah fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu, yang biasanya tertahan yang menunjukkan fenomena integral dalam masyarakat. Artinya, peminggiran oleh sekelompok orang, yang menurutnya pariwisata adalah pembangunan, yang meminggirkan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam proses pengembangan dan pembangunannya menggeser nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Proses peminggiran masyarakat kebanyakan terjadi diawali dengan pembebasan lahan, seperti terungkap dalam wawancara dengan I Wayan Nugraha, penduduk Desa Pemogan, sebagai berikut:

Pada lahan persawahan di Desa Pemogan, yang juga terjadi di kelurahan-kelurahan lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan sering terjadi pelanggaran terhadap jalur hijau dan masyarakat lokal tidak berani melarang karena semua itu telah ditentukan oleh pemerintah atau tepatnya oleh para pemilik modal yang seakan-akan telah mendapat restu dari pemerintah. Kami hanya tinggal jadi penonton saja (hasil wawancara dengan I Wayan Nugraha, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Dari pernyataan wawancara di atas nada penindasan dari oknum-oknum yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan dialih fungsikan dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan masyarakat lokal. Sehubungan dengan itu, alih fungsi lahan terus-menerus digencarkan dengan selalu mengedepankan isu pariwisata Bali. Hal tersebut senada dengan hal yang diungkapkan oleh Foucault bahwa kekuasaan beroperasi di seputar dan melalui jejaring yang tumbuh di sekeliling intitusi-institusi negara dalam arti tertentu (Foucault

dalam Latif, 2005:39). Berangkat dari argumentasi Foucault, dalam hal ini ada permainan atau kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk mendapatkan areal yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha bisnis properti melalui hegemoni pemerintah dan pengusaha kepada pemilik lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Pengembang pariwisata membutuhkan sarana dan prasarana yang mendesak lahan pertanian dan menyebabkan terjadinya perubahan tata guna lahan. Artinya, tanah yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian atau persawahan, tetapi yang terjadi adalah pengembangan kawasan perumahan atau fungsi lainnya yang mendesak lahan petani secara hegemonik.

Dalam khazanah ilmu sosial ada beberapa definisi dan penjelasan teoritis mengenai marginalisasi yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan persawahan. Beberapa ahli mengemukakan bahwa marginalisasi merupakan sebuah proses sosial, yang membuat masyarakat menjadi marginal, baik secara alamiah maupun dikreasikan sehingga masyarakat memiliki kedudukan sosial yang terpinggirkan. Hal ini pun dialami oleh petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Petani di Kecamatan Denpasar Selatan menjadi kelompok *subaltern* yang hak-haknya perlu diperjuangkan dan diberikan ruang gerak untuk menyuarakan kepentingannya kepada penguasa. Dengan demikian, akan tercipta kondisi yang partisipatori sebagai sebuah pembelaan pada kelompok *subaltern* yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan.

Bentuk kerja sama antara pemerintah yang memiliki kekuasaan selaku pengambil kebijakan dengan pengusaha selaku pemilik modal dalam mendesak pemilik lahan atau sawah baik secara legal maupun ilegal, demi kepentingan dan tujuan tertentu dalam hal alih fungsi lahan. Dalam konspirasi ini petanilah yang menjadi korbannya.

Dalam kaitannya dengan tekanan penguasa dan pengusaha terhadap petani, pada kasus marginalisasi petani di Kecamatan Denpasar Selatan terungkap bahwa pengusaha yang memiliki modal memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki

penguasa di dalam cara-cara memperoleh lahan, baik secara legal maupun ilegal. Kesepakatan atau *deal-deal* itu menguntungkan kedua belah pihak. Tekanan penguasa sesungguhnya sudah berjalan lama, dalam melakukan proses alih fungsi lahan. Bahkan, tak jarang dilakukan dengan cara represif. Hal itu terungkap lewat informasi I Wayan Sugeh, penduduk Kelurahan Sesetan dalam wawancara berikut.

Tekanan pemerintah dalam hal terjadinya alih fungsi lahan sudah terjadi semenjak pada masa Pak Harto, yang kemudian pemerintah Bali dalam hal ini Gubernur Ida Bagus Oka pun juga ikut menekan kaum petani di Kecamatan Denpasar Selatan untuk mau mengalihfungsikan lahannya yang digunakan untuk kegiatan SPBU misalnya. Ironisnya tekanan pemerintah untuk alih fungsi lahan dengan mengatasmakan pembangunan ini tetap berlangsung hingga sekarang. Apakah ini yang dinamakan bekerjanya ekonomi kapitalis di Bali ini? Saya sendiri jadi bingung apakah pembangunan memang bermanfaat bagi rakyat? (hasil wawancara dengan I Wayan Sugeh, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015).

Dari wawancara di atas, tergambar bahwa tekanan penguasa datang tidak hanya bersifat lokal, tetapi nasional yang dikonstruksi melalui kebijakan-kebijakan, yang menguntungkan kaum pengembang (pengusaha atau kaum kapitalis). Hal tersebut senada dengan pandangan Foucault (dalam Latif, 2005:39) bahwa kekuasaan ada di mana-mana, dalam hal ini kekuasaan berada pada tangan penguasa dan pengusaha. Kepentingan kaum pengusaha direalisasikan oleh kaum penguasa sehingga dengan sendirinya penguasa mendapat keuntungan tersendiri dalam berbagai bentuk, misalnya saham, gratifikasi uang, *money laundry*, dan lain-lain, yang semuanya mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut berakibat terjadi alih fungsi lahan pertanian yang berakibat pada marginalisasi petani. Namun di tengah arus tekanan penguasa dan pengusaha ada juga petani yang tidak takut terhadap tekanan penguasa dan pengusaha seperti

terungkap dalam wawancara dengan I Wayan Pramudya, penduduk Desa Pemogan berikut ini.

Petani pemilik lahan di sini sering didatangi oleh oknum pemerintah untuk membeli tanah petani tersebut dengan harga murah, tetapi pemilik lahan menolak keras menjualnya karena mereka merasa tidak punya tanah. Tanah yang mereka miliki merupakan tanah warisan dari leluhur dan itu pantang untuk dijual (hasil wawancara dengan I Wayan Pramudya, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas tampak bahwa tidak semua warga Kecamatan Denpasar selatan takut terhadap tekanan yang diberikan oleh penguasa dan pengusaha. Bahkan, mereka bertahan sampai saat ini dengan keadaan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam perangkap-perangkap kapitalisme global. Sikap seperti ini merupakan perlawanan secara terbuka dengan melakukan kontra hegemoni dengan mengorganisasikan dan mereorganisasikan terus-menerus kehidupan, baik sadar maupun tidak sadar dari massa (Gramsci, dalam Tilaar, 2003:77).

Penguasa dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan bantuan kepada petani, yang merupakan kewajiban, yang mesti dilakukannya agar petani tetap bisa mempertahankan lahan sawahnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah permainan beberapa pihak untuk meraih keuntungan sepihak dari adanya kebijakan tersebut sehingga menyebabkan tidak tersalurkannya bantuan untuk petani secara penuh. Bukan hanya kesalahan pelaksanaan proses sebuah kebijakan, melainkan, kontrol dari kebijakan itu pun menjadi pertanyaan besar.

Pengalihfungsian lahan sawah menjadi areal permukiman di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah berkolaborasi dengan pengusaha secara halus, canggih, dan intelek melalui wacana pembangunan. Wacana diberikan secara halus sehingga petani di Kelurahan Denpasar Selatan tidak

menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni. Bahkan, dalam praktiknya wacana hegemoni dilengkapi dengan dominasi yang sifatnya represif.

Hegemoni di Kecamatan Denpasar Selatan dilakukan melalui wacana tentang pembangunan perumahan, yang didukung oleh pemerintah bersama dengan pengusaha (investor) kepada masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan. Hegemoni tersebut disertai dengan janji-janji tertentu, yang cukup menggiurkan masyarakat di Kelurahan Denpasar Selatan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Secara umum janji-janji hegemoni yang ditunjukkan itu memperlihatkan adanya kontestasi antara penguasa dan masyarakat terhadap lahan yang beralih fungsi, dengan kepentingan yang berbeda. Petani di Kecamatan Denpasar Selatan lebih memaknai lahan tersebut sebagai sumber ekonomi bagi kehidupannya di samping memberikan makna religius terhadap areal persawahan. Sebaliknya pihak penguasa lebih menekankan pada penataan lahan yang tidak merugikan, baik secara ekonomi maupun religius terhadap masyarakat pendukungnya.

Alih fungsi lahan persawahan terjadi tidak hanya akibat belum maksimalnya kebijakan pemerintah yang membela kepentingan petani, tetapi juga akibat petani sudah mulai goyah dalam mempertahankan *swadharma* sebagai petani dan tergiur pekerjaan lain. Memang nasib petani di Kecamatan Denpasar Selatan kini kian terpuruk. Selain masih dianggap termarginalkan, permasalahan yang dihadapi petani di Kecamatan Denpasar Selatan makin kompleks. Ironisnya, pemerintah daerah terkesan tidak mau tahu kesulitan yang dirasakan petani. Padahal, selain sektor pariwisata, pertanian juga masih tetap memegang peran strategis menjaga stabilitas dan pemerataan perekonomian di Bali. Sektor pertanian menjadi semakin suram sebagai akibat adanya alih fungsi lahan yang meningkat dan air irigasi semakin terbatas karena

sebagian diambil oleh PDAM sehingga regenerasi petani semakin lemah karena generasi muda enggan menjadi petani. Di samping itu juga, ketergantungan benih, pupuk, dan biaya pengelolaan lahan tinggi, seperti sewa traktor, upah tanam, panen, ditambah lagi harga jual hasil panen tidak menentu. Hal lainnya adalah meningkatnya tuntutan kebutuhan lahan permukiman dan fasilitas pariwisata, kerusakan lingkungan, cuaca yang tidak menentu, beban pajak, serta rendahnya kemaun anak muda untuk bertani.

Hal inilah yang menjadi kendala para petani di Kecamatan Denpasar selatan yang menyebabkan mereka selalu tertindas dan tertekan. Dengan kondisi seperti ini wajar saja jumlah petani di Bali khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan semakin berkurang karena kebanyakan generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani. Hal itu terjadi karena bayangan bahwa menjadi petani merupakan pekerjaan yang melelahkan dan tidak menjanjikan hidup masa depan yang lebih baik.

Kondisi ini juga berdampak pada upaya-upaya pelestarian sawah dan sistem *subak*. Kini banyak sawah dan *subak* yang tidak mempunyai lahan dan terdesak. Yang tersisa hanya nama dan *pelinggih*-nya, yakni Pura Ulun Suwi. Kondisi ini sangat ironis di tengah kuatnya budaya Bali yang bermuara dari kehidupan bertani. Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi oleh petani Kecamatan Denpasar Selatan seiring dengan perkembangan global adalah terjadinya marginalisasi pertanian dan kehidupan petani.

Perlindungan petani sebenarnya adalah segala upaya membantu petani menghadapi permasalahan prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dalam beberapa hal, upaya perlindungan petani masih sebatas jargon. Berbagai kasus penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi sering tidak berakhir di meja hijau. Kasus penyelewengan hanya heboh di awal, kemudian masuk peti es.

Perlindungan terhadap lahan pertanian juga belum secara serius dilakukan oleh pemerintah. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 41, Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, konversi lahan sawah tetap berlangsung terus-menerus. Inilah awal dari bencana karena sektor industri perumahan dan pariwisata tidak serta merta mampu menyediakan lapangan kerja bagi para petani ataupun buruh tani yang tanahnya dikonversi sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan seperti saat ini. Seharusnya melalui mekanisme pasar yang sehat, harga pangan terjangkau dan kesejahteraan petani meningkat sehingga tercipta kehidupan petani yang harmoni dan sejahtera dalam hal sandang, pangan, dan papan.

Para petani juga harus dilindungi dari globalisasi perdagangan, yaitu mulai dari pestisida berbahaya, benih transgenik, atau pupuk kimia yang di negara asal telah dilarang. Globalisasi perdagangan tidak menciptakan perkampungan global (*global village*), tetapi lebih mirip penjarahan global (*global pillage*). Saatnya alih fungsi lahan pertanian di Indonesia pada umumnya dan Bali serta Kecamatan Denpasar Selatan harus segera diakhiri dan harus diadakan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh para petani di Kecamatan Denpasar Selatan.

Faktor kebijakan pemerintah, yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berhubungan dengan perubahan fungsi lahan pertanian perlu dipertegas. Kelemahan pada aspek regulasi atau peraturan itu terutama terkait dengan masalah kekuatan hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi dan harus diusahakan secara maksimal, agar dapat dijadikan lahan pertanian yang abadi. Hal ini harus ada perlindungan secara hukum melalui perda (Albornaz, 2007:202).

Patologi birokrasi (*Bureaupathology*) adalah himpunan dari perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur patologi birokrasi digambarkan seperti sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau

rutinitas-rutinitas, dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status (Dwidjowijoto, 2006:84)

Para pemilik modal jelas bertujuan untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menjalankan perusahaannya namun seharusnya dengan tetap harus mematuhi hukum yang berlaku. Meskipun harus tetap diingat bahwa seorang pengusaha bisa dan harus juga mempunyai tanggung jawab (sosial), yaitu turut serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara baik secara langsung maupun tidak (Agung, 2010: 19).

Birokrasi selalu diwarnai dengan adanya campur tangan penguasa dan pengusaha. Patologi ini akan menyebabkan penyelewengan terhadap kebijakan politik, yang tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat, tetapi mementingkan para pemilik modal dan para penguasa itu sendiri. Ciri khas korupsi di Indonesia, antara lain bersifat integralistik, yaitu dipraktikkan begitu menyatu antara penguasa dan pengusaha. Penguasa yang berkolusi dengan para pemilik modal tidak saja di tingkat rendah dan menengah, tetapi terutama sekali di tingkat atas sebagaimana yang dilansir oleh media massa cetak dan elektronik (Hisyam, 2003:197).

Dengan kekuatan uang, para pemilik modal seperti memiliki senjata ampuh untuk menekan pemerintah. Sampai saat ini birokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan campur tangan para pemilik modal. Di samping itu, juga berbagai kebijakan hanya mementingkan para pemilik modal dan pejabat semata. Oleh karena itu ketegasan birokrasi di Indonesia harus ditingkatkan dan mereka harusnya membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat secara transparan.

## **B. Gaya Hidup**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dinyatakan bahwa gaya adalah kesanggupan untuk berbuat (Depdiknas, 2008:443), sementara hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (Depdiknas, 2008:521). Gaya hidup

dapat diartikan sebagai pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang sosial. Gaya hidup atau *life style* juga dapat diartikan, sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Dalam hal ini gaya hidup menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini terlihat pada wawancara dengan Ni Komang Aryani, penduduk di Kelurahan Pedungan sebagai berikut:

Karena berkeinginan hidup mewah dan bercermin pada tetangga mereka yang punya rumah bagus, punya mobil bagus, harga tanah yang ditawarkan dengan harga tinggi, petani menjadi tergiur menjual sawah agar bisa seperti tetangganya yang memiliki semuanya (hasil wawancara dengan Ni Komang Aryani, penduduk di Kelurahan Pedungan, pada tanggal 3 Desember 2015).

Dari wawancara di atas, masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan sudah banyak yang terpengaruh, atau dihegemoni oleh budaya-budaya modern dengan segala keasyikannya. Zaman modern membuat petani lupa segalanya walaupun harta pemberian leluhurnya berupa sawah pun ikut dijual, demi terpenuhi hasrat dunianya yang cenderung konsumtif karena salah satu bagian akibat dari gaya hidup adalah budaya konsumerisme. Hal serupa dikemukakan oleh Hasan (2011:188) bahwa “para produsen individual (kaum kapitalis) memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka (petani dan masyarakat) dengan ragam yang lebih banyak”. Secara tidak langsung masyarakat petani dihegemoni dengan materi, berupa barang-barang yang diproduksi oleh kaum kapitalis dengan tujuan agar masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan, menjadi masyarakat konsumerisme. Konsumerisme berasal dari kata dasar konsumen yang diberikan akhiran isme.

Konsumen berarti pemakai barang-barang hasil industri (Depdiknas, 2008:750), sementara akhiran “isme” memberikan penekanan bahwa orang yang berideologikan hidup konsumen yang berlebihan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan I Wayan Gatra, penduduk Desa Pemogan berikut ini :

Dahulu *canang, banten*, dan perlengkapan adat dibuat sendiri maupun secara bergotong royong bersama keluarga, maupun warga. Namun, hal demikian sulit ditemukan saat ini karena saat ini hal-hal yang berhubungan dengan perlengkapan adat sudah tersedia di pasar, dengan kasarnya ada uang ada barang (hasil wawancara dengan I Wayan Gatra, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 7 Desember 2015)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa kini warga Kecamatan Denpasar Selatan cenderung lebih baik membeli daripada memproduksi sendiri kebutuhan kesehariannya terutama yang berhubungan dengan perlengkapan adat. Gaya hidup instan, serba cepat dan praktis adalah cirri khas dari sikap manusia modern. Kemudian mereka mengaitkan dengan kesibukan meningkat, kebutuhan hidup mendesak, maka dalam pandangan kapitalisme itu adalah peluang untuk mencari keuntungan, ideologi pun bisa dijadikan pangsa pasar. Sehubungan dengan itu, dengan alasan logis hal yang bersifat sakral, bisa diperjualbelikan. Dengan kata lain telah terjadi komodifikasi, yang diakibatkan oleh hegemoni kapitalis sesuai dengan pandangan Fairclough (dalam Ratna, 2013:496) bahwa komodifikasi adalah suatu proses, yang di dalamnya benda, aktivitas, dan buah pemikiran, juga hasil-hasil kebudayaan secara keseluruhan, yang semula hanya untuk memenuhi kebutuhan secara personal kemudian didistribusikan, dikonsumsi secara impersonal. Bahkan, secara massal digunakan sebagai barang komoditas.

Menurut Pendit (2000: 80-81) pada hakekatnya ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh adanya alih fungsi lahan persawahan, yaitu: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak positif yang menguntungkan

dalam bidang ekonomi yaitu bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan atau fungsi komersial dapat meningkatkan perekonomian setempat dan terciptanya kesempatan kerja, serta adanya kemungkinan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Dampak positif yang lain adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan, terutama pada unsur budaya teknologi dan sistem pengetahuan yang maju. Dampak negatif dari alih fungsi lahan persawahan tampak menonjol pada bidang sosial, yaitu pada gaya hidup masyarakat setempat. Gaya hidup ini meliputi perubahan sikap, tingkah laku, dan perilaku karena kontak langsung dengan para pendatang yang berasal dari budaya berbeda.

Sama halnya dengan pariwisata, alih fungsi lahan persawahan yang merupakan bentuk komersialisme tanah/sawah, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan sekaligus sesuatu yang tak dapat ditampik, yaitu berperan sebagai penggerak utama pembangunan dan perangsang modernisasi yang didamba-dambakan dan sekaligus dikhawatirkan (Picard, 2008: 71-72).

Besarnya pengaruh komersialisasi tanah dalam bentuk alih fungsi lahan tidak saja mengakibatkan berkurangnya ketergantungan masyarakat desa terhadap sektor pertanian, tetapi juga mengubah orientasi produksi para petaninya. Perubahan orientasi tersebut terlihat dari tujuan kegiatan produksi yang dilakukan. Pada mulanya kegiatan produksi hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri (konsumsi), kemudian berubah menjadi kegiatan produksi untuk mendapatkan manfaat ekonomi yaitu keuntungan atau *profit-oriented* (Picard, 2008: 78).

Kuatnya hegemoni kapitalisme dan gaya hidup modern juga berpengaruh pada pemilihan mata pencaharian petani. Modernisme meletakkan pekerjaan petani sebagai pekerjaan kasar, tradisional sehingga tidak layak dikerjakan oleh orang modern. Akibatnya mata pencaharian penduduk Bali termasuk penduduk Kecamatan Denpasar Selatan pada

mulanya mayoritas adalah petani. Akan tetapi, setelah berkembangnya pariwisata di Bali yang dimulai tahun 1960 dan adanya alih fungsi persawahan yang dimulai tahun 1990-an masyarakat Bali termasuk masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan mulai meninggalkan kegiatan mereka sebagai petani. Alasannya penghasilan dari sektor pertanian kurang menjanjikan, sedangkan dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, mereka mendapatkan penghasilan yang lebih besar (Pitana dan Putra, 2008: 52-53). Oleh karena itu generasi kedua petani di Bali (termasuk petani di Kecamatan Denpasar Selatan) tidak tertarik lagi bekerja sebagai petani.

Keturunan petani jarang sekali ingin menjadi petani, kecuali mungkin jika sudah terdesak. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Made Wiradnyana, penduduk Kelurahan Sesetan sebagai berikut :

Saat ini warga, Kelurahan Sesetan menjadikan pertanian sebagai kerja sampingan, kerja utama adalah kerja di kantor, buruh bangunan, dan Dinas Kebersihan Kota (DKP) (hasil wawancara dengan I Made Wiradnyana, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015)

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa warga petani di Kecamatan Denpasar Selatan tidak menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama terlebih generasi kedua para petani. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan petani tidak menjanjikan prospek masa depan yang lebih baik bagi anak-anak modern saat ini. Di samping itu, mereka lebih memilih pekerjaan yang berada pada sektor pariwisata, perkantoran, dan lain-lain. Akibat dari tidak adanya regenerasi petani, dan kaum muda lebih memilih pekerjaan yang berhubungan dengan sektor pariwisata maka dengan sendirinya profesi petani menjadi terpingirkan atau menjadi *subaltren*. Hal itu seperti yang dikemukakan Gramsci (dalam Ratna, 2013:463) bahwa *subaltern* adalah orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu, petani yang berusia muda di Kecamatan Denpasar Selatan akan terus mengikuti gaya hidup, yang telah dikonstruksikan oleh gaya

hidup modern. Hal ini terungkap dari wawancara dengan Ni Wayan Sulasih, penduduk di Desa Pemogan berikut ini:

Akibat terjadinya modernisasi zaman yang diikuti oleh alih fungsi lahan, maka uang hasil menjual sawahnya kebanyakan dipakai berfoya-foya seperti judi tajan serta kehidupan malam dengan berfoya-foya lebih-lebih karena adanya sanjungan dari teman-teman dekatnya (hasil wawancara dengan Ni Wayan Sulasih, penduduk di Desa Pemogan, pada tanggal 7 Desember 2015)

Dari wawancara di atas terlihat jelas bahwa masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan banyak yang terjebak dengan gaya hidup modern, yang dibawa oleh dampak pariwisata. Ketika seorang petani telah memiliki uang yang berlebih dari hasil penjualan lahan, apabila tidak dikontrol dengan baik dari pengaruh gaya hidup hedonis, maka masyarakat akan terjebak dalam perangkap kapitalisme, yaitu gaya hidup atau *life style* seperti yang diungkapkan oleh Ratna (2013:147) yakni gaya hidup yang menandakan kemajuan tingkat kehidupan manusia menghargai dan memuliakan nilai-nilai kehidupan individu. Dalam hubungan ini adalah dengan memberikan berbagai bentuk kepuasan. Kepuasan dunia inilah yang membawa masyarakat petani terjebak dalam hegemoni kapitalis yang membuat masyarakat petani menjadi marginal. Hal ini juga terungkap dari informasi dari Ni Wayan Sulasih, penduduk Desa Pemogan sebagai berikut.

Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sesuai dengan tuntutan zaman, maka banyak sawah di Desa Pemogan dijual, lebih-lebih petani tergiur dengan harga tanah yang begitu melambung tinggi (hasil wawancara dengan Ni Wayan Sulasih, penduduk di Desa Pemogan, pada tanggal 7 Desember 2015)

Hasil wawancara di atas sesuai dengan pandangan O'Donnell (2003:22) bahwa "materialisme dan konsumerisme merusak lingkungan dan menguras semangat dan nilai masyarakat". Hal itu terjadi karena banyak warga petani yang tergiur dengan keduniaan yang dipengaruhi oleh kemajuan

zaman, yaitu manusia dicekoki dengan kemudahan dan keasyikan dunia (instan). Semua itu bisa diperoleh dengan uang (materi) dan pada saat yang sama, gaya hidup yang dulunya masih tradisional pun ikut berubah menjadi gaya hidup modernis. Masyarakat yang ikut dengan gaya hidup yang modernis, mau tidak mau harus mendapatkan modal uang untuk bisa berada dalam komunitas modern tersebut. Ketika pengetahuan tentang modal uang tidak ada dan dimanfaatkan oleh kaum modernis kapitalis bahwa lahan petani atau masyarakat tersebut bisa dipakai anggunan atau sebagai kompensasi uang, yang dapat dipakai masyarakat mengikuti gaya kehidupan modern. Karena hal ini telah terjadi, maka perubahan perilaku, baik individu maupun masyarakat, terjadi dengan sendirinya. Fakta ini terungkap melalui wawancara dengan I Wayan Suaga, penduduk Kelurahan Pedungan berikut:

Ada juga warga di sini dulu sebelum jual sawah dan jadi kaya, orangnya hidup biasa saja, sekarang setelah punya uang dari hasil jual sawah, sudah beda gaya hidupnya sering ke kafe, minum-minum, agak sombong sekarang (hasil wawancara dengan I Wayan Suaga, penduduk Kelurahan Pedungan, pada tanggal 28 Desember 2015)

Hasil wawancara di atas, sesuai dengan pendapat Ratna (2013:147) mengemukakan yakni gaya hidup menandakan kemajuan tingkat kehidupan, manusia menghargai dan memuliakan nilai-nilai kehidupan individu, dalam hubungan ini dengan memberikan berbagai bentuk kepuasan. Hal ini terungkap dari perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku seseorang, yang diakibatkan oleh gaya hidup yang hedonis. Itulah sebabnya dalam masyarakat pun, tidak terjalin hubungan yang baik. Hal ini akan menyebabkan manusia berdiri pada kelompoknya masing-masing dan membentuk komunitas eksklusif sendiri. Akhirnya terjadilah kesenjangan yang memicu konflik, baik horizontal maupun vertikal. Ketika konflik ini muncul tak jarang masyarakat atau kelompok itu sendiri yang menjadi korban dari jebakan

kapitalisme, seperti terungkap dalam wawancara dengan I Nengah Ardhana, penduduk Kelurahan Sesetan berikut.

Ada juga petani yang sempat kaya, karena gaya hidup berlebihan dan jatuh miskin, dia tidak mau bekerja lagi karena malu (hasil wawancara dengan I Nengah Ardhana, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015).

Dari wawancara di atas, terungkap bagaimana perangkat kapitalisme menjebak mangsanya, yaitu setelah masyarakatnya dipecah, gaya hidupnya dikonstruksi, kemudian keuntungan yang sebesar-besarnya diambil tanpa menyisakan sedikit pun, sehingga nasib tragis akan menimpa masyarakat itu sendiri. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh O'Donnell (2003:22) bahwa "materialisme dan konsumerisme merusak lingkungan serta menguras semangat dan nilai masyarakat. Namun ada juga warga yang tidak terpengaruh oleh gaya hidup berlebihan. Mereka tetap bertahan dengan kehidupan tradisionalnya, seperti yang di ungkapkan oleh Ni Komang Wuryani penduduk Kelurahan Sesetan berikut ini.

Saya walaupun tidak menjual sawah masih saya punya motor lama yang penting masih bagus tidak perlu yang baru yang penting bisa dipakai dan sampai pada tujuan dengan selamat, buat apa beli motor baru untuk gaya-gaya, sementara motor baru itu dibeli dengan kredit yang harus dibayar angsurannya tiap bulan, yang jika tidak bisa bayar angsuran akan bisa bikin pusing kepala (hasil wawancara dengan Ni Komang Wuryani penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa warga atau masyarakat tidak tergiur dan terjebak dalam perangkat kapitalisme global, yaitu gaya hidup hedonis, justru hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Mereka (petani, masyarakat) mengupayakan perlawanan atau kontra hegemoni terhadap jebakan kapitalisme. Hal ini terjadi pada Ni Komang Wuryani yang lebih memilih hidup sederhana berdasarkan kebutuhan nyata sehingga tidak mudah terperangkap oleh

jebakan yang dikonstruksi oleh kaum kapitalis yang semakin mengglobal saat ini. Hal ini senada dengan pendapat Gramsci (dalam Tilaar, 2003:77) bahwa kontra hegemoni bertugas memisahkan kaum proletar dari pandangan-pandangan kapitalisme dan mengukuhkan pandangan dunia sosial.

Memahami alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi lainnya tidak dapat dilepaskan dari hubungan konsep-konsep ideologi, hegemoni, dan budaya. Alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan menunjukkan kompleksitas yang antagonis dalam hubungan-hubungan kekuasaan (*power*) dan perjuangan (*struggle*) antara kelas-kelas dengan budayanya yang dominan dan kelas yang didominasi (Giroux, 1981). Ideologi, karena itu dapat berfungsi sebagai kesadaran yang memberikan cara pandang kepada masyarakat bagaimana prinsip-prinsip yang objektif harus ditegakkan demi kelangsungan masyarakat itu sendiri (Althusser, 1984; Larrain, 1996). Di sisi lain, ideologi juga menjadi kesadaran yang palsu karena menjadi alat bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan *status quo*/hegemoninya (Ritzer, 1992). Tetapi realitas sosial juga menunjukkan adanya tindakan politis dalam hubungan-hubungan kekuasaan yang memungkinkan budaya masyarakat melakukan transformasi.

Ideologi menurut Lefebvre, sebagai dikutip oleh Ritzer (1992:70), adalah sebagai sistem ide yang terintegrasi yang berada di luar manusia tetapi memiliki kekuasaan yang memaksa. Memiliki kekuasaan yang memaksa di sini dapat diartikan sebagai yang menentukan cara pandang manusia terhadap sistem pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai dan tindakan moral, serta hubungan sosial yang secara keseluruhan membentuk sistem sosial di dalam masyarakat. Memandang ideologi dalam hubungan-hubungan kekuasaan di dalam masyarakat, karena itu, tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap kesadaran, dan kemungkinan-kemungkinan yang inheren di dalam kesadaran ideologi itu sendiri. Di satu sisi ideologi melambangkan bentuk-bentuk kesadaran dan wacana yang palsu dibuat oleh kondisi sosial dan material dimana

ideologi itu muncul; di sisi lain ideologi dipandang sebagai suatu sistem ide yang mengubah realitas untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok kelas yang dominan di dalam masyarakat (Giroux, 1981).

Mengikuti konsep Marx tentang ideologi, Ritzer (1992:71) menyimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga gagasan yang saling berhubungan terlibat dalam konsep ideologi. Pertama adalah ideologi itu menggambarkan kepentingan kelompok dan budaya yang berkuasa termasuk dampaknya terhadap kepentingan-kepentingan material. Kedua, ideologi merupakan refleksi yang terbalik dan memotong realitas yang ada. Ketiga, ideologi memiliki eksistensinya yang independen dan memaksa. Dari tiga karakteristik ini dapat dipahami bagaimana ideologi berperan dalam memperoleh persetujuan dari kelompok dan budaya yang tertindas dan tereksplorasi. Lefebvre (1968:76) menegaskan bahwa ideologi merampas dari kaum tertindas, tidak saja yang bersifat kesejahteraan materi, tetapi juga penerimaan mereka secara spiritual atas situasi yang dikondisikan ideologi itu, dan balikan dukungan-dukungan mereka.

Tentu saja ideologi tidak berfungsi dalam satu kevakuman, ideologi beroperasi melalui agen-agen yang melaksanakan dominasi mereka. Ideologi itu akan mempengaruhi tindakan para agen dari kelas yang berkuasa dan pada gilirannya mempengaruhi pula cara berpikir dan bertindak kelompok dan budaya yang dikuasai, misalnya petani dan investor atau pemilik modal (Ritzer, 1992:71). Atas dasar inilah perlu dipahami konsep tentang hegemoni.

Hegemoni dinyatakan oleh Gramsci, sebagai dikutip oleh Giroux (1981:23), mempunyai dua makna. Pertama adalah mengacu kepada suatu proses dalam masyarakat sipil yang memungkinkan kelompok kelas yang fundamental melakukan control bagaimanapun kepemimpinan moral dan intelektualnya terhadap kelompok atau kelas-kelas aliansi. Dalam perspektif ini satu aliansi dibentuk di antara *the ruling groups* sebagai hasil

dari kekuasaan dan kemampuan satu kelas untuk mengartikulasikan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang lain kepada kepentingannya. Ini tidak berarti bahwa kepemimpinan intelektual dan moral kelompok 'dominan harus memaksakan ideologinya kepada *aliied groups* (kelompok sekutu), melainkan melalui proses transformasi secara pedagogis dan politik kelompok atau kelas dominan mengartikulasikan prinsip hegemoni yang membawa bersama elemen-elemen umum dari pandangan dunia dan kepentingan-kepentingan dari *aliied groups*.

Makna yang kedua menunjukkan bahwa hegemoni itu terjadi dalam hubungan antara kelas dominan dengan kelas yang didominasi. Dalam hal ini kelas dominan berhasil menggunakan kontrolnya atas sumber-sumber negara dan masyarakat sipil melalui penegakan ideologi/pandangan dunia bersama yang cenderung dianggap berlaku universal dan disosialisasikan melalui sistem pendidikan. Dengan dua kekuatan, kekuasaan dan persetujuan umum, kelas dominan menggunakan kepemimpinan intelektual, moral, dan politiknya membentuk dan menjadikan pandangan, kebutuhan, dan kepedulian kelompok-kelompok subordinasi *taken-for-granted*. Dalam melaksanakan itu semua tidak saja kelompok dominan mempengaruhi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompok yang terdominasi, tetapi juga membatasi wacana dan praktik kehidupan yang bersifat oposisi. Dalam hal terakhir, ideologi yang memegang kendali hegemoni berupaya membatasi wacana dengan menetapkan agenda politik, mendefinisikan isu dan terminologi dalam wacana, serta mengeluarkan gagasan-gagasan yang bersifat oposisi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hegemoni nampak di dalam kekuatan simbol-simbol dan makna-makna yang melegitimasi kepentingan dominan dan *dalam* praktik yang menstruktur pengalaman sehari-hari.

Dalam proses alih fungsi lahan persawahan seperti yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan, adanya produksi ideologi yang dominan dan bersifat hegemonik cenderung

bersembunyi di balik sejumlah bentuk-bentuk legitimasi, beberapa di antaranya disebutkan oleh Giroux (1981:24) adalah adanya klaim dari kelas dominan bahwa kepentingan mereka mencerminkan kepentingan semua kelompok; konflik dianggap terjadi berada pada tataran kepentingan nonpolitis; dan presentasi bentuk-bentuk kesadaran tertentu, keyakinan, sikap, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap bersifat alamiah, universal, dan etemal.

Hubungan antara ideologi dan hegemoni seperti di atas tidaklah harus ditafsirkan bahwa bentuk dan proses hegemoni menggambarkan kekuasaan yang kohesif; artinya, hegemoni tidaklah semata-mata berarti bahwa kelompok dominan memproyeksikan ide-idenya kepada kelompok subordinasi. Seperti Gramsci lebih lanjut menyatakan bahwa dalam hubungan-hubungan kekuasaan seperti itu selalu ada kesadaran yang kontradiksi (*conradiclory consciousness*) yang membuat manusia memandang dunia ini dari dua perspektif; yaitu adanya bentuk hegemoni dari berpikir dan adanya mode berpikir kritis. Melalui dua perspektif itu kemudian hubungan kekuasaan berproses dalam dialektika budaya antara upaya mempertahankan bentuk dan isi kepentingan yang mendapat legitimasi dari ideologi di satu sisi dengan upaya transformasi budaya untuk menyelaraskannya dengan perubahan tuntutan sejarah di sisi Jam (Giroux, 1981).

Karena itu, dalam hubungan ideologi dan hegemoni di atas, budaya haruslah dipandang sebagai sejumlah hal yang divergen dimana kekuasaan dijalankan secara tidak seimbang untuk menghasilkan perbedaan makna dan praktik yang akhirnya akan menghasilkan satu tipe masyarakat yang berfungsi dalam kepentingan kelas yang dominan. Sejalan dengan pengertian budaya tersebut, maka di samping penting mengidentifikasi spesifikasi konten, mekanisme, dan prinsip yang mendasari praktik hegemoni pada proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan perlu juga untuk mensituasikannya dalam hubungan kehidupan petani yang kontradiktif yang mewarnai kehidupan budaya

masyarakat petani itu sendiri. Seperti di katakan oleh Giroux (1981:29) lebih lanjut, kepentingan perspektif ini karena memungkinkan: (1) melihat kekuatan dan kelemahan dalam praktik hegemoni pada proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan; (2) melihat bagaimana bahasa, gaya, estetika, keterampilan, serta simbol-simbol dan makna dijadikan mediasi bagi alat hegemoni dan tranformasi; (3) melihat hubungan kekuasaan antara kepentingan negara, institusi-institusi masyarakat yang lain, dan kepentingan petani mewarnai praktik hubungan masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan; dan (4) menyediakan pemuka adat melihat bagaimana kontradiksi kapital terekspresi tidak saja dalam wacana hubungan diantara masyarakat petani, tetapi juga di dalam struktur kebutuhan-kebutuhan dan disposisi-disposisi yang hidup dan berperan di luar masyarakat petani.

Karena terhegemoni oleh gaya hidup yang hedonis, petani di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan tanpa disadari mereka banyak melakukan tindakan fatalistik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* fatalisme diartikan sebagai ajaran atau kepercayaan bahwa manusia dikuasai nasib (Depdiknas, 2008:405). Namun, fatalisme juga dikenal dengan kata sifat fatalistik yang diartikan sebagai tidak adanya perlawanan dan menganggap keadaan yang menimpanya adalah suratan takdir (Priambodo, 2009:21). Apabila fatalisme dikaitkan dengan kajian ini, maka sikap fatalistik atau fatalisme ini merupakan ketidakberdayaan petani terhadap hegemoni dan kekuasaan investor (pemodal) yang bekerja sama dengan penguasa. Selain itu fatalisme yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Denpasar Selatan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat tinggi tidak sebanding dengan penghasilan dari pertanian yang dimilikinya. Hal itu terungkap dari hasil wawancara yang disampaikan oleh I Wayan Arthana, Penduduk di Kelurahan Sesetan, dalam wawancara sebagai berikut :

Kami mendapat warisan sawah dari orang tua kami masing-masing seluas 2 are ini tentunya tidak menguntungkan bila saya garap. Saya juga membutuhkan tanah untuk membangun rumah untuk keluarga saya sendiri. Untuk tetap tinggal di rumah keluarga rasanya sudah penuh sesak, jadinya tidak nyaman. Sementara itu hanya tanah di daerah sesetan kan sudah sangat tinggi sekali. Jadi, saya menjual sawah warisan yang 2 are tadi. Hasilnya saya belikan tanah di daerah pinggiran, di daerah Bangli. Saya beli di sana 8 are tanah. Dengan tanah itu saya dapat membangun rumah untuk keluarga saya, bahkan saya dapat menerapkan *Asta Kosala Kosali* dalam membangun rumah saya tersebut yang tidak mungkin saya bangun kalau saya tidak menjual tanah saya tersebut. (Hasil wawancara dengan I Wayan Astana, pada tanggal 13 Desember 2015).

Pilihan menjual tanah yang dimiliki seperti di kasus di atas sebenarnya sebuah solusi yang bagi situasi keluarga mereka yang sudah sangat terdesak akan kebutuhan tempat tinggal yang lebih layak menurut orang Bali. Hal itu dibenarkan oleh IB Putu Wiyasa, Penduduk Kelurahan Pedungan, sebagai berikut.

Bagi kami orang Bali, apalah artinya sawah 2-3 are, tidak akan menghidupi. Dibangun rumah pun masih kurang luas. Apalagi bagi orang Bali, membangun rumah kan, tidak membangun 1 rumah saja, tapi perlu juga membangun bangunan-bangunan kelengkapan lainnya. Ya, sesuai filosofi *Asta Kosala-Kosali* lah (Hasil wawancara dengan IB Putu Wiyasa, Penduduk Kelurahan Pedungan, pada tanggal 28 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, memperlihatkan betapa orang Bali menganggap tanah 2-3 Are tidaklah bisa menghidupi. Kemudian mereka mencari alasan bahwa orang Bali idealnya punya rumah yang sesuai dengan filosofi *asta kosala kosali*. *Asta kosala-kosali* merupakan aturan dimensi dan bahan bangunan pada bangunan tradisional Bali atau dapat juga dikatakan sebagai arsitektur dalam perspektif

budaya Bali. Meskipun di Kota Denpasar, filosofi ini sudah mulai ditinggalkan, namun tidak dipungkiri masih banyak masyarakat Bali yang berkeinginan untuk membangun rumahnya sesuai filosofi *Asta Kosala-Kosali* tersebut. Orang Bali begitu penting memiliki rumah khas Bali, Karena rumah Bali memiliki berbagai fungsi secara simbolik. Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti: tidur, makan, istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. (Sulistiyawati, 1985:15). Dengan demikian rumah tradisional sebagai perwujudan budaya sangat kuat dengan landasan filosofi yang berakar dari agama Hindu.

Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengharmoniskan alam semesta dengan segala isinya yakni *bhuana agung* (Makro kosmos) dengan *bhuana alit* (Mikro kosmos), dalam kaitan ini *bhuana agung* adalah lingkungan buatan/bangunan dan *bhuana alit* adalah manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990).

Manusia (*bhuana alit*) merupakan bagian dari alam (*bhuana agung*), selain memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama, juga terdapat perbedaan ukuran dan fungsi. Manusia sebagai isi dan alam sebagai wadah, senantiasa dalam keadaan harmonis dan selaras seperti *manik* (janin) dalam *cucupu* (rahim ibu). Rahim sebagai tempat yang memberikan kehidupan, perlindungan dan perkembangan janin tersebut, demikian pula halnya manusia berada, hidup, berkembang dan berlinggung pada alam semesta, ini yang kemudian dikenal dengan konsep *manik ring cucupu*. Dengan alasan itu pula, setiap wadah kehidupan atau lingkungan buatan, berusaha diciptakan senilai dengan suatu *Bhuana agung*, dengan susun unsur-unsur yang utuh, yaitu: *Tri Hita Karana*.

*Tri Hita Karana* yang secara harfiah *Tri* berarti tiga; *Hita* berarti kemakmuran, baik, gembira, senang dan lestari; dan *Karana* berarti sebab musabab atau sumbernya sebab (penyebab), atau tiga sebab/unsur yang menjadikan kehidupan

(kebaikan), yaitu: 1). *Atma* (zat penghidup atau jiwa/roh), 2). *Prana* (tenaga), 3). *Angga* (jasad/fisik) (Majelis Lembaga Adat, 1992:15).

*Bhuana agung* (alam semesta) yang sangat luas tidak mampu digambarkan oleh manusia (*bhuana alit*), namun antara keduanya memiliki unsur yang sama, yaitu *Tri Hita Karana*, oleh sebab itu manusia dipakai sebagai cerminan. Konsepsi *Tri Hita Karana* dipakai dalam pola perumahan tradisional yang diidentifikasi; *Parhyangan/Kahyangan Tiga* sebagai unsur *Atma*/jiwa, *Krama*/warga sebagai unsur *Prana* tenaga dan *Palemahan*/tanah sebagai unsur *Angga*/jasad (Kaler, 1983:44).

Konsepsi *Tri Hita Karana* melandasi terwujudnya susunan kosmos dari yang paling makro (*bhuana agung*/alam semesta) sampai hal yang paling mikro (*bhuana alit*/manusia). Dalam alam semesta jiwa adalah *paramatma* (Tuhan Yang Maha Esa), tenaga adalah berbagai tenaga alam dan jasad adalah *Panca Maha Bhuta*. Dalam perumahan (tingkat *desa*); jiwa adalah *parhyangan* (pura desa), tenaga adalah *pawongan* (masyarakat) dan jasad adalah *palemahan* (wilayah desa). Demikian pula halnya dalam banjar: jiwa adalah *parhyangan* (pura banjar), tenaga adalah *pawongan* (warga banjar) dan jasad adalah *palemahan* (wilayah banjar). Pada rumah tinggal, jiwa adalah *sanggah pemerajan* (tempat suci), tenaga adalah penghuni dan jasad adalah pekarangan. Sedangkan pada manusia, jiwa adalah *atman*, tenaga adalah *sabda bayu idep* dan jasad adalah *stula sarira*/tubuh manusia.

*Tri Hita Karana* (tiga unsur kehidupan) yang mengatur keseimbangan atau keharmonisan manusia dengan lingkungan, tersusun dalam susunan jasad/angga, memberikan turunan konsep ruang yang disebut *Tri Angga*. Secara harfiah *Tri* berarti tiga dan *Angga* berarti badan, yang lebih menekankan tiga nilai fisik yaitu: *Utama Angga*, *Madya Angga* dan *Nista Angga*. Dalam alam semesta/*Bhuana agung*, pembagian ini disebut *Tri Loka*, yaitu: *Bhur Loka* (bumi), *Bhuah Loka* (angkasa), dan *Swah Loka* (Sorga). Ketiga nilai tersebut didasarkan secara vertikal, dimana

nilai *utama* pada posisi teratas/sakral, *madya* pada posisi tengah dan *nista* pada posisi terendah/kotor.

Konsepsi *Tri Angga* berlaku dari yang bersifat makro (alam semesta/*bhuana agung*) sampai yang paling mikro (manusia/*bhuana alit*). Dalam skala wilayah; gunung memiliki nilai *utama*; dataran bernilai *madya* dan lautan pada nilai *nista*. Dalam perumahan, *Kahyangan Tiga (utama)*, Perumahan penduduk (*madya*), Kuburan (*nista*), juga berlaku dalam skala rumah dan manusia.

*Tri Angga* yang memberi arahan tata nilai secara vertikal (secara horisontal ada yang menyebut *Tri Mandala*), juga terdapat tata nilai *Hulu-Teben*, merupakan pedoman tata nilai dalam mencapai tujuan penyelarasan antara *Bhuana agung* dan *Bhuana alit*. *Hulu-Teben* memiliki orientasi antara lain: 1). berdasarkan sumbu bumi yaitu: arah *kaja-kelod* (gunung dan laut), 2). arah tinggi-rendah (*tegeh* dan *lebah*), 3). Berdasarkan sumbu Matahari yaitu; Timur-Barat (Matahari terbit dan terbenam) (Sulistiyawati, 1985:7).

Tata nilai berdasarkan sumbu bumi (*kaja/gunung-kelod/laut*), memberikan nilai *utama* pada arah *kaja* (gunung) dan *nista* pada arah *kelod* (laut), sedangkan berdasarkan sumbu matahari; nilai *utama* pada arah matahari terbit dan *nista* pada arah matahari terbenam. Jika kedua sistem tata nilai ini digabungkan, secara imajiner akan terbentuk pola *Sanga Mandala*, yang membagi ruang menjadi sembilan segmen. (Adhika, 1994:19). Konsep tata ruang *Sanga Mandala* juga lahir dari sembilan manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan harmonis yang disebut *Dewata Nawa Sanga* (Meganada, 1990:58).

Konsepsi tata ruang *Sanga Mandala* menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan dan tata letak bangunan dalam pekarangan rumah, dimana kegiatan yang dianggap utama, memerlukan ketenangan diletakkan pada daerah *utamaning utama (kaja-kangin)*, kegiatan yang dianggap kotor/sibuk diletakkan pada daerah *nistaning nista (klod-kauh)*, sedangkan kegiatan diantaranya diletakkan di tengah

(Sulistiyawati, 1985:10). Dalam turunannya konsep ini menjadi Pola *Natah* (Adhika, 1994:24).

Dalam skala perumahan (*desa*) konsep *Sanga Mandala*, menempatkan kegiatan yang bersifat suci (*Pura Desa*) pada daerah *utamaning utama (kaja-kangin)*, letak *Pura Dalem* dan kuburan pada daerah *nisthaning nista (klod-kauh)*, dan permukiman pada daerah *madya*, ini terutama terlihat pada perumahan yang memiliki pola Perempatan (*Catus Patha*). (Paturusi; 1988:91). Sedangkan Anindya (1991:34) dalam lingkup *desa*, konsep *Tri Mandala*, menempatkan: kegiatan yang bersifat sakral di daerah *utama*, kegiatan yang bersifat keduniawian (sosial, ekonomi dan perumahan) *madya*, dan kegiatan yang dipandang kotor mengandung limbah daerah *nista*. Ini tercermin pada perumahan yang memiliki pola linier. Konsep tata ruang yang lebih bersifat fisik mempunyai berbagai variasi, namun demikian pada dasarnya mempunyai kesamaan sebagai berikut yaitu: 1). Keseimbangan kosmologis (*Tri Hita Karana*), 2). Hirarkhi tata nilai (*Tri Angga*), 3). Orientasi kosmologis (*Sanga Mandala*), 4). Konsep ruang terbuka (*Natah*), 5). Proporsi dan skala, 6).Kronologis dan prosesi pembangunan, 7). Kejujuran struktur (*clarity of structure*), 8). Kejujuran pemakaian material (*truth of material*). (Eko Budihardjo, 1986).

Munculnya variasi dalam pola tata ruang rumah dan perumahan di Bali karena adanya konsep *Tri Pramana*, sebagai landasan taktis operasional yang dikenal dengan *Desa-Kala-Patra* (tempat, waktu dan keadaan) dan *Desa-Mawa-Cara* yang menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada landasan filosofinya, dan ini ditunjukkan oleh keragaman pola desa-desa di Bali. (Meganada: 1990:51).

Perumahan tradisional Bali juga memiliki konteks kehidupan pribadi dan masyarakat serta pantangan-pantangan. Dalam konteks pribadi seperti halnya menentukan dimensi pekarangan dan proporsi bangunan memakai ukuran bagian tubuh penghuni/kepala keluarga, seperti; tangan, kaki dan lainnya.(Meganada: 1990:61). Dasar pengukuran letak

bangunan dalam pekarangan memakai telapak kaki dengan hitungan *Asta Wara (Sri, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma)* ditambah pengurip (Adhika, 1994:25).

Di dalam menentukan atau memilih tata letak pekarangan rumah pun menurut aturan tradisional Bali ada beberapa pantangan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pekarangan rumah tidak boleh bersebelahan langsung ada disebelah Timur atau Utara pura, bila tidak dibatasi dengan lorong atau pekarangan lain seperti: sawah, ladang/sungai. Pantangan itu disebut: *Ngeluanin Pura*.
2. Pekarangan rumah tidak boleh *Numbak Rurung*, atau Tusuk Sate. Artinya jalan lurus langsung bertemu dengan pekarangan rumah.
3. Pekarangan rumah tidak boleh diapit oleh pekarangan/rumah sebuah keluarga lain. Pantangan ini dinamakan: *Karang Kalingkuhan*.
4. Pekarangan rumah tidak boleh dijatuhi oleh cucuran atap dari rumah orang lain. Pantangan ini dinamakan: *Karang Kalebon Amuk*.
5. Pekarangan rumah sebuah keluarga tidak boleh berada sebelah- menyebelah jalan umum dan berpapasan. Pantangan ini dinamakan: *Karang Negen*.
6. Pekarangan rumah yang sudut Barat Dayanya bertemu dengan sudut *Timur Lautnya* pekarangan rumah keluarga itu juga berada sebelah-menyebelah jalan umum, ini tidak boleh. Pantangan ini dinamakan: *Celedu Nginyah*.
7. Dan lain sebagainya.

Perumahan Tradisional Bali yang dilandasi konsepsi seperti; hubungan yang harmonis antara *Bhuana Agung* dengan *Bhuana Alit, Manik Ring Cucupu, Tri Hita Karana, Tri Angga, Hulu-Teben* sampai melahirkan tata nilai *Sanga Mandala* yang memberi arahan tata ruang, baik dalam skala rumah (*umah*) maupun perumahan (*desa*). Hasil dari penurunan konsep tata ruang ini sangat beragam, namun Ardi P. Parimin (1986) menyimpulkan adanya 4 atribut dalam perumahan tradisional Bali, yaitu:

1. Atribut Sosiologi menyangkut sistem kekerabatan masyarakat Bali yang dicirikan dengan adanya sistem *desa adat*, *sistem banjar*, *sistem subak*, *sekeha*, *dadia*, dan *perbekalan*.
2. Atribut Simbolik berkaitan dengan orientasi perumahan, orientasi sumbu utama desa, orientasi rumah dan halamannya.
3. Atribut Morfologi menyangkut komponen yang ada dalam suatu perumahan inti (*core*) dan daerah *periphery* di luar perumahan, yang masing-masing mempunyai fungsi dan arti pada perumahan tradisional Bali.
4. Atribut Fungsional menyangkut fungsi perumahan tradisional Bali pada dasarnya berfungsi keagamaan dan fungsi sosial yang dicirikan dengan adanya 3 pura desa.

Berdasarkan patokan dasar maka akan diidentifikasi aset-aset yang ada pada perumahan tradisional Bali yang meliputi aspek sosial, aspek simbolis, aspek morfologis dan aspek fungsional.

#### 1. Aspek Sosial

Dalam pandangan masyarakat Bali konsep teritorial memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, teritorial sebagai satu kesatuan wilayah tempat para warganya secara bersama-sama melaksanakan upacara-upacara dan berbagai kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama *desa adat*; dan kedua, desa sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama desa dinas atau perbekalan (Depdikbud, 1985). Sistem kemasyarakatan (organisasi) *desa* merupakan pengikat warga yang diatur dengan *awig-awig desa*, kebiasaan dan kepercayaan (Bappeda, 1982:32).

Dalam skala yang lebih kecil sebagai bagian (sub unit) *desa* dikenal *banjar* baik adat maupun dinas. Pengertian *Banjar* kaitannya dengan *desa adat* di Bali adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari *desa adat* serta merupakan persekutuan hidup sosial, dalam keadaan senang maupun susah, berdasarkan persekutuan hidup setempat atau kesatuan wilayah (Agung, 1984: 18-29; Covarrubias, 1986:

39-70). *Banjar* sebagai lembaga tradisional merupakan bagian desa juga memiliki tiga unsur, hanya saja unsur *kahyangan tiga* berupa fasilitas lingkungan berupa *Bale banjar* yang dilengkapi *Pura Banjar*, sebagai tempat pertemuan, kegiatan sosial, upacara dan orientasi warga banjar. (Adhika, 1994:2).

Dari kesatuan wilayah, tidak ada ketentuan satu desa dinas terdiri beberapa *desa adat* atau sebaliknya, tapi menunjukkan variasi. Variasinya cukup beraneka ragam dan kompleks, antara lain: 1). Satu desa dinas terdiri dari satu *desa adat*, 2). Satu desa dinas mencakup beberapa *desa adat*, 3). Satu *desa adat* mencakup beberapa desa dinas, 4). Kombinasi 2 dan 3. Untuk memperoleh pengertian tentang komunitas masyarakat Bali, maka penggambaran tentang ciri-cirinya akan diperinci menurut aspek-aspek sebagai berikut: legitimasi, atribut-atribut dan ciri khusus.

#### a. Legitimasi

Disamping adanya pengakuan formal, maka legitimasi suatu komunitas berkembang pula dikalangan warga menurut persepsinya dengan ciri: 1). Adanya perasaan cinta dan terkait kepada wilayah tersebut, 2). Adanya rasa kepribadian kelompok, 3). Adanya pola hubungan yang bersifat intim dan cenderung bersifat suka rela, 4). Adanya suatu tingkat penghayatan dari sebagian besar lapangan kehidupannya secara bulat.

Beberapa syarat pokok terbentuknya desa adat, yaitu: 1). Adanya wilayah dengan batas-batas tertentu yang disebut dengan *palemahan desa* atau tanah desa, 2). Adanya warga desa yang disebut *pawongan desa*. Sistem kemasyarakatan di Bali mewajibkan kepada orang yang telah *makurenan* (berumah tangga) dan bertempat tinggal di wilayah suatu *desa adat* untuk menjadi *krama banjar* (Anonim, 1983), 3). Adanya *pura* sebagai pusat pemujaan warga desa yang disebut *kahyangan tiga*, 4). Adanya suatu pemerintahan adat yang berlandaskan pada aturan-aturan adat tertentu/*awig-awig desa*. (Bappeda, 1982:31).

b. Atribut Desa Adat

Atribut pokok dari suatu komunitas kecil yang terwujud sebagai *desa adat* di Bali tersimpul dalam konsepsi *Tri Hita Karana* sebagai berikut:

- 1) *Kahyangan Tiga*, yang terdiri dari tiga *pura* sebagai pusat pemujaan warga desa, yaitu *pura puseh*, *Bale Agung* dan *pura dalem*. Untuk satuan *banjar* yang merupakan sub bagian *desa* terdapat fasilitas umum berupa *Bale Banjar* yang dilengkapi *Bale Kulkul* dan *pura banjar*.
- 2) *Pawongan Desa*, yaitu *seluruh* warga desa yang bersangkutan. Sebagai warga inti adakah setiap pasangan suami istri yang telah berkeluarga. Menurut jumlah anggotanya, *banjar* di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *banjar* besar, bila jumlah anggotanya lebih dari 50 *kuren* (kepala keluarga), *banjar* kecil bila anggotanya lebih sedikit dari 50 *kuren*. Besaran yang efektif dalam *desa adat* di Bali adalah sekitar 200 KK setiap *banjar*. Maka bila rata-rata masing-masing KK ada lima orang maka setiap *banjar* (*penyatakan*) terdiri sekitar seribu jiwa. Penelitian Prof. Antonic terhadap desa-desa adat dan dinas di Bali menyimpulkan besaran efektif untuk sebuah desa adalah lima ribu jiwa (Bappeda, 1976:14).
- 3) *Palemahan Desa*, yaitu wilayah desa yang merupakan tempat perumahan warga desa. Perumahan berada pada kedua belah sisi mengikuti pola jalan, *Bale Banjar* sebagai fasilitas sosial umumnya terletak pada posisi yang strategis, seperti pada satu sudut persilangan atau pertigaan jalan di tengah-tengah lingkungan *bajar* (Putra, 1988).

Di samping atribut pokok tersebut, masih perlu dikemukakan beberapa fasilitas dan pelayanan desa yang menjadi simbol suatu komunitas masyarakat Bali yang terwujud sebagai *Desa adat*, yaitu: 1). Balai Pertemuan (*Banjar*) tempat terselenggaranya rapat-rapat

desa, 2). Kuburan desa yang biasanya terletak berdekatan dengan *pura dalem*, 3). *Perempatan Desa* merupakan tempat yang dianggap keramat dan juga sebagai tempat upacara, 4). Tata susunan perumahan yang mengikuti konsep *Tri Mandala*, yaitu: *Utama*, *Madya*, dan *Nista*. *Desa adat* sebagai suatu komunitas dengan fokus fungsinya dibidang adat dan agama, seperti; upacara *Odalan*, *Galungan*, *Nyepi (Tawur Kesanga)*, sedangkan dalam skala banjar adat, seperti; pemeliharaan pura, upacara perkawinan, kematian dan membangun rumah. Dalam menjalankan fungsinya itu, tiap-tiap *desa adat* mempunyai kedudukan yang otonom, dalam arti tiap *desa adat* berdiri sendiri menuruti aturan-aturan (*awig-awig desa*). Bidang pemerintahan berada di tangan urusan desa dinas, menangani fungsi, antara lain: administrasi pemerintahan, pembangunan desa, upacara nasional serta keamanan desa. Dalam hal kedinasan itu, desa dinas membawahi sejumlah banjar dinas.

## 2. Aspek Simbolik

Aspek simbolik pada perumahan adalah berkenaan dengan orientasi kosmologis. Kegiatan masyarakat Bali pada umumnya dapat dibagi atas dua kegiatan, yaitu: kegiatan yang bersifat sakral (berkaitan dengan kegiatan keagamaan), dan kegiatan yang bersifat profan (berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat). Penempatan kegiatan tersebut dibedakan berdasarkan orientasi kesakralannya.

Elemen-elemen ruang yang dijadikan indikator kesakralan perumahan adalah: 1) Sumbu perumahan berupa jalan utama (*arah kaja- kelod*) atau ruang utama pada perumahan, 2) Lokasi *pura puseh* (pura leluhur), 3) Lokasi *pura dalem* (pura kematian), dan 4) *Bale Banjar*.

Orientasi arah sakral pada tingkat perumahan dapat mengarah:

- a. Ke arah gunung atau tempat yang tinggi dimana arwah leluhur bersemayam.

- b. Sumbu jalan (*kaja-kelod*) yang menuju ke dunia leluhur yang bersemayam di gunung (*kaja*).
- c. Mengarah ke elemen-elemen alam lainnya.
- d. Arah *kaja kangin* yaitu arah ke gunung Agung.

*Sanga Mandala* yang dilandasi konsep *Nawa Sanga* adalah konsep tradisional yang didasarkan pada orientasi kosmologis masyarakat Bali sebagai pengejawantahan cara menuju ke kehidupan harmonis (Budihardjo, 1968). *Nawa sanga* menunjuk ke arah delapan penjuru angin ditambah titik pusat di tengah. Dari kesembilan orientasi ini yang paling dominan adalah orientasi dengan gunung-laut dan sumbu terbit-terbenamnya matahari. Daerah yang paling sakral selalu ditempatkan pada arah gunung (*kaja-kangin*), sedang daerah yang sifatnya profan ditempatkan pada arah yang menuju ke laut (*kelod-kauh*).

Berdasarkan urutan-urutan tingkat kesakralan, dari paling sakral ke paling profan elemen bangunan rumah diurutkan sebagai berikut: *Sanggah* (pura rumah tangga), *pengijeng*, *Bale adat bale gede*, *meten*, *bale* (ruang serba guna), *pawon* (dapur), *jineng* (lambung), *kandang ternak*, *teben* (halaman belakang) (Parimin, 1968).

### 3. Aspek Morpologis

Kegiatan dalam perumahan tradisional dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) peruntukan, yaitu: peruntukan inti, peruntukan terbangun, dan peruntukan pinggiran.

Peruntukan inti pada perumahan yang berpola linear terletak pada sumbu jalan menyatu dengan peruntukan terbangun, atau pada jalan utama yang menuju ke *pura desa*. Pada perumahan yang berpola perempatan (*Catur patha*) peruntukan inti berada pada persimpangan jalan tersebut. Peruntukan inti umumnya bangunan yang memiliki fungsi sosial, seperti; *Jineng* (lambung desa), *Bale banjar* dan *Wantilan* (Parimin, 1968:91).

Peruntukan terbangun adalah merupakan wilayah lama, berupa bangunan perumahan yang dibangun pada awal terbentuknya rumah tersebut, biasanya berada disekitar peruntukan inti. Peruntukan pinggiran adalah wilayah yang terletak di luar wilayah terbangun, tetapi masih dibawah kontrol desa adat. Beberapa *desa adat* peruntukan pinggiran terletak *pura desa/dalem*.

#### 4. Aspek Fungsional

Aspek fungsional adalah fungsi elemen ruang dalam kaitannya dengan orientasi kosmologis, yang tercermin pada komposisi dan formasi ruang. Dari konsep *Sanga Mandala* yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam kosep fisik, baik dalam skala rumah dan perumahan. Pada skala rumah, tiap segmen peruntukan didasarkan atas tingkat sakral dan profan. Elemen ruang yang paling sakral seperti *Merajan* (*pura* rumah tangga) ditempatkan pada segmen sakral (*utama*), yaitu *kaja-kangin*. *Meten* (tempat tidur), dan tempat bekerja ditempatkan pada segmen *madya*, kandang ternak atau kotoran ditempatkan pada segmen *nista*. Dalam skala permukiman, penerapan konsep *Sanga Mandala*, ada 3 macam pola tata ruang, yaitu:

##### a. Pola Perempatan (*Catus Patha*)

Pola Perempatan, jalan terbentuk dari perpotongan sumbu *kaja - kelod* (utara-selatan) dengan sumbu *kangin-kauh* (timur-barat). Berdasarkan konsep *Sanga Mandala*, pada daerah *kaja-kangin* diperuntukan untuk bangunan suci yaitu *pura desa*. Letak *Pura Dalem* (kematian) dan kuburan desa pada daerah *kelod-kauh* (barat daya) yang mengarah ke laut. Peruntukan perumahan dan *Banjar* berada pada peruntukan *madya* (barat-laut).

##### b. Pola Linear

Pada pola linear konsep *Sanga Mandala* tidak begitu berperan. Orientasi kosmologis lebih didominasi oleh sumbu *kaja-kelod* (utara-selatan) dan sumbu *kangin-*

*kauh* (timur-barat). Pada bagian ujung Utara perumahan (*kaja*) diperuntukkan untuk *Pura* (*pura bale agung* dan *pura puseh*). Sedang di ujung selatan (*kelod*) diperuntukkan untuk *Pura Dalem* (kematian) dan kuburan desa. Diantara kedua daerah tersebut terletak perumahan penduduk dan fasilitas umum (*bale banjar* dan pasar) yang terletak di plaza umum. Pola linear pada umumnya terdapat pada perumahan di daerah pegunungan di Bali, dimana untuk mengatasi geografis yang berlereng diatasi dengan terasering.

c. Pola Kombinasi

Pola kombinasi merupakan paduan antara pola perempatan (*Catus patha*) dengan pola linear. Pola sumbu perumahan memakai pola perempatan, namun demikian sistem peletakan elemen bangunan mengikuti pola linear. Peruntukan pada fasilitas umum terletak pada ruang terbuka (*plaza*) yang ada di tengah-tengah perumahan. Lokasi bagian sakral dan profan masing-masing terletak pada ujung utara dan selatan perumahan.

Keinginan memiliki rumah tradisional dengan berbagai fungsi dan makna tersebut semakin melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya suatu hal yang wajar. Sikap fatalisme itu kemudian dipercepat lagi adanya hegemoni budaya kapitalisme yaitu gaya hidup yang serba mewah. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan I Wayan Panggih, penduduk Kelurahan Pedungan sebagai berikut:

Disini ada petani yang menjual tiga hektar sawah, hasil penjualannya untuk membeli rumah, mobil, motor, dan barang-barang konsumtif lainnya. Ironisnya barang-barang itu terjual kembali, untuk sekedar memenuhi kehidupan hidup, karena sawah yang tadinya sebagai pegangan hidup sudah terjual. Sekarang sepeda ontel aja nggak punya, (hasil wawancara dengan I Wayan Panggih, penduduk Kelurahan Pedungan, pada tanggal 3 Desember 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa pengaruh globalisasi teknologi memang tragis, seseorang yang terjebak dalam globalisasi teknologi seperti kecanduan heroin, yaitu apapun siap dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Individu tersebut tidak sadar akan dirinya yang telah hancur, atau menghancurkan diri sendiri. Pengaruh globalisasi juga menyerang pasar penjualan tanah, seperti terungkap dalam wawancara dengan I Komang Sanjaya, penduduk Kelurahan Sesetan berikut.

“Ada juga petani yang menjual tanah 24 are seharga 120 juta, setelah itu menyesal dia menjual tanahnya, petani tersebut balik mau membeli lagi dengan harga 450 juta dan hanya mendapat 3 are (hasil wawancara dengan I Komang Sanjaya, penduduk Kelurahan Sesetan pada tanggal 29 November 2015).

Dari fakta di atas, O'Donnell (2003:22) mengemukakan bahwa materialisme dan konsumerisme merusak lingkungan dan menguras semangat dan nilai masyarakat. Dalam hal ini sudah terjadi pemiskinan yang terstruktur dengan adanya konstruksi dari kaum kapital dalam cara-cara menghegemoni masyarakat petani dengan materi berupa uang dan janji keasyikan akan kemajuan dunia modern dengan memperoleh lahan persawahan serta memanfaatkan ketidaktahuan petani (kebodohan petani). Artinya, kaum kapital dengan mudahnya memperoleh lahan pertaniannya sehingga muncul proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Terkait dengan kemiskinan terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) *Kemiskinan natural*, (2) *Kemiskinan kultural*, dan (3) *Kemiskinan struktural* (Kartasmita, 1996: 235; Sumodiningrat, 1998: 67).

1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat

imbangan pendapatan yang rendah. Menurut Sumodiningrat (1998: 67-68) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

2. Kemiskinan kuktural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Mubyarto (2004: 63) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Mubyarto, 2004: 64-65). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (1996: 236) hal ini disebut "*accidental*

*poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, pemiskinan masyarakat yang terjadi adalah pemiskinan kultural dan pemiskinan struktural. Pemiskinan kultural terjadi karena adanya perubahan gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya akibat dari adanya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan sebagaimana diterangkan sebelumnya. Sedangkan pemiskinan struktural terjadi karena kebijakan pemerintah yang justru ikut mendorong terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa kejadian ini dipicu adanya kebutuhan hunian, yang dikomersialkan pengembang atau kaum kapital dengan memanfaatkan jasa atau restu dari oknum pemerintah. Faktor-faktor lain yang mendorong antara lain kebutuhan lahan, adanya program permukiman penduduk, modernisasi zaman, dan gaya hidup. Selanjutnya I Wayan Panggih mengungkapkan seperti di bawah ini.

Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sesuai dengan tuntutan zaman, maka banyak sawah di kelurahan ini dijual, lebih-lebih petani tergiur dengan harga tanah yang begitu melambung tinggi, tanpa menyadari bahwa dengan menjual sawahnya berarti petani juga kehilangan penghidupannya (hasil wawancara dengan I Wayan Panggih, penduduk Kelurahan Pedungan, pada tanggal 3 Desember 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa fatalisme yang dialami petani adalah fatalisme yang diakibatkan oleh gaya hidup. Gaya hidup di sini sebagai sarana yang digunakan kaum kapitalisme yang berwujud hegemoni teknologi dan hegemoni harga sawah yang selangit. Petani disuguhi kehidupan-kehidupan yang instan dan citra keasyikan dunia

modern saat ini (Barker, 2009:143). Ketika petani telah masuk perangkap hegemoni kapitalis, maka secara tidak langsung petani akan menerima apa yang dihegemonikan tersebut seperti teknologi dan harga tanah yang tinggi. Ketika ingin memiliki teknologi berupa kendaraan, rumah, dan teknologi lainnya petani harus memperolehnya dengan uang. Petani tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi segala keinginannya. Sehubungan dengan itu, modal tanah sawahnyalah yang bisa menjadi uang.

Di tengah kebimbangan dan keinginan kuat untuk memiliki gaya hidup itu, petani ditawarkan dengan hegemoni harga tanah yang sepiantas dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, petani merelakan tanahnya diambil oleh pemilik modal lewat transaksi keuangan dan tanpa ada perlawanan. Sikap petani seperti ini dapat dikatakan sebagai sikap fatalisme terhadap keadaan akibat dari modernisasi zaman yang menjanjikan keasyikan dunia. Fatalisme juga terjadi lewat hegemoni pemilik modal dalam menjanjikan pekerjaan yang layak apabila petani mau meninggalkan lahan sawahnya, yang diakibatkan proses alih fungsi lahan. Hal ini terungkap pada wawancara dengan I Nyoman Sukerta, penduduk Kelurahan Sesetan berikut ini.

Para pemilik modal datang ke warga dan menawarkan harga yang tinggi dengan janji-janji akan mempekerjakan warga di sini untuk proyek-proyek mereka. Kalau ada warga yang tidak mau, biasanya akan di datangi oleh oknum pemerintah untuk merayu warga tersebut dan kadang-kadang dengan intimidasi juga, meskipun dilakukan secara halus (hasil wawancara dengan I Nyoman Sukerta, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa hegemoni para pemilik modal terhadap petani terjadi melalui pembelian tanah sawah dengan harga tinggi membuat warga rela menjualnya. Akibat dari terjadinya proses peralihan hak atas tanah dengan otomatis petani kehilangan pekerjaan, sehingga harus berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Lebih dari itu

pemilihan pekerjaan lain oleh petani karena pada awal proses transaksi perpindahan hak kepemilikan tanah, petani dijanjikan pekerjaan oleh investor atau pengembang. Namun, pada kenyataannya itu tidak terjadi. Secara hukum petani tidak lagi memiliki hak atas tanahnya akibat proses jual beli sudah terjadi. Di sini petani tidak dapat berbuat apa-apa sehingga hanya bisa meratapi nasibnya akibat terjebak pada hegemoni investor dan ketidaktahuannya. Apabila dalam proses penawaran ataupun proses alih fungsi lahan ada warga atau petani tidak setuju untuk menjual tanahnya, maka biasanya investor memanfaatkan pihak penguasa lewat kesepakatan-kesepakatan yang terselubung kepentingan bersama untuk menekan masyarakat petani Kecamatan Denpasar Selatan agar mau menjual tanahnya. Dalam hal ini penguasa atau pihak pemerintah menghegemoni petani lewat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro petani, yang pada akhirnya petani termarginalkan dan menerima nasibnya atau lebih dikenal dengan sikap fatalisme atau fatalistik.

Di sisi lain gaya hidup pragmatisme juga semakin mempercepat proses alih fungsi lahan. Tindakan fatalisme di atas tidak bisa dilepaskan dari sikap kegamangan mereka melihat situasi yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya mereka terjebak pada gaya hidup pragmatis. Sikap pragmatisme petani yang memilih mudah dan cepat, tetapi tidak menghitung secara cermat ketika menjual sawahnya untuk memenuhi keinginannya. Termasuk keinginannya untuk terlihat sudah mapan secara ekonomi dan terlihat kaya didepan orang lain mendorongnya melakukan tindakan yang tidak rasional dengan menjual tanahnya kepada pemilik modal. Petani lebih mengutamakan pencitraan dan mengejar kepuasan nafsu dan gaya hidup hedonis. Hedonisme itu sendiri adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Bagi para penganut paham ini, bersenang-senang, pesta-pora, dan pelesiran merupakan tujuan utama hidup, entah itu menyenangkan bagi orang lain atau tidak. Karena mereka beranggapan hidup ini hanya sekali,

sehingga mereka merasa ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Di dalam lingkungan penganut paham ini, hidup dijalani dengan sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Hedonisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup, atau hedonisme adalah paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata (Sarwono, 1989: 15).

Untuk pengertian pola hidup yang hedonisme itu sendiri yaitu, cara hidup seseorang atau masyarakat dalam menghabiskan waktu untuk aktifitas dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan menghindari perasaan-perasaan yang bersifat menyakitkan. Hedonisme itu sendiri akan melahirkan paham baru dalam komunitas atau masyarakat seperti paham pragmatisme, konsumerialisme, dan materialistik.

Paradigma masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan sedikit banyak telah menganut paham hedonisme. Perubahannya ditenggarai oleh meningkatnya sikap materialis, konsumtif, pragmatis, dan penyimpangan moral masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan. Sikap matrealistis memunculkan masyarakat memiliki paham serba materi, sikap konsumtif melahirkan masyarakat untuk ketergantungan terhadap kebutuhan-kebutuhan bukan primer, sikap pragmatis melahirkan masyarakat bermental instant pada masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.

Untuk memahami masyarakat serta memahami seberapa besar belunggu yang mengikat masyarakat tentang pola hidup hedonisme, sebelumnya perlu di ketahui tentang kegiatan keseharian yang dilakukan masyarakat atau yang dinamakan dengan pola hidup. Dengan pendekatan persuasif terhadap subyek kaum muda dan masyarakat kalangan umum Kecamatan Denpasar Selatan dan pendekatan yang semi terstruktur diperoleh sebuah rekapan tentang keseharian pemuda dan orang tua berprofesi sebagai petani secara umum dalam hidup bermasyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan.

Dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa cara hidup masyarakat atau orang tua yang berprofesi sebagai petani di Kecamatan Denpasar Selatan mulai jam 6 pagi hingga jam 11.00 diisi dengan kegiatan bekerja di ladang dan kadang dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 hingga 16.00. Setelah pukul 18.00 atau 19.00 kegiatan para orang tua Kecamatan Denpasar Selatan yaitu berkumpul keluarga, *ngopi*, main ke tetangga, ke banjar, atau nonton televisi.

Sedangkan untuk masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang berusia muda lebih besar *nganggur* dari pada diisi dengan hal-hal positif. Dari sini nampak kehidupan pemuda di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kesehariannya jika ditotal dalam satu hari, waktu untuk bekerja/membantu orang tua/hal-hal positif hanya berkisar 6 jam, dimulai jam 07.00-13.00, selebihnya itu berisikan kegiatan-kegiatan seperti bermain dengan teman, *ngopi*, jalan-jalan, dan kegiatan foya-foya lainnya. Bentuk Hedonisme yang muncul pada masyarakat ini hanya sebagai bentuk pengamatan secara umum pada pola hidup di Kecamatan Denpasar Selatan.

Dari bentuk hedonisme dari masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan, sekilas masyarakat tampak terperangkap dan terbelenggu oleh sikap-sikap yang merujuk pada pola hidup yang hedonis. Masyarakat memandang banyak aspek dari segi materi, masyarakat lebih condong konsumtif dari pada produktif, masyarakat lebih mencari jalan instan dari pada harus berjuang sesuai alur yang benar, masyarakat memiliki ketergantungan atau perubahan kebutuhan dari sekunder/penyokong menjadi kebutuhan primer/utama, dan munculnya penyimpangan-penyimpangan moral yang semakin dianggap wajar oleh masyarakat. Bentuk hedonisme yang muncul di Kecamatan Denpasar Selatan akan dijelaskan sebagai mana berikut.

#### 1. Materialistis

Sikap materialistis adalah cara merespon suatu bentuk tindakan maupun pikiran dengan menggunakan substansi materi, benda atau nilai dari sesuatu tersebut.

Materi biasanya dimaksud dengan nilai dari suatu barang tersebut, atau uang. Dalam hidup bermasyarakat di era modernisasi ini, segala sesuatu dipandang berharga apabila memiliki materi yang bernilai. Seperti masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang mana uang telah menjadi segalanya. Tanpa uang mereka merasa tersinggikan dan tidak dihargai.

Hal itu terungkap dalam wawancara dengan I Made Sasangka, penduduk Kelurahan Sesetan sebagai berikut :

Pak anu, itu hidup serba berkecukupan, banyak uang, punya sawah dan ladang luas, punya motor, mobil dan barang-barang mewah lain. Uang pun banyak, hidup kalau tidak ada uang itu susah, mau ngapa-ngapain tidak bisa. Memang uang itu bukan hal yang utama, tapi hidup itu butuh uang (hasil wawancara dengan I Made Sasangka, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 13 Desember 2015).

Memang dalam hidup bermasyarakat tolak ukur kesejahteraan adalah dari segi materi, bagi orang yang memiliki materi banyak dianggap lebih sejahtera dan lebih dimulyakan hidupnya, namun semua itu tidak pernah lepas dari usaha yang keras. Namun banyak masyarakat hanya memandang proses berusaha dari segi kenikmatannya saja tidak melihat sisi kesakitannya. Hal inilah yang menjadi sikap materialistis yang condong ke arah hedonisme. Masyarakat memandang faktor keberuntungan dan nasib sebagai penyebab perbedaan keberhasilan tidak pada usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil itu.

Sikap masyarakat yang tidak melihat proses dan cenderung materialistis juga menjadi pendorong atau penyebab masyarakat beralih dari profesi bertani, maka dari itu banyak masyarakat petani yang saat ini rela menjual sawahnya dan bekerja pada sektor lainnya demi mengejar nilai materi. Seperti pembahasan sebelumnya tentang perubahan mentalitas agraris menjadi mentalitas buruh. Sikap materialistis ini juga menjadi salah satu alasan masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan dan memiliki

andil yang besar terhadap terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

## 2. Konsumtif

Cara hidup yang konsumtif adalah cara individu atau masyarakat menjalankan aktifitasnya atau kegiatannya ditinjau dari segi sisi konsumsi. Hal ini juga termasuk sikap ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan sekunder atau tersier, namun dianggap seperti kebutuhan primer oleh masyarakat.

Cara penulis memandang pola hidup konsumtif masyarakat ditinjau dari segi kebutuhan sampingan masyarakat, seperti kebutuhan sepeda motor atau *handphone* dan pulsa. Sepeda motor sudah bukan lagi kebutuhan orang-orang borjuis. Sarana ini sudah menjadi kebutuhan yang seakan-akan harus dimiliki masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan. Sepeda motor yang sejatinya hanya sebagai alat transportasi, saat ini dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan telah mengalami perubahan gaya hidup ke arah konsumtif sebagai contoh dari cara masyarakat memenuhi kebutuhan sepeda motor. Terutama pemuda yang menganggap tanpa sepeda motor hidup serasa hambar, sebagaimana diungkapkan oleh I Komang Pasek sebagai berikut:

Tidak punya sepeda motor tidak enak pak, nanti kalo mau keluar rumah dengan teman-teman gimana? Nanti kalo teman-teman mencari saya gimana? Kalo tidak punya sepeda motor rasanya ada yang kurang, kemana-mana jadi serba tanggung bila tidak punya sepeda motor dan langkah kaki juga kurang bebas. Kan jadinya susah (hasil wawancara dengan I Komang Pasek, penduduk Kelurahan Pedungan, pada tanggal 28 Desember 2015).

Di Kecamatan Denpasar Selatan sekarang ini tiap orang bahkan remaja belasan tahun sepertinya merasa wajib memiliki sepeda motor. Hal ini tentu juga memicu meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Adanya

sepeda motor tentu saja membutuhkan bensin. Jika dihitung-hitung biaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bensin dan lain sebagainya, sangat memicu meningkatnya konsumsi masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sangat bergantung terhadap faktor eksternal. Seperti halnya kebutuhan pemuda dalam gaya hidup, sepeda motor dan gadget sudah menjadi kebutuhan primer pemuda, seakan-akan tidak ada gadget tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk memenuhi kebutuhan pulsa untuk telepon, untuk internet hingga untuk pesan singkat, pemuda membutuhkan itu semua. Pengaruh eksternal ini lah yang paling dominan dalam mempengaruhi pemuda sehingga pola pikir pemuda menjadi konsumtif.

Nilai dari pemenuhan kebutuhan bensin dan pulsa masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan ini sedikit banyak telah memberikan bukti bahwa tingkat konsumsi masyarakat mengalami perubahan dan masyarakat telah terbelenggu oleh gaya hidup konsumtif, sehingga hal ini seolah-olah tidak pernah menjadi problem dalam masyarakat. Oleh masyarakat itu dianggap suatu hal yang wajar tanpa ada daya kritis, mereka menerima semuanya begitu saja sebagai sebuah keharusan pada jaman modern. Ini membuktikan fatalisme petani atau masyarakat umum juga terjadi berkaitan dengan penerimaan teknologi untuk mengontrol mereka.

### 3. Pragmatis

Mental pragmatis adalah cara menanggapi atau menyikapi permasalahan dengan cara instan namun mengesampingkan aspek lain seperti agama, budaya, dan norma. Sikap pragmatis masyarakat dan pemuda yang masih menyelimuti kabut dalam diri mereka seakan-akan tidak berdaya dengan aset lahan sawah yang mereka miliki. Masyarakat petani Kecamatan Denpasar Selatan lebih memilih untuk menjual sawahnya dan bekerja di sektor lain.

Mereka merasa tidak mampu mengembangkan perekonomian mereka jika hidup dengan bertani. Pemuda merasa tidak memiliki peluang perekonomian dengan hidup sebagai petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Menurut penuturan I Wayan Suaga, penduduk Kelurahan Pedungan sebagai berikut:

Untuk jadi petani, enggak lah. Pertanian sudah dikerjakan orang tua, masak yang muda harus jadi buruh tanam tani dan buruh tebas tani juga. Kerja apaan itu, tidak menghasilkan uang banyak (hasil wawancara dengan I Wayan Suaga, penduduk Kelurahan Pedungan, pada tanggal 28 Desember 2015).

Mental pragmatis yang muncul dalam masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan adalah mental-mental di mana masyarakat mencari solusi dari problem yang dihadapi dengan cara instan tanpa memperhitungkan aspek keberlanjutan, seperti misalnya terjadinya alih fungsi lahan yang membuat petani dan keluarganya menjual sawahnya dan tidak mau lagi menjadi petani sebagai bukti bahwasanya perubahan masyarakat dan pemuda menjadi lebih bermental instan tanpa mengedepankan aspek keberlanjutan atau keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera.

## **BAB IV.**

### **IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN PADA KEHIDUPAN PETANI DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

Bab ini membahas mengenai implikasi alih fungsi lahan persawahan pada kehidupan petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang meliputi implikasi terhadap infrastruktur, struktur sosial dan suprastruktur. Pembahasan dimulai dari kondisi infrastruktur di Kecamatan Denpasar Selatan setelah terjadinya alih fungsi persawahan. Dari kondisi infrastruktur yang tentunya semakin berkembang dan lebih banyak menawarkan potensi-potensi pekerjaan selain bertani, selanjutnya akan dibahas implikasinya terhadap struktur sosial dan suprastruktur. Secara umum pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

#### **A. Implikasi terhadap Infrastruktur**

Menurut Sanderson (2011: 60) infrastruktur berisi bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang berkaitan dengan upaya manusia mempertahankan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Infrastruktur sebuah masyarakat adalah komponen yang paling dasar dalam pengertian bahwa tanpa itu, maka dia tidak akan mungkin bertahan secara fisik. Infrastruktur itu sendiri terdiri dari empat sub unit dasar yaitu teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi, yang akan dibahas sebagai berikut :

##### **1. Teknologi**

Teknologi terdiri dari informasi, peralatan, teknik yang dengannya manusia beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Ia tidak hanya berisi peralatan atau obyek yang bersifat fisik atau kongkrit, tetapi juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan manusia dengan cara tertentu. Dengan demikian, kursi, bantal dan mobil adalah unsur-unsur teknologi, tetapi pengetahuan tentang bagaimana

menjinakkan dan memelihara tanaman dan binatang liar juga termasuk teknologi (Sanderson, 2011: 60).

Tak dapat dipungkiri kemajuan teknologi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatatan. Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang tadinya petani sederhana berubah kehidupannya karena kemajuan teknologi memasuki kehidupannya. Petani yang tadinya tidak mengenal sepeda motor, menjadi ingin sepeda motor. Petani yang tadinya tidak mengenal *handphone*, berubah menjadi menginginkan *handphone* dan yang sudah memiliki *handphone* menginginkan *handphone* yang lebih canggih lagi. Demikian juga petani yang sudah punya mobil, menghendaki mobil yang lebih baru dengan teknologi *automatic* dan teknologi-teknologi lainnya yang lebih maju.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam mengikuti teknologi tersebut, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Jalan pintas untuk mendapatkan uang tersebut salah satunya dengan menjual sawahnya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Gede Puruhita, penduduk Desa Pemogan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Tadinya saya mempunyai Honda Supra. Anak saya kepingin punya motor Kawasaki Ninja 4 Tax, motor yang besar, seperti yang dimiliki teman-temannya. Tadinya saya nggak mau membelikan, karena memang tidak memiliki uang. Tapi sebagai orang tua saya kasian dengan anak saya, ya, mau nggak mau saya terpaksa menjual tanah untuk memenuhi keinginan anak saya tadi. (Hasil wawancara dengan I Gede Puruhita, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hampir senada dengan hasil wawancara di atas, I Wayan Sugeh, penduduk Kelurahan Sesetan mengatakan :

Saya sudah lama sekali menggunakan HP Nokia N-70. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, HP tersebut menjadi ketinggalan jaman dan kurang

bisa membantu saya untuk memasarkan hasil pertanian saya. Saya memang membutuhkan HP yang bisa internet, yang bisa menghubungkan saya dengan dunia luar, tidak sebatas di Kecamatan Denpasar Selatan saja. Saya juga perlu ganti mobil, yang *matic*, supaya saya nggak capek kalau harus keluar kota dalam rangka bisnis saya di bidang pertanian. Saya terpaksa menjual sebagian sawah saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (hasil wawancara dengan I Wayan Sugeh, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015)

Kemajuan teknologi yang mendorong kebutuhan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan menjadi tergantung dengan teknologi. Buktinya hingga saat ini tidak ada satupun masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan orang-orang tua yang tidak bergantung pada *handphone* ataupun *gadget*. Kebutuhan akan alat komunikasi ini telah mendorong tumbuhnya bisnis-bisnis *handphone*, kios-kios jual beli *handphone*, pusat penjualan *accessories handphone*, pusat-pusat penjualan *simcard*, *kuota*, dan sebagainya.

Kebutuhan teknologi yang salah satunya dicontohkan dengan kebutuhan *handphone* tersebut, juga terjadi pada bidang lain seperti kebutuhan akan sepeda motor telah memunculkan banyak *showroom* sepeda motor, kebutuhan akan mobil memunculkan banyak *showroom* mobil, kebutuhan akan tempat-tempat belanja modern memunculkan pusat-pusat perbelanjaan seperti *Hardy's*, *Indomart*, *Alfamart*, *K-Mart*, *Seven Eleven*, dan sebagainya serta tempat-tempat yang dapat memenuhi kebutuhan yang serba instan seperti *laundry*, *cafe-cafe*, dan masih banyak lagi yang berkembang subur di Kecamatan Denpasar Selatan.

Adanya kebutuhan-kebutuhan dalam mengikuti perkembangan teknologi di Kecamatan Denpasar Selatan tersebut, telah mengundang ketertarikan para investor untuk berinvestasi di Kecamatan Denpasar Selatan. Kedatangan investor ini tentunya membutuhkan lahan baik

untuk berusaha maupun untuk bertempat tinggal. Disini terjadi titik pertemuan antara petani yang siap menjual sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengikuti perkembangan teknologi dengan investor yang membutuhkan lahan untuk berusaha di Kecamatan Denpasar Selatan, sehingga terjadilah alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kemajuan dan perkembangan teknologi telah membuka Kecamatan Denpasar Selatan sebagai daerah tujuan investor untuk mengembangkan usahanya. Peningkatan infrastruktur bersamaan dengan realisasi pembangunan fisik di Kecamatan Denpasar Selatan, mengkondisikan masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat. Pada masa awalnya sawah-sawah di Kecamatan Denpasar Selatan yang sarat dengan upacara adat dan fasilitas kegiatan adat, yang harus menerima fungsi baru sebagai akses atau infrastruktur kawasan bisnis. Perbaikan wajah dan fisik Kecamatan Denpasar Selatan menjadi penanda perubahan cepat yang kurang dari hitungan dekade atau sewindu, kemudian perubahan mendasar pun mempengaruhi tataruang perumahan, banjar atau lingkungan dan desa adat.

## 2. Ekonomi

Ekonomi suatu masyarakat adalah sistem yang teratur dimana barang dan jasa dihasilkan, didistribusikan, dan dipertukarkan di antara para individu dan masyarakat. *Produksi* merujuk kepada berbagai hal, seperti barang apa yang diproduksi, oleh siapa, alat dan teknik apa yang digunakan. dan siapa yang memiliki bahan-bahan dasar yang masuk ke dalam proses produksi. Distribusi meliputi cara barang-barang yang telah diproduksi itu dialokasikan ke berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat. Pertukaran dilakukan apabila para individu atau kelompok menyerahkan sesuatu yang berharga kepada orang lain sebagai ganti barang berharga lain yang dia peroleh darinya.

Cara sebuah masyarakat mendistribusikan barang dan jasa umumnya tergantung kepada cara barang dan jasa tersebut diproduksi (Sanderson, 2011: 60).

Alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan telah memunculkan kawasan-kawasan bisnis. Kemunculan kawasan-kawasan bisnis ini telah menggeser cara masyarakat mencari nafkah yang dulunya berorientasi pada pertanian menjadi berorientasi pada bisnis dan perdagangan

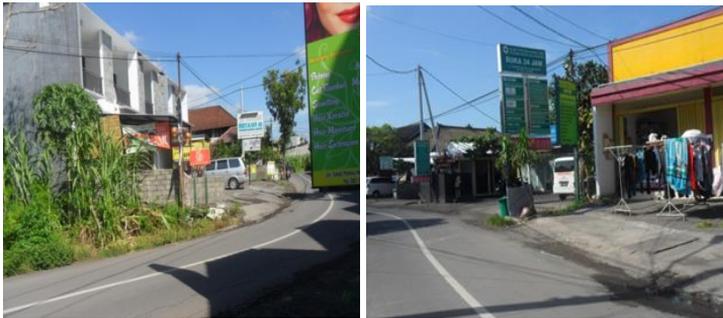
Kondisi ini terungkap dari hasil wawancara dengan Ketut Maduartha, mantan Bendesa Adat sebagai berikut :

Setelah Kecamatan Denpasar Selatan berkembang pesat akibat alih fungsi lahan persawahan, kini banyak bermunculan pusat-pusat bisnis, koperasi-koperasi, bank-bank ataupun berbagai bentuk usaha lainnya. Hal itu telah menggeser cara masyarakat untuk mencari nafkah. Yang dulunya petani, sekarang menjadi karyawan, menjadi pembisnis atau yang lainnya. Sebagian ada yang sukses, tapi sebagian yang lainnya ada yang gagal. Bagi yang sukses akan semakin kaya, sebaliknya bagi yang gagal akan semakin miskin. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak dapat dihindari (Hasil wawancara dengan Ketut Maduartha, pada tanggal 18 Januari 2016).

Hal yang sama juga disampaikan Gede Winata sebagai berikut:

Memang peluang kerja sekarang banyak tersedia di Kecamatan Denpasar Selatan. Tapi peluang kerja itu hanya yang mempunyai keterampilan dan *skill* saja. Untuk yang tidak mempunyai *skill* ya tetap diam di tempat. Jadi, ada kesimpulan untuk mengakses sumber-sumber nafkah. Akhirnya terjadilah kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin (Hasil wawancara dengan Gede Winata, pada tanggal 18 Januari 2016).

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pergeseran masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang berorientasi pada pekerjaan non-agraris, didorong tumbuhnya lembaga-lembaga bisnis di sekitar mereka seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi-fungsi komersial. Contoh nyata yang masih bisa dijumpai sampai sekarang, di sekitar sebelah timur kuburan Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, sawah-sawah di daerah tersebut semakin menyempit, beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan, ruko-ruko, dan fungsi bisnis lainnya. Namun sayangnya hanya masyarakat yang memiliki *skill* saja yang dapat mengakses sumber-sumber nafkah yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi bisnis tersebut. Sedangkan yang hanya memiliki *skill* pertanian saja akan terpinggirkan. Kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin menjadi semakin melebar. Hal yang paling ditakutkan adalah musnahnya sistem nafkah asli pedesaan yaitu sistem nafkah dengan bertani.



**Gambar 4.1** Alih Fungsi Lahan menjadi Infrastruktur yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Hidup Kekinian pada Era Modern  
Sumber: Wiratha, 2016

Gambar di atas menunjukkan kenampakan wilayah Kecamatan Denpasar Selatan saat ini sudah tidak lagi seperti awalnya yang merupakan hamparan sawah

produktif. Saat ini sebagian besar sudah tergantikan oleh adanya pemukiman-pemukian penduduk dan pusat-pusat bisnis. Kondisi demikian memberikan implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat dari ideologi, hubungan sosial termasuk masalah infrastruktur, dan ekologi.

Pembangunan perumahan bahkan pertokoan tersebut membuat jumlah petani di Kecamatan Denpasar khususnya di Desa Pemogan, Pedungan dan Sesetan semakin berkurang dan tenggelam begitu saja. Marginalisasi petani yang terjadi ini diakibatkan oleh dialihfungsikannya lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian. Regenerasi petani tidak terjadi bukan hanya karena profesi petani tidak menjanjikan, melainkan juga karena lahan pertanian itu sendiri sudah menyempit. Bahkan, sebentar lagi mungkin hilang sehingga dapat dikatakan bahwa bukannya kaum anak muda tidak mau menjadi petani, melainkan lahan pertanian itu sudah tidak ada lagi untuk digarap.

Alih fungsi lahan ini menimbulkan berbagai dampak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdampak buruk di bidang kesehatan, terutama bagi anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Lahan pertanian yang seharusnya menghasilkan sumber makanan yang bergizi bagi kehidupan manusia, sekarang semakin berkurang dan beralih fungsi. Dampak di bidang ekonomi, yaitu petani dirugikan karena tidak bisa melakukan kegiatan pertanian sehingga petani tidak memiliki hasil dari kegiatan pertanian dan memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti investor. Bidang kebudayaan juga terpengaruh oleh dampak alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga mengakibatkan tergesurnya petani dari ranah ekosistem pertanian adalah memindahkan petani dari sistem kehidupan komunitasnya, baik dengan cara-cara yang "legal," maupun cara-cara "ilegal", dengan tujuan tertentu. Tujuan menggusur petani, baik secara legal

maupun ilegal adalah demi alasan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesungguhnya di dalam tujuannya bermain kaum kapital yang sengaja mengonstruksi keadaan lewat modernisasi zaman. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Komang Yamuna sebagai berikut:

Di kelurahan Ssetan, banyak sawah dijual karena banyak pemiliknya yang tergiur dengan harga yang tinggi, sehingga para petani mau menjualnya. Di samping itu air untuk mengairi sawah pun sudah sulit didapat, hanya mengandalkan air hujan saja. Irigasi sebagian sudah ditutup oleh bangunan rumah. Mereka juga dikejar dengan kebutuhan hidup, maka ketika sawahnya ditawarkan dengan harga tinggi, ya dijual-lah (Hasil wawancara dengan I Komang Yamuna, pada tanggal 11 Desember 2015).

Fenomena di atas diperkuat oleh pernyataan dari I Wayan Astana yang kutipan wawancaranya sebagai berikut: Sawah-sawah di Kelurahan Pedungan sudah banyak yang beralih fungsi karena para petani di sini tergiur dengan harga tanah yang semakin melambung tinggi sehingga terlena dengan rayuan para pemilik modal yang bermaksud membeli tanah untuk dijadikan perumahan, deretan ruko atau yang lainnya (Hasil wawancara dengan I Wayan Astana, pada tanggal 13 Desember 2015).

Pada umumnya para petani telah tergoda dengan harga tanah yang mahal dan berharap dengan menjual lahan sawahnya mereka akan bisa hidup berkecukupan. Namun, petani kurang menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa hegemoni adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu (Tilaar, 2003: 77). Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan. Di samping itu, bahwa kesepakatan terjadi lewat penawaran harga yang menggiurkan.

### 3. Ekologi

Ekologi meliputi seluruh lingkungan fisik yang terhadapnya manusia harus beradaptasi. Ia meliputi sifat-sifat tanah, sifat iklim, pola hujan, sifat kehidupan tanaman dan binatang, Serta ketersediaan sumberdaya alam. Dalam pengertian yang ketat, ekologi bukanlah bagian dan sistem sosiokultural; ia merupakan lingkungan eksternal yang terhadapnya sistem sosiokultural harus menyesuaikan diri. Namun, karena faktor ekologis seringkali merupakan determinan krusial bagi berbagai aspek kehidupan sosial, maka di sini ekologi diperlakukan sebagai komponen dasar sistem sosiokultural (Sanderson, 2011: 60-61).

Dampak bagi ekologi lingkungan akibat alih fungsi lahan menyebabkan permasalahan lain yang bertentangan dengan situasi dan ekologi pertanian yakni munculnya masalah sampah. Banyaknya bermunculan perumahan-perumahan baru di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan telah memunculkan "produksi" sampah. Sementara itu, tempat pembuangan sampah tidak diantisipasi dengan baik, sehingga penduduk-penduduk dari pemukiman baru tersebut membuang sampahnya sembarangan, tidak terkecuali di lahan-lahan persawahan yang dianggapnya sebagai tanah kosong, seperti diperlihatkan dalam gambar berikut ini.



**Gambar 4.2 Pembuangan Sampah pada Lahan Persawahan sebagai Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan menjadi Fungsi Pemukiman/Perumahan. Sumber: Wiratha, 2016**

Ketiadaan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat dipemukiman baru tersebut, diakui oleh I Nengah Sudarta, warga salah satu perumahan baru di wilayah Kelurahan Pedungan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Saya membeli rumah disini selain untuk investasi juga karena aktivitas saya lebih banyak di Kota Denpasar. Dari pada mondar-mandir dari kampung saya di daerah Kintamani, akhirnya saya pindah ke rumah baru di Pedungan ini. Permasalahan muncul karena ternyata di sini tidak tersedia tempat pembuangan sampah. Ya, terpaksa kami membuang sampah dilahan-lahan yang kami anggap sebagai lahan kosong (Hasil wawancara dengan I Nengah Sudarta, pada tanggal 26 November 2015).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan untuk pemukiman tidak diiringi dengan adanya penyediaan infrastruktur pendukung seperti tempat pembuangan sampah. Situasi itu menyebabkan masalah yang baru muncul. Hal senada juga dikemukakan oleh Ni Wayan Artikasari, warga masyarakat yang bermukim di Kelurahan Sesetan sebagai berikut:

Tadinya kami pindah di sini untuk mendekati kantor, anak-anakpun jadi dekat sekolahnya. Tapi permasalahan disini belum ada pembuangan sampah yang dekat dengan rumah kami. Jadinya kami membuang sampah dimana saja (Hasil wawancara dengan Ni Wayan Artikasari, pada tanggal 29 November 2015).

Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dampak dari alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman/perumahan salah satunya adalah permasalahan pembuangan sampah yang belum banyak tersedia. Akibatnya sampah dibuang sembarangan yang akhirnya menjadi pencemaran lingkungan.

#### 4. Demografi

Faktor demografis adalah faktor yang meliputi sifat dan dinamika penduduk manusia. Kepadatan dan jumlah penduduk, pertumbuhan, kemerosotan, atau stabilitasnya, serta komposisi umur dan jenis kelamin merupakan hal yang penting diketahui dalam mengkaji suatu masyarakat. Faktor demografis juga mencakup teknik pengaturan penduduk atau pengendalian kelahiran dan intensitas penerapan teknik tersebut (Sanderson, 2011: 61).

Demografi sendiri merupakan kajian atau bahasan mengenai struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi : jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.

Demografi dalam arti sempit dinyatakan sebagai demografi formal yang memperhatikan ukuran atau jumlah penduduk, distribusi atau persebaran penduduk, struktur penduduk atau komposisi, dan dinamika atau perubahan penduduk. Ukuran penduduk menyatakan jumlah orang dalam suatu wilayah tertentu. Distribusi penduduk menyatakan persebaran penduduk di dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu, baik berdasarkan wilayah geografi maupun konsentrasi daerah pemukiman. Struktur penduduk menyatakan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau golongan umur. Sedangkan perubahan penduduk secara implisit menyatakan penambahan penduduk atau penurunan jumlah penduduk secara parsial ataupun keseluruhan sebagai akibat berubahnya tiga komponen utama perubahan jumlah penduduk. Kelahiran, kematian, dan migrasi.

Dalam pengertian yang lebih luas, demografi juga memperhatikan berbagai karakteristik individu maupun kelompok, yang meliputi tingkat sosial, budaya, dan ekonomi. Karakteristik sosial dapat mencakup status

keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Karakteristik ekonomi meliputi antara lain aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan aspek budaya berkaitan dengan persepsi, aspirasi dan harapan-harapan.

Dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non-pertanian, maka luas lahan sawah semakin menyempit dan hal tersebut akan berakibat pada perubahan demografi dan perubahan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan. Dahulu Kecamatan Denpasar Selatan sangat terkenal sebagai lumbung padi Kota Denpasar karena sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian sawah. Secara kebetulan letak geografis Kecamatan Denpasar berada pada Provinsi Bali maka daerah tersebut menjadi daerah potensial pemasok beras bagi kebutuhan penduduk Kota Denpasar dan sekitarnya. Namun saat ini lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan semakin menyempit karena sudah berubah menjadi penggunaan lahan yang lain khususnya pemukiman.

Kebutuhan pemukiman ini didorong adanya urbanisasi dan migrasi penduduk dari wilayah lain masuk ke Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Denpasar selatan bertambah dengan pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan yang semakin meningkat pesat serta terjadinya kebutuhan tempat tinggal tentu saja mempengaruhi kebutuhan lahan yang akan mengalami peningkatan pula, yang akhirnya memanfaatkan lahan sawah sehingga luasannya semakin berkurang yang kemudian akan menimbulkan ketimpangan antara luas lahan sawah dengan kebutuhan lahan lain yang beragam.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan yang diikuti dengan pembangunan dan perbaikan akses transportasi di Kecamatan Denpasar Selatan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi maupun

berinteraksi dengan daerah sekitarnya. Masyarakat mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kondisi ini mendorong banyak pihak pengelola yang memanfaatkan lahan di Kecamatan Denpasar Selatan untuk dibangun perumahan kelas menengah. Pembangunan perumahan yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan tersebut banyak mempengaruhi aspek perubahan penduduk masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Pembangunan jalan yang memberikan pengaruh utama bagi masyarakat sekitar.

Pertumbuhan dan perkembangan sentra-sentra bisnis dan tersedianya pemukiman baik perumahan dan kost-kostan atau rumah sewa, telah menarik penduduk-penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu proses pindahnya penduduk desa ke kota dalam rangka untuk mengubah nasib dari tidak baik menjadi baik, tidak maju menjadi maju, tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, tidak berwawasan luas menjadi berwawasan luas. Dengan keadaan itu maka namanya urbanisasi tidak akan dapat dihentikan karena akan membatasi hak asasi manusia untuk hidup lebih baik dan maju, kreatif dan tanggung jawab. Pindahnya penduduk desa ke kota memang membawa dampak baik di kota maupun di desa yang ditinggal, untuk kota misalnya perubahan demografis, politik, ekonomi, budaya, sosial, tetapi untuk desa dampaknya, kurangnya tenaga pertanian, kerawanan didesa, terjadinya alih fungsi tanah pertanian, desa akan selalu tertinggal. Pembangunan kota akan terbantu dengan adanya Urbanisasi kalau orang yang datang ke kota punya skill (keahlian), keahlian ini tidak banyak membebani kota karena orang yang datang ke kota akan memanfaatkan sarana dan prasarana, memanfaatkan kondisi yang ada di kota dengan cepat. Dampak Urbanisasi untuk Negara maju perubahan fisik kota berkembang dengan pemukiman elite di pinggiran kota yang di tunjang kemajuan teknologi. Untuk Negara berkembang secara fisik

kota akan tumbuh menjadi besar dan luas dengan tingkat teknologi dan kualitas kehidupan kota yang kurang memadai.

Pembangunan dan perkembangan sentra-sentra bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan mempengaruhi munculnya urbanisasi. Pembangunan dan perkembangan sentra-sentra bisnis tersebut akan di ikuti perombakan dalam corak kegiatan ekonomi, makin maju suatu perekonomian makin penting peranan kegiatan bisnis serta mempengaruhi perubahan tata kehidupan penduduk/masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan dalam bidang pemukiman, hukum, politik, keamanan dan segi sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa urbanisasi masuk ke Kecamatan Denpasar Selatan, didahului adanya migrasi penduduk dari daerah/kota lain ke Kecamatan Denpasar Selatan. Migrasi ini khususnya kaum pemilik modal/investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di Kecamatan Denpasar Selatan. Setelah kaum pemilik modal yang bermigrasi ke Kecamatan Denpasar Selatan berhasil mengembangkan usahanya/bisnisnya, yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan sentra-sentra bisnis baru di Kecamatan Denpasar Selatan, barulah urbanisasi ke Kecamatan Denpasar Selatan terjadi.

Proses urbanisasi ini akan diikuti adanya pengembangan fisik kota termasuk adanya perubahan fungsi yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, selain hal tersebut akan terjadi meluasnya pembagian kerja, meningkatnya spesialisasi sistem kerja, makin mudahnya penggunaan tenaga non insani, makin cepatnya perubahan penggunaan teknologi, makin berkurang jarak, waktu dan ruang serta memperbesar golongan penduduk yang mendapat pelayanan umum.

Pertumbuhan Kecamatan Denpasar Selatan ditandai dengan adanya perubahan atau pergeseran kondisi ekonomi yang ada di perkotaan atau dengan kata lain struktur ekonomi primer berubah menjadi sektor sekunder dan sektor industri mengarah menjadi sektor tersier. Pembangunan ekonomi dapat mempercepat proses urbanisasi dan sebaliknya proses urbanisasi dapat pula mempercepat proses pembangunan ekonomi (Sukirno, 2013: 53). Sesuai dengan hal tersebut maka urbanisasi akan menciptakan perkembangan kota dan selanjutnya terdapatnya kota-kota besar akan menyebabkan proses pembangunan ekonomi dan transportasi sosial budaya dari desa yang masuk ke kota akan mengalami perubahan karena situasi dan kondisi tempat kota.

Faktor yang bersifat bisnis merupakan penyebab terpenting dan timbulnya urbanisasi dan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan, pembangunan sentra-sentra bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan akan dapat mempengaruhi pembangunan yang lain terutama dapat dilihat dengan mudah adalah pembangunan infrastruktur misal pembangunan gedung, jalan, jembatan serta pembangunan suprastruktur misal peningkatan SDM. Pembangunan dan perkembangan bisnis apabila berjalan konsisten dan rutin maka akan menjadi ekonomi yang besar dan pada waktu yang akan datang menjadi tolak ukur majunya suatu pemerintahan. Pembangunan atau pertumbuhan bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan juga membutuhkan tenaga manusia dan oleh sebab itulah tidak dapat di tolak atau di hentikan adanya urbanisasi. Pembangunan dan perkembangan bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan juga membutuhkan tenaga terampil, tempat (lahan), kestabilan pemerintahan, kestabilan atau kejelasan hukum dan politik, keamanan dan masih banyak lagi. Kesemuanya ini adalah membutuhkan tenaga atau pemikiran manusia yang handal (profesional).

Urbanisasi akan memunculkan pertambahan penduduk secara alami yaitu besarnya tingkat pertambahan penduduk karena besarnya penduduk juga diikuti kelahiran yang tinggi juga, hal di pengaruhi adanya harapan hidup yang besar bagi anak yang lahir di tambah tingkat kesehatan masyarakat yang baik.

Pertumbuhan penduduk karena urbanisasi ke Kecamatan Denpasar Selatan dipicu mudahnya cari kerja di Kecamatan Denpasar Selatan yang menyediakan kebutuhan hidup, Kecamatan Denpasar Selatan dilihat sepintas adalah menjanjikan untuk hidup lebih enak dan menyenangkan dan masih banyak lagi dan semuanya itu akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk dan lapangan kerja, tempat tinggal, tempat-tempat pelayanan sosial, dan pelayanan ekonomi.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali juga berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Fenomena ini juga berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan seperti halnya Kecamatan Denpasar Selatan.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan demografi secara keruangan. Fenomena ini sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau *overurbanization*. Dalam istilah lain sering disebut sebagai urbanisasi semu atau *pseudourbanization*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Smith dan Nemeth (1988) menyatakan bahwa urbanisasi harus dikendalikan, sebab jika tidak maka menimbulkan dampak

negatif baik terhadap penduduk kota, penduduk pedesaan, maupun pengaruh makro terhadap negara. Sebaliknya, jika proses urbanisasi bisa dikendalikan akan memberikan dampak positif.

Kondisi urbanisasi yang tidak terkendali kalau tidak segera dibuat solusi atau kebijakan dari pemerintah tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertambahan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang besar, serta akan terjadi kemunculan masalah sosial, keamanan, kesehatan, sanitasi, pemukiman liar atau tak teratur, dan timbul banjir di lingkungan masyarakat kota. Dengan bertambahnya penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang terus membesar maka akan muncul adanya, pembagian kerja, meningkatnya spesialisasi, makin mudah menggunakan tenaga non insani, maka cepatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di kota, berkurangnya jarak tempuh kota yang satu dengan kota yang lain karena baiknya sarana dan pra sarana transportasi.

Berdasarkan uraian mengenai alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non-pertanian Kecamatan Denpasar Selatan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka tak dapat dipungkiri bahwa alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan tersebut berimplikasi terhadap infrastruktur kehidupan petani. Ditinjau dari kehidupan modern, implikasi ini bersifat positif yaitu dibangunnya pusat-pusat bisnis, gedung-gedung perkantoran, sekolah-sekolah, pasar-pasar dan sarana prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan I Made Narayana sebagai berikut :

Kalau ditanggapi secara positif, alih fungsi lahan persawahan memang membuat hidup kita lebih enak. Sekarang pusat kegiatan bisnis ada dimana-mana. Demikian juga dengan pasar-pasar tradisional bertambah banyak. Minimarket banyak kita jumpai di sepanjang Jalan Sesetan, Tukad Pakerisan dan jalan-jalan lain di Kecamatan

Denpasar Selatan. Demikian juga dengan gedung-gedung perkantoran. Contohnya di wilayah Renon, sudah dipenuhi gedung-gedung perkantoran yang megah, padahal dulu wilayah Renon dipenuhi oleh sawah-sawah yang subur. Tapi, memang diakui, saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi gampang, mau mencari makan, mudah dan dekat, banyak tempat yang dapat kita datangi dari kelas warung makan, restoran, cafe sampai rumah makan berkelas banyak bertebaran. Mau belanja, juga mudah dengan banyaknya minimarket yang bertebaran di mana-mana. Pokoknya, untuk kehidupan modern, infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi mudah dan enak (Hasil wawancara dengan I Made Narayana, pada tanggal 21 Desember 2015).

Hal ini diakui oleh I Wayan Prayuda yang menyatakan sebagai berikut :

Iyalah, saya mengakui, dalam kehidupan kekinian semua ditopang dengan infrastruktur yang memudahkan kehidupan modern kita. Kebutuhan kita dengan mudah kita penuhi, karena infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan itu ada dimana-mana di Kecamatan Denpasar Selatan ini. Jujur saja, masyarakat pada umumnya, kurang peduli bahwa infrastruktur itu berasal dari alih fungsi lahan. Kita nggak begitu peduli, bagi kita, pada waktu kita butuh sesuatu, dapat kita penuhi dengan mudah dan dekat lagi (Hasil wawancara dengan I Wayan Prayuda, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan berimplikasi pada pembangunan infrastruktur. Pada umumnya masyarakat yang menjadi informan kajian ini menanggapi dengan sikap positif yaitu kemudahan mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan kekinian mereka pada era modern ini.

Selain alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan juga membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah ini, perkembangan laju perekonomian masyarakat yang semakin meningkat begitu terlihat saat ini. Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupajalan, bangunan industri, fasilitas umum dan pemukiman. Kondisi demikian mengakibatkan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan nonpertanian yang mengakibatkan banyak lahan sawah, terutama di sekitar perkotaan seperti Kecamatan Denpasar Selatan mengalami alih fungsi. Data berikut memberi gambaran mengenai perkembangan infrastruktur terhadap jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan.

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Infrastruktur terhadap Jumlah Penduduk**  
**di Kecamatan Denpasar Selatan**

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	% Pertumbuhan	Rumah	% Pertumbuhan	Toko/ Per-dagangan	% Pertumbuhan	Industri	% Pertumbuhan	Sarana Pariwisata	% Pertumbuhan
2010	185.985	-	27.366	-	2.246	-	198	-	31	-
2011	244.591	31,51	35.828	30,92	2.350	4,63	204	3,03	31	0
2012	249.660	2,07	52.440	46,37	2.491	6,00	216	5,88	35	12,90
2013	260.754	4,44	81.308	55,05	2.755	10,60	235	8,80	46	31,43
2014	266.175	2,07	84.760		2.755	0	235	0	46	0
% Pertumbuhan dalam 5 Tahun (2010-2014)	43,11		309,80		22,66		18,69		48,39	

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 43,11%, sedangkan pertumbuhan jumlah rumah 309,80%, jumlah toko/

perdagangan 22,66%, jumlah industri 18,69% dan jumlah sarana pariwisata mengalami pertumbuhan 48,39%. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memang membutuhkan tempat tinggal/rumah. Hal inilah yang memicu terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman/perumahan. Sehingga sekarang topografi wilayah ini berubah dari persawahan menjadi daerah pemukiman.

Peningkatan infrastruktur bersamaan dengan realisasi pembangunan pusat bisnis, gedung-gedung, pasar, minimarket dan sebagainya, mengkondisikan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan ada dan mengada dalam pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan kekinian di atas *space and place* atau ruang dan tempat komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat. Pada masa awalnya, jalan-jalan *penepi siring* atau perkampungan di Kecamatan Denpasar Selatan, merupakan jalan atau akses tempat-tempat suci dan fasilitas kegiatan adat, yang harus menerima fungsi baru sebagai akses atau infrastruktur pendukung kehidupan kekinian tersebut. Perbaikan wajah dan fisik Pura Ulundanu yang dulunya berada di tengah persawahan menjadi penanda perubahan cepat yang kurang dari hitungan dekade atau sewindu, kemudian perubahan mendasar pun mempengaruhi tataruang perumahan, banjar atau lingkungan dan desa adat.



**Gambar 4.3 Suasana Pertokoan di Jalan Sesetan**

**Sumber: Wiratha, 2016**

Realitas perubahan dan konflik ruang yang diterima sebagai keniscayaan era modern atau kekinian, mendorong dan mempengaruhi perubahan cara berpikir, sikap dan pandangan atas relevansi dan berlakunya nilai-nilai lokal atau *indigenouvalues*. Seperti halnya pengakuan Bendesa Adat, Pekaseh dan warga Desa Adat, harus menerima situasi dan kondisi desa adatnya sebagai daerah terbuka (sebutan bagi ruang terbuka). Satu ungkapan yang mengandung kesadaran, kekhawatiran dan resistensi atas konsekwensi keberadaan lingkungannya sebagai kawasan bisnis. Sebuah ruang terbuka dengan tersedianya banyak akses ke Kecamatan Denpasar Selatan, memungkinkan siapa pun bisa masuk ke desa adat yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan pada jam dan tempat yang mereka kehendaki. Akomodasi atau perumahan dan warung makan atau restoran serta tempat hiburan selalu menyapa dan menyambut kedatangan mereka dengan ramah.

Kasus-kasus atau peristiwa konflik antara masyarakat lokal dan pendatang, atau dengan pengembang pariwisata, seperti yang terjadi di rumah-rumah darurat dan sangat sederhana serta daerah kost-kostan, merupakan tempat *the others* yang dipastikan menjadi tempat tinggal dari ratusan pendatang yang tidak terdata dalam catatan migrasi kependudukan. Mereka betul-betul menempati ruang pinggiran yang tidak diperhitungkan oleh warga desa, kecuali sebagaikantong pendatang musiman, pengadu nasib dan migran tak terdaftar dikelurahan atau desa adat, karena lama tinggalnya dianggap tidak menentu. Keberadaan para pengadu nasib yang datang di Kecamatan Denpasar Selatan ini, tepat disebut *wong liyan* atau *the others* di Kecamatan Denpasar Selatan ini.

Oleh karenanya melihat kehidupan masyarakat lokal di Kecamatan Denpasar Selatan, harus menelusuri aspek multikultural dan heterogenitas masyarakat, dalam konteks Bali sebagai komunitas desa adat, konteks Indonesia yang terdiri atas enam agama dan lebih dari 300 suku bangsa. Kompleksitas tersebut senantiasa mewarnai Kecamatan

Denpasar Selatan sebagai ruang budaya multikultural, yang merujuk pertimbangan kompleks untuk memahami keberadaan masyarakat lokal di Kecamatan Denpasar Selatan khususnya dan Bali pada umumnya.

Bayang-bayang perkembangan aktivitas bisnis bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan, yang menjanjikan rezeki dan kenikmatan, akhirnya disadari sebagai koin gamang terhadap kegiatan bisnis itu sendiri. Pada satu sisi berwajah peluang dan wajah ancaman pada sisi di baliknya. Melihat permasalahan ruang, lingkungan dan tanah dari efek komodifikasi Bali, menemukan resepsi *insiders* yang *commonsense*, berupa (1) masalah ruang atau 'tanah berharga emas', (2) mimpi kemakmuran dan harapan atau utopia kegiatan bisnis (3) masalah kebijakan publik di kawasan yang seharusnya menjadi lumbung padi. Peningkatan infrastruktur bisnis bersamaan dengan realisasi pembangunan fisik daerah dan nasional, mengkondisikan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan ada dan mengada dalam kegiatan bisnis di atas *space and place* atau ruang dan tempat komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat.

*Gravity* kawasan dalam penglihatan kasat mata, dirayakan dengan representasi *marker* bisnis dan ikon produk-produk komersial. Pada area infrastrukturnal, berkembang ekonomi kapitalistik yang penuh kontestasi saling silang dan saling potong pengaruh promosi dan pemasaran. Pelipatgandaan modal dalam kegiatan bisnis mendorong dan menarik pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguasai ruang-ruang pada area pusat kawasan bisnis. Sementara diaspora tanda kegiatan bisnis yang bergerak terus tidak disadari berlangsung dengan kekuatan kapitalistik dan teknologi informatik global. Masyarakat awam masih sebagian besar terinterpelasi dalam gravity dan riuh kehidupan kawasan bisnis, dalam kegamangan kesadaran dan ambivalensi kehidupan modern. Artikulasi kekalahan dan keterpinggiran masyarakat lokal di Kecamatan Denpasar Selatan, sementara

bisa dijawab dengan penjajahan baru dengan kekalahan peralatan dan pengetahuan dalam ingatan politik kolonial Belanda dan Fasis Jepang.

Dengan semua investigasi dan ekonstruksi sistem perbatasan, bisa direkomendasikan pendekatan yang bermakna dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan yang seharusnya sebagai lumbung padi. Peluang berusaha bagi masyarakat lokal termasuk masyarakat lemah bisa diposisikan pada area *indigenous culture* yang masih menjadi daya tarik tersendiri. Di dalamnya bisa disuguhkan bisnis perumahan, ruko, bisnis bidang kesehatan, teknologi informasi, minimarket dan sebagainya.

## **B. Implikasi terhadap Struktur Sosial**

Adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan tidak saja mengubah infrastruktur material teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi tetapi berdampak pula pada perubahan struktur sosial masyarakatnya. Struktur sosial yang mengalami perubahan antara lain perubahan stratifikasi sosial, munculnya etnis-etnis lain selain Bali, perubahan kebijakan (*policy*) berkaitan dengan pemanfaatan tanah, pembagian kerja secara seksual, sistem kekeluargaan dan kekerabatan, serta pendidikan (Sanderson, 2011: 61). Menurut Sanderson (2011: 61) komponen sistem sosiokultural berisi pola-pola kehidupan sosial yang teratur yang dipakai di kalangan para anggota suatu masyarakat, selain pola-pola sosial yang termasuk dalam infrastruktur. Harus dicatat bahwa struktur sosial selalu merujuk kepada pola perilaku aktual, sebagai lawan dari kesan-kesan atau konsepsi-konsepsi mental yang dimiliki orang tentang pola-pola tersebut. Dengan kata lain, struktur sosial berisi apa yang dilakukan orang secara aktual, bukan apa yang mereka katakan mereka lakukan, bukan pula apa yang mereka pikir mereka lakukan atau yang mereka pikir harus mereka lakukan. Untuk tujuan ini, struktur sosial berisi enam sub-unit yaitu (1) ada (atau tidak adanya) stratifikasi sosial; (2) ada (atau tidak adanya) stratifikasi etnis dan rasial; (3) kepolitikan; (4)

pembagian kerja secara seksual dan ketidaksarnaan secara seksual; (5) keluarga dan kekerabatan; dan (6) pendidikan, diuraikan sebagai berikut (Sanderson, 2011: 61-62) :

1. Ada (atau tidak adanya) stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merujuk kepada adanya kelompok..kelompok dalam masyarakat yang tidak sama kekayaan dan kekuasaannya. Tidak semua masyarakat memiliki stratifikasi sosial. Dalam mengkaji sebuah masyarakat, sangat penting mengetahui apakah ada stratifikasi di dalamnya atau tidak; jika ada, sifat dan tingkat stratifikasi tersebut harus pula diketahui secara pasti (Sanderson, 2011: 61).

Perubahan struktur sosial yang berhubungan langsung dengan alih fungsi lahan adalah stratifikasi sosial masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Saat ini jumlah petani di kawasan ini sudah sangat jarang. Karena adanya pandangan bahwa wilayah itu merupakan wilayah industri sehingga tidak wajar menjadi seorang petani. Dalam hal demikian petani menjadi kaum yang termarginalkan atau kaum yang menjadikan kelompok lain berbeda, yang berada lebih di bawah (Ratna, 2013:463). Namun, ada juga petani pemilik lahan pertanian, yang memang tidak menjual tanahnya. Mereka umumnya dari kaum berada dan menjalin kerja sama dengan petani penggarap untuk mengerjakan lahannya. Fenomena itu memunculkan struktur sosial baru yaitu kelompok petani penggarap yang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu sebelum alih fungsi lahan terjadi. Petani sebelumnya adalah petani yang menggarap tanahnya sendiri, sedangkan saat ini petani yang ada hanya mengerjakan tanah milik orang lain. Hal ini terungkap pada wawancara dengan Ketut Redi, penduduk Dukusari, Kelurahan Sesetan yang petikan wawancaranya sebagai berikut :

*Sane nuwenang tanah saking Bualu, tiang orahine nongosin kemanten, santukan mangkin nenten malih nandur padi, sampun nanem punyan biyu, yening wenten je hasil tiang aturan merike ring sane nuwenang tanah niki, tiang kadang-kadang ngaturang hasil*

*tanduran merike ring bos tiange. Daweg dumun waktu kari nandur padi pembagiane 21..kekalih tiang, asiki sang sane nuwenang tanah. Sane nuwenang tanah ngomong, buin pidan je tiang lakar membangun ditu kal tagih tanah, yen konden tiang ngidaang membangun, nah, pulain ape je ngidaang mulain, apang ade gen nongosin tanahe”* .(terjemahan : Yang punya tanah orang dari Bualu, saya hanya disuruh menempati saja, karena sekarang sudah tidak lagi menanam padi, hanya menanam pohon pisang, kalau ada hasil saya bawaan hasilnya ke rumah yang punya tanah, saya kadang-kadang mebawakan hasil pertanian kerumah boss (yang punya tanah). Waktu dulu masih menanam padi pembagiannya 2 dan 1, 2 untuk saya, dan satu untuk yang punya tanah. Yang punya tanah ngomong, kapan saya akan membangun saat itu diambil tanahnya, kalau belum bisa saya membangun, silahkan ditanami apa saja, yang bisa ditanami, supaya ada yang menempati tanah ini) (Hasil wawancara dengan Ketut Redi, pada tanggal 2 Agustus 2015).

Hasil wawancara di atas menjelaskan perubahan struktur sosial masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan yang mengalami perubahan struktur sosial. Petani mengalami mobilitas social menurun dari petani pemilik tanah menjadi petani penggarap. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sanderson (2003:31), bahwa stratifikasi sosial itu merujuk pada adanya kelompok-kelompok yang tidak sama kekayaan dan kekuasaanya. Pemilik tanah disini tidak sama kekuasaan dan kekayaannya dengan petani penggarap. Hal senada dikatakan oleh I Nyoman Wardhana sebagai berikut.

Sekarang pemilik sawah Kelurahan Pedungan tidak bertani lagi karena hidup mereka sudah mapan dan lahan sawah milik mereka dikerjakan oleh para petani penggarap dengan hasil pertanian dibagi tiga (Hasil wawancara dengan I Nyoman Wardhana, pada tanggal 3 Desember 2015)

Kepemilikan tanah sebagai modal ekonomi jelas membentuk stratifikasi sosial di masyarakat Denpasar Selatan. Hal ini diperkuat lagi dengan apayang dinyatakan oleh Ni Putu Djuwita yang memiliki sawah di Desa Pemogan dan Kelurahan Sesetan sebagai berikut:

Saya tadinya mempunyai sawah di Pemogan dan Sesetan, kalau di Pemogan sudah digarap oleh orang lain. Kami tinggal menerima hasilnya, secara bagi hasil. Kalau yang di Sesetan sih, memang sudah saya jual, karena harga jualnya tinggi dan hasilnya saya belikan tanah di daerah Tabanan. Sebagian untuk modal usaha anak saya. Itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan tetap saya biarkan jadi sawah (Hasil wawancara dengan Ni Putu Djuwita, tanggal 7 Desember 2015).

Pemilik modal tanah telah menghegemoni dan bahkan mendominasi petani penggarap. Ini sesuai dengan pandangan Gramsci yang mengungkapkan bahwa kontra hegemoni adalah pihak yang mengorganisasikan dan mereorganisasikan terus-menerus kehidupan, baik sadar maupun tidak sadar dari massa. Upaya penyelamatan petani penggarap dilakukan dengan mempertahankan lahan pertanian yang masih tersisa dan jumlahnya sangat sedikit, dengan kontra hegemoni (Tilaar, 2003:77). Hal semacam ini dapat digambarkan sebagai strategi kaum petani pemilik lahan dalam melawan hegemoni dari penguasa, yaitu pemerintah setempat, dengan upaya mempertahankan lahan yang telah ada. Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Gramsci dalam bahasan teorinya, yaitu memberikan solusi untuk melawan hegemoni (kontra hegemoni) dengan menitikberatkan pada upaya perbaikan taraf kehidupan masyarakat.

Keseluruhan fenomena di atas menjadi bukti bahwa alih fungsi lahan secara massif telah mengubah struktur sosial terutama munculnya stratifikasi sosial pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah menjadi kelompok yang ada di atas pengelola tanah. Itu bisa dilihat dari adanya wacana

sebutan “bos” bagi pemilik tanah dan “anak buah”.Jika dikaji secara semiotika nilai rasa bos dan anak buah menunjukkan kelas sosial yang berbeda.

Namun demikian adanya alih fungsi lahan di samping berdampak pada munculnya mobilitas menurun dari status petani pemilik ke penggarap juga berdampak pada perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ini bisa dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin di kota Denpasar. Data penurunan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Denpasar Selatan dari tahun 2006 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penurunan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2006-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah RTM</b>	<b>Jumlah Penurunan</b>	<b>% Penurunan</b>
2006	932	-	-
2010	459	474	50,86
2014	280	178	38,86

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Denpasar Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 menurun dari 932 RTM pada tahun 2006 menjadi 458 RTM pada tahun 2010, dan menurun lagi pada tahun 2014 menurun 178 RTM atau 38,86%. Data ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan bukannya meningkatkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), namun justru menurunkan Rumah Tangga Miskin (RTM).Data tersebut menjadi bukti bahwa secara struktur sosial jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang secara struktur sosial ada di bawah saat ini sudah mulai berkurang. Sehingga stratifikasi sosial masyarakatpun berubah menjadi lebih merata dan secara status ekonomi mereka mengalami peningkatan.

2. Ada (atau tidak adanya) stratifikasi etnis dan rasial. Ini merujuk kepada apakah ada atau tidak kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mungkin dibedakan berdasarkan karakteristik rasial atau etnis; dan jika ada, apakah masing-masing kelompok menempati posisi sama antara satu dengan lainnya. (Kelompok-kelompok rasial adalah kelompok yang bisa dibedakan atas dasar karakteristik-karakteristik yang bisa dilihat secara fisik; kelompok etnis adalah kelompok yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kultural). Banyak masyarakat dalam sejarah manusia yang tidak mempunyai stratifikasi rasial atau etnis. Namun pada beberapa ratus tahun yang lalu, stratifikasi rasial/etnis telah menjadi ciri penting dan banyak masyarakat yang kompleks (Sanderson, 2011: 61).

Implikasi dalam bidang struktur sosial berkaitan dengan alih fungsi lahan adalah adanya perubahan struktur masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan jika dilihat dari etnis yang ada di wilayah itu. Berdasarkan data BPS Kota Denpasar menunjukkan bahwa dengan dibangunnya berbagai fasilitas bisnis di daerah ini menarik orang dari berbagai daerah datang ke sini. Berikut ini data komposisi penduduk kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan etnis.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Etnis di Desa Pedungan Tahun 2012-2013**

No.	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Etnis	Lak-laki	Perempuan	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Bali	8.443	7.893	Bali	8.018	7.841
2	Jawa	2.614	2.613	Jawa	2.445	2.534
3	Betawi	6	6	Melayu	1.321	98
4	Madura	16	16	Batak	7	7
5	Batak	28	28	Sunda	44	40
6	Bugis	12	14	Banjar	11	11
7	Makasar	7	8	Bugis	150	125
8	Ambon	18	16	Makasar	3	4
9	Minahasa	6	7	Sasak	11	6
10	Aceh	6	6	Ambom	1	
11				Flores	3	2
12				Sabu	1	1
13				Sumba	4	8
14				Ternate	25	26

Sumber: Data Monografi Desa Pedungan, 2014

Data di atas menunjukkan alih fungsi lahan telah menyebabkan adanya perubahan komposisi penduduk di wilayah Denpasar Selatan. Dampak riilnya saat ini Kecamatan Denpasar Selatan menjadi wilayah yang multi etnik dan multikultural. Pesatnya perkembangan jumlah etnik bisa dilihat secara jelas dari tahun 2012 awalnya hanya 10 etnis tahun 2013 sudah terdiri dari 14 etnis. Dalam masyarakat multietnik dan multikultural di Kecamatan Denpasar Selatan yang terbentuk sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan, hubungan sosial pada umumnya mempergunakan bahasa Indonesia baik dalam konteks hubungan antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dialog antar anggota masyarakat tentu saja akan dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi dan memudahkan adanya kesatuan pemahaman tentang berbagai permasalahan sosial yang dihadapinya. Walaupun kadang-kadang diselingi dengan penggunaan bahasa etnik, seperti bahasa Bali, Jawa, Sasak, Madura, dan Cina. Namun pada *desa pakraman* masih digunakan bahasa Bali. Pola pemukiman yang dikembangkan oleh masyarakat multietnik pada desa pakraman tidak saja berkontribusi pada kehidupan ekonomi tetapi juga kehidupan sosial/jaringan sosial/modal sosial bahkan integrasi sosial bagi masyarakat multietnik dan masyarakat Bali pada umumnya.

Jejaring sosial yang dikembangkan dalam kehidupan di wilayah pemukiman hasil alih fungsi lahan persawahan pada awalnya berupa jaringan hubungan sosial yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa tetangga merupakan teman yang paling dekat dalam mengatasi masalah suka dan duka. Jejaring hubungan sosial yang juga dikembangkan adalah jejaring hubungan sosial yang didasarkan atas identitas multietnik. Hal ini dapat dilihat dari adanya suku-suku Jawa, Batak, Manado, Nusa Tenggara Barat dan Timur,

Padang, Suku Bugis dan Tionghoa. Di samping itu, ada juga jejaring sosial yang didasarkan atas kepentingan anggota masyarakat yang sebagian besar terbentuk karena ada kaitannya dengan kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian. Namun demikian, adanya masyarakat yang multi etnik dan multikultur ini kondisi kondusif masih tetap terjaga di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kondusifnya masyarakat multikultur di Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat dari adanya kerja sama antar etnik dalam berbagai ruang publik, seperti misalnya di Pasar Inpres, Pasar Sanglah, di Pasar Nyanggelan dan pasar-pasar lainnya. Dalam aktivitas pasar, mereka menampakkan hubungan yang harmonis. Hal ini tampak dari adanya kesediaan dari pedagang kelompok etnik tertentu kepada kelompok etnik lainnya memberikan peminjaman tempat, alat, barang, dan bahkan uang, di samping bantuan tenaga. Presentasi kemultikulturan juga dapat disimak dari barang yang dijualnya, seperti pedagang kembang/canang, be guling, siopak, alat dan perlengkapan upacara (etnik Bali/Hindu), busana muslim, dan sate kambing (Madura). Hal ini semakin luas ruangnya bila dikaitkan dengan adanya berbagai organisasi/kelompok lintas etnik. Dalam berbagai aktivitas ritual baik yang dilakukan oleh masyarakat Hindu maupun non-Hindu selalu diupayakan adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Mantapnya hubungan tersebut juga diperkuat oleh adanya layanan-layanan publik yang terbuka bagi berbagai macam etnik/subkultur, seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di Jalan Waturenggong dan di Jalan Sidakarya, sebagaimana yang dilakukan oleh Asung (Cina/Budhis), atau sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Darmawan (Jawa) atau juga Wayan Wijana (Bali). Mereka ini memberikan pelayanan dengan keterbukaan, ketulusan, dan penuh kasih. Monumen kemantapan hubungan antaretnik/sub kultur juga dapat dilihat dari adanya keterbukaan kelembagaan umat untuk saling

mengakui, saling menyadari, dan saling menerima. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan Pura-Pura yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan bagi setiap umat beragama Pura ini terbangun dari sumbangan berbagai umat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Muslim dan Kong Hu-Tsu. Keterbukaan semacam ini juga tampak pada masjid-masjid ataupun mushola-mushola yang mulai tumbuh di Kecamatan Denpasar Selatan. Tempat ini dijadikan simbol hubungan antar umat beragama, karena tempat suci ini terbuka bagi masyarakat umum untuk berkunjung, menanyakan nasib, keberuntungan, dan obat. Di samping itu, di tempat ini juga sering dilakukan latihan barong sai, yang terbuka untuk umum.

Dalam masyarakat *desapakraman* yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan telah dikembangkan berbagai kearifan sosial yang dapat menjadi perekat sosial dalam masyarakat multikultural. Dalam tataran teks kognitif dalam masyarakat, terdapat ungkapan kearifan sosial seperti *celebingkah batan biu*, *gumi linggah ajak liu* (Bumi ini luas dan ditempati banyak orang), *don sente don pelendo*, *ade kene ade keto* (ada yang begini ada yang begitu/ penghargaan terhadap variasi sosial). Teks yang lain yang tak kalah pentingnya adalah ungkapan *buka nyuhe aijeng* (seperti kelapa satu tangkai tidak ada yang sama). Hal itu lebih lanjut diperkuat dengan aturan *awig-awig* desa yang menyatakan bahwa *krama desa* terdiri dari *krama negak* dan *krama tamiu* (*krama* yang duduk sebagai anggota *desa pakraman*, dan *krama* yang diposisikan sebagai pendatang). Teks kognitif yang lain adalah adanya ungkapan *nyama Madura*, *nyama Jawa*, *nyama Sasak*, *nyama Arab*, dan *nyama Cina*. Ungkapan *menyama* artinya bersaudara. Ungkapan-ungkapan semacam itu juga berkembang pada masyarakat etnik Tionghoa, bahkan ada ungkapan yang menyatakan bahwa etnik Tionghoa merupakan kakak dari etnik Bali. Pernyataan kakak dan adik dalam hubungan antaretnik

menyiratkan akan adanya hubungan persaudaraan/geneologis.

Ungkapan-ungkapan ini tidak saja mengakui, tetapi juga menguatkan pandangan bahwa siapapun yang tinggal di wilayah desanya adalah saudaranya yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Di samping teks kognitif juga dalam masyarakat berkembang teks sosial seperti misalnya adanya kehidupan kelompok suka duka lintas sub kultur, adanya kelembagaan *ngopin* (membantu), *medelokan* (berkunjung), dan adanya kelembagaan makanan *penyelam* (masakan yang tidak menggunakan daging babi). Teks sosial yang lainnya misalnya dalam bentuk kerja sama antarumat beragama, misalnya pada saat Upacara *Tawur Kesanga* dan Nyepi umat Hindu memohon bantuan dari umat non-Hindu lainnya untuk membantu. Demikian pula pada saat umat lainnya melakukan aktivitas sosial keagamaan. Hal semacam itu merupakan modal budaya dan modal sosial yang sangat penting artinya dalam memajemen masyarakat multikultur.

Pengembangan jaringan hubungan sosial yang dilakukan oleh berbagai etnis dalam masyarakat multi-etnis akan menentukan munculnya berbagai bentuk integrasi antaretnis. Dalam masyarakat desa *pakraman* dimungkinkan adanya integrasi antaretnis di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini terkait dengan adanya kedudukan anggota desa *pakraman* sebagai *kerama sampingan* dan *krama tamiyu*. Hal seperti itu juga dikembangkan oleh desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam kapasitasnya sebagai *krama tamiyu lan krma sampingan* anggota etnis non-Bali dikenai dana *punia* penyepian dan dana *punia* lainnya sesuai *pararem*.

Bentuk integrasi antaretnis dengan etnis Bali adalah dalam bentuk perkawinan/satu ikatan keluarga. Bentuk integrasi perkawinan/keluarga intensitas integrasinya tidak saja mencakup integrasi antara suami dan istri, tetapi meluas dalam bentuk integrasi antar kerabat

suami dan kerabat istri. Hal itu dibenarkan oleh Ketut Maduarta, seperti misalnya perkawinan Aryana (45 tahun) dengan Sri Rukmini (40 tahun), Komang Prayuda (38 tahun) menikah dengan Tan Lie (28 tahun). Mereka merasakan jejaring sosial mereka semakin luas melalui perkawinan antaretnis. Hal ini tentu saja memperkuat integrasi mereka dengan etnis lainnya. Bentuk integrasi yang lainnya adalah dalam bentuk ikatan persekutuan/organisasi/perkumpulan antaretnis baik dalam kaitannya dengan aktivitas sosial seperti Suka Duka Paramitha Suci. Perkumpulan Olah Raga Bulu Tangkis, *Fitness/GYM*, Tinju, Tenis ataupun dalam hubungan pekerjaan dimana Ahok memperkerjakan Ketut Wija ataupun Slamet Prayoga. Simpul-simpul sosial seperti itu sangat berkontribusi dalam penguatan integrasi sosial lintas etnis dalam masyarakat multikultur. Penguatan integrasi antaretnis Bali dengan etnis-etnis lainnya juga dikontribusi oleh adanya mitos hubungan geneologis dan kultural. Hal itu misalnya dapat disimak dari cerita hubungan antara etnis Bali dengan etnis Tionghoa bagaikan hubungan dua saudara sekandung, kakak beradik.

Pengendalian sosial pada dasarnya menghubungkan penyimpangan dengan lemahnya ikatan terhadap lembaga-lembaga dasar masyarakat, keluarga, agama, sekolah. Kratz (1974 : 74) menyatakan bahwa pengendalian sosial pada dasarnya merupakan suatu cara bagi suatu kelompok, golongan atau lapisan masyarakat tertentu melaksanakan keseimbangan atau mengubah struktur nilai-nilai politik, kebudayaan, agama dan adat sopan santun. Sehubungan dengan hal itu, bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang beragama Hindu tujuan yang membimbing dan mengarahkan perilakunya adalah nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, seperti: *Tat Twam Asi*, *Tri Kaya Parisudha*, *Karma Pala*, *Yajna*, *Guru Bhakti*, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu juga dijadikan dasar dalam proses pengendalian sosial pada masyarakat desa-desa pakraman di Kecamatan Denpasar

Selatan, untuk menjaga modal sosial dan integrasi antaretnik. *Tat Twam Asi* merupakan cermin cinta kasih yang universal antara sesama. *Tat Twam Asi* yang berarti dia adalah engkau mencakup pengertian menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri, menolong orang lain berarti juga menolong diri sendiri. Jadi, nampak adanya solidaritas sosial yang tinggi. *Tat Twam Asi* adalah rasa toleransi yang menimbulkan rasa persaudaraan dan kerukunan hidup antar sesama manusia yang mewarnai tata susila Hindu, seperti rasa *tresna asih*, *anresangsa*, *catur paramita*, *tri kaya parisudha*, dan *yadnya*. Sikap-sikap semacam ini tentu akan dapat mengendalikan perilaku sosial anggota masyarakat Bali, lebih-lebih dengan adanya ideologi *trikaya parisudhadan karma phala* sehingga tidak terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang terpuji terhadap orang lain. Pengendalian sikap dan perilaku yang kurang terpuji dan pengembangan sikap welas asih dan *tresna bhakti* akan dapat menjadi kekuatan bagi kerukunan antarsesama umat manusia. Pemahaman individu atau anggota masyarakat terhadap nilai-nilai spiritual dan adat istiadat setempat akan mempengaruhi pola perilaku kehidupannya dalam berbagai sistem sosial seperti keluarga, *dadia*, banjar, desa adat/dinas dan kelembagaan lainnya.

Dalam masyarakat desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan, sistem sosial terkecil adalah keluarga inti atau di Bali. Hal itu disebut dengan istilah *kuren*. *Kuren* memainkan peranan yang penting dalam proses pengendalian sosial. Di dalam *kuren* inilah mulai disosialisasikan tentang nilai-nilai adiluhung yang harus direfleksikan oleh setiap anggota keluarga dalam perilakunya di masyarakat. Sistem sosial yang lebih besar dari keluarga adalah *dadia*. *Dadia* pada masyarakat Bali pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa *kuren*/keluarga inti dari garis keturunan kepurusa (garis keturunan dari pihak laki-laki). Masyarakat Bali di samping terikat dalam kesatuan keluarga dan *dadia* juga terikat dalam kesatuan

tempat tinggal bersama, kesatuan administrasi dan *seka* (Geertz, 1979). Dinamika sistem sosial budaya Bali mengacu pada konsepsi *desa, kala, patra* dan *dharma, artha, kama*.

Dalam dinamika sistem pengendalian sosial, masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan menggunakan berbagai teknologi, baik teknologi tradisional maupun teknologi modern (Foucault, 1997). Pandangan semacam ini sejalan dengan perspektif materialis, yang memandang bahwa teknologi memberikan sumbangan yang besar bukan saja dalam proses produksi, tetapi juga dalam proses perubahan sosial budaya dan sekaligus kontrol sosial (Suseno, 2001). Hal seperti ini juga dilakukan di desa-desa pakraman di Kecamatan Denpasar Selatan yaitu melalui pengeras suara, surat, atau pengumuman di tempat publik. Di samping itu dalam masyarakat juga berkembang bahasa sebagai sistem pengendalian sosial, karena tanpa adanya bahasa komunikasi secara sosial tidak mungkin berlangsung. Hal ini dapat disimak dari adanya kebiasaan menggunakan sindiran, ungkapan-ungkapan (*sesenggak-an, wangsalan, bladbadan*) seperti : *Yen ngae baju sikutang di deweke* (Kalau buat pakaian ukur pada diri sendiri). Artinya kalau berbuat kembalikan pada diri sendiri), gunjingan dan tidak bicara dalam masa waktu tertentu/*puik*, dalam proses pengendalian sosial. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan masyarakat desa-desa pakraman di Kecamatan Denpasar Selatan dalam proses kontrol sosial/pengendalian sosial untuk mempertahankan modal sosial dan integrasi antaretnik menggunakan pendekatan sekala dan niskala.

3. Kepolitan. Ini merujuk kepada cara-cara terorganisasi sebuah masyarakat dalam memelihara hukum dan aturan internal, juga cara-cara mengatur dan melakukan hubungan antar-masyarakat. Semua masyarakat mempunyai sistem politik, walaupun sifat sistem tersebut sangat bervariasi dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Sanderson, 2011: 61).

Parameter yang digunakan untuk membahas kepolitikan adalah kekuasaan, baik yang karismatik, tradisional ataupun legal rasional. Kekuasaan adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain tersebut mengikuti kehendaknya. Namun agar kekuasaan ini dapat dijalankan, maka diperlukan lembaga. Lembaga bisa berasal dari legal rasional yang di Bali disebut dengan Lembaga Desa Dinas, ada yang bisa berasal dari lembaga adat yang di Bali disebut sebagai Desa Pekraman. Selain itu, ada juga lembaga kemasyarakatan yang di Bali bisa dicontohkan dengan lembaga subak.

Di Bali dikenal 2 (dua) jenis desa yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas adalah desa dengan sistem pemerintahan dinas yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. Desa dinas adalah suatu kesatuan wilayah di bawah kecamatan dan merupakan bagian dari struktur vertikal pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Sedangkan desa adat atau disebut sebagai desa pakraman merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, merupakan kesatuan wilayah dimana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya (Windia dan Sudantra, 2016: 51). Desa pakraman dilandasi oleh konsep *Tri Hita Karana* yang terdiri dari *Parhyangan* yang terwujud dengan adanya pura-pura (*Pura Kayangan Tiga*), *Palemahan* menyangkut wilayah desa *pakraman* tersebut, dan *Pawongan* yaitu terdiri dari warga (*krama*) desa (Pitana, 1994: 39).

Menurut Wayan P. Windia dan I Ketut Sudantra desa pakraman di Bali adalah masyarakat hukum adat dengan ciri-ciri seperti dikemukakan di atas, namun selain itu dalam desa pakraman dijumpai pula ciri-ciri lain yang bersifat khusus, yang tidak dijumpai dalam jenis masyarakat hukum adat lainnya. Ciri khusus tersebut berkaitan dengan

landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, yang dikenal dengan filosofi *tri hita karana* yang secara literlijk berarti tiga (*tri*) penyebab (*karana*) kebahagiaan (*hita*) yaitu *Ida Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *bhuana* (alam semesta) dan *manusia* (manusia). Dalam keyakinan umat Hindu di Bali, kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya akan dapat dicapai apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsure-unsur *tri hita karana* tersebut (Windia dan Sudantra, 2016: 57-58).

Batasan lain tentang desa adat dikemukakan oleh Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Provinsi Bali. Desa adat menurut MPLA mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terkait oleh adanya tiga pura utama, yang disebut Pura Kayangan Tiga, atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut *Pura Kayangan* Desa. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan suatu kesatuan wilayah tempat para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya. Desa adat merupakan persekutuan masyarakat hukum secara tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di Bali sejak ratusan tahun yang lalu (Sardiana, dkk, 2011: 7).

Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya

bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001: 38).

Eksistensi Desa adat di Bali diakui oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) selain ketentuan itu. Sebelumnya, desa dinas diatur dalam beberapa undang-undang secara berganti, yang paling terkenal adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini cukup lama berlaku pada masa pemerintahan Soeharto sehingga sudah berurat berakar dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Bali (Sudantra dan Windia, 2012: 10).

Selanjutnya keberadaan desa adat dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana. Pengertian Desa adat mencakup dua hal, yaitu : (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu: (1) *Parahyangan* (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu *Hyang Widhi Wasa*), (2) *Pelemahan* (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya), dan (3) *Pawongan* (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya).

Aspek yang sangat dinamis dalam suatu wilayah desa adalah aspek penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel pokok demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang berdampak pada jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Meskipun kelahiran dan kematian menentukan perubahan penduduk secara alami, tapi saat ini

perpindahan penduduk memberi dampak yang signifikan. Tingkat perpindahan penduduk dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yang relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk. Salah satu penyebab perpindahan penduduk ke wilayah pedesaan adalah adanya potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang ada pada suatu desa memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan mengingat sektor pariwisata tersebut masih eksis di Bali.

Sampai dewasa ini, nampaknya desa adat masih memegang peranan penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan hukum adat di Bali. Desa adat di Bali, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, serta peranannya dalam memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Bali. Secara sosiologis, desa adat dengan seluruh aspek serta unsur-unsurnya dalam kenyataan masyarakat memang benar-benar dihargai, ditaati bahkan diyakini, karena di dalamnya bisa diabstraksikan suatu kehidupan dengan nilai luhur yang bersifat *relegius* (Sutha, 1988: 17). Sebagai suatu masyarakat hukum adat, maka desa adat dapat dilihat sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki tata susunan tetap, kekuasaan maupun harta kekayaan sendiri.

Aspek yang sangat dinamis dalam suatu wilayah desa adalah aspek penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel pokok demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang berdampak pada jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Meskipun kelahiran dan kematian menentukan perubahan penduduk secara alami, tapi saat ini perpindahan penduduk memberi dampak yang signifikan. Tingkat perpindahan penduduk dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yang relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang

menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk. Salah satu penyebab perpindahan penduduk ke wilayah pedesaan adalah adanya potensi bisnis. Potensi bisnis yang ada pada suatu desa memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan mengingat sektor perdagangan tersebut masih eksis di Bali.

Salah satu tempat yang menjadi tujuan para pendatang adalah di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki potensi bisnis dan terdapat banyak toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan termasuk jasa. Perkembangan wilayah di daerah ini menyebabkan bertambahnya jumlah toko yang diikuti dengan kawasan hunian atau perumahan baru. Hal inilah yang memicu kedatangan para migran yang ingin mencari pekerjaan di Kecamatan Denpasar Selatan, baik membangun toko, pedagang, maupun sebagai tenaga kerja. Persaingan di bidang ekonomi juga terjadi, seperti dalam kesempatan usaha maupun kesempatan kerja. Alih fungsi lahan persawahan dekat dengan jalan raya sebagian besar digunakan sebagai tempat bermukim atau membangun toko maupun warung yang dihuni oleh para migran.

Adanya dualisme antara kewenangan desa administrasi yang mengizinkan kedatangan para migran dan kewenangan *desa pakraman* dalam menjalankan fungsi adatnya. Kedatangan para migran ke wilayah administrasi desa merupakan hal yang biasa dan pemerintah mengizinkannya, tetapi dalam wilayah *desapakraman* penerimaan para migran memerlukan persyaratan yang ketat. Hal ini karena desa *pakraman* sebagai institusi sosial-kultural berlandaskan agama Hindu dan ideologi *Tri Hita Karana* memiliki kewajiban mengharmoniskan kehidupan warga masyarakatnya secara *sekala* dan *niskala*. Dalam penerimaan penduduk pendatang yang dilakukan oleh desa dinas yaitu dengan mencatat dan melayani kelengkapan administrasi penduduk pendatang. Hak dan kewajiban yang diperoleh penduduk pendatang sama dengan yang

didapatkan oleh penduduk asli. Sedangkan penerimaan penduduk pendatang oleh *desapakraman* yaitu hanya mencatat kedatangannya, tetapi untuk hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pendatang berbeda dengan penduduk asli. Perbedaan perspektif antara desa dinas dengan *desapakraman* mengenai penduduk pendatang dapat memunculkan ketimpangan dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya penduduk pendatang yang tinggal di *desa pakraman* dan sebagian besar memegang sektor ekonomi.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan tidak lepas dari adanya dualisme pemerintahan desa seperti dikemukakan di atas. Dualisme pemerintahan desa telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan persawahan. Desa Dinas dengan kewenangan yang dimilikinya secara legal formal dapat saja mengesahkan jual beli tanah persawahan sepanjang kelengkapan yuridis jual beli tanah tersebut sah dan legal. Untuk digunakan sebagai apapun desa dinas tidak mempermasalahkan asalkan pengurusan perijinannya diurus atau dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kondisi seperti ini *desa pakraman* tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat perjanjian yang diberikan oleh desa dinas memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini dibenarkan oleh I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan LPM Sesetan yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

Terhadap alih fungsi lahan persawahan *desa pakraman* tidak bisa berbuat apa-apa. Desa Dinaspun tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, mengingat jual beli tanah persawahan itu dilakukan sesuai peraturan yang ada yang berlaku secara nasional. Jual beli tanah dilakukan di hadapan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Kalau istilah hukumnya jual beli tanah yang dilakukan secara terang dan tunai. Sedang untuk penggunaan selanjutnyapun dilakukan sesuai dengan peraturan. Misalnya saja, bila mau digunakan untuk perumahan pun,

perijinannya legal dan lengkap, mau dibangun ruko, ijinnya pun ada. Jadi desa pakraman mau apa ? (hasil wawancara dengan I Made Sukaja, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kepaon sekaligus petani yang mengatakan sebagai berikut :

Memang semua perumahan baru dan bentuk-bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha lainnya dibangun berdasarkan ijin yang lengkap yang diketahui oleh desa dinas. Jadi semua alih fungsi lahan persawahan ini dilakukan secara resmi, legal, tidak melanggar peraturan. Dalam hal ini *desapakraman* memang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan oleh *desapakraman* janganlah keberadaan pendatang tersebut merusak adat, budaya, dan *awig-awig* desa (hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015)

Meskipun demikian, alih fungsi lahan persawahan yang terjadi tanpa konflik, meskipun hanya skala kecil yang berupa protes. Hal tersebut dituturkan oleh salah seorang aparat di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut :

Pernah ada laporan dari petani maupun pekaseh datang ke kantor saya melaporkan ada pembangunan, tetapi sebatas laporan saja karena lahan yang dibangun itu adalah lahan miliknya, saya tidak bisa melarang orang membangun dilahannya sendiri, pernah ada kejadian, ada orang membuat tanah kaplingan, dia buat jalan sendiri, kemudian pekasehnya melapor ke kantor, setelah saya ke lapangan ternyata lahan yang dijadikan kaplingan tersebut adalah lahan miliknya sendiri, sehingga saya tidak bisa berbuat banyak (hasil wawancara dengan Aparat Kecamatan Denpasar Selatan yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 14 April 2015).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Ida Ayu Ariani, Kaur Pembangunan yang petikan wawancaranya sebagai berikut :

Pernah ada petani melapor ke kami berkaitan dengan pembangunan di lahan persawahan, utamanya pada kawasan jalur hijau, setelah kami turun kami tanyakan kepada pemilik bangunan ditegaskan tidak boleh membangun, dan membongkar pondasi yang sudah dibuat, pemilik mau mengikuti arahan kami, namun itu hanya bersifat sementara, setelah beberapa hari bangunan itu dilanjutkan. Kemudian petani datang lagi kepada kami melaporkan keberlanjutan pembangunan tersebut, setelah kami tanyakan lagi, ternyata pemilik bangunan telah membawa rekomendasi dari salah satu anggota dewan, sehingga kami di desa tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kami tidak bisa lagi menangani hal tersebut, kami laporkan kepada dinas terkait, tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait, karena tidak ada tindak lanjut berarti kan diizinkan membangun dikawasan tersebut. Karena tidak ada respon dari dinas terkait jadinya saya pasrah, saya sebagai orang di desa tidak bisa berbuat banyak kecuali diam dan pasrah melihat pembangunan yang begitu marak (hasil wawancara dengan Ida Ayu Ariani, pada tanggal 8 April 2015).

Hasil kedua wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak setuju terjadinya alih fungsi lahan persawahan, terbukti mereka pernah melakukan protes. Namun pihak Kecamatan ataupun desa tidak dapat berbuat banyak karena alih fungsi lahan itu dilakukan di atas tanahnya sendiri ataupun adanya rekomendasi dari institusi yang lebih tinggi.

Dikaitkan dengan Teori Praktik dari Bourdieu (Harker, dkk, 2005: 9-22) yang menawarkan formulasi-generatif dengan rumus (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik*), memudarnya sistem *subak* dapat diterangkan *habitus* yang diartikan sebagai sistem *subak* akan menghasilkan hasil yang

berlipat ganda bila disertai dengan *modal*. Tapi sistem *subak* atau *habitus* dan *modal* ini tidak akan berfungsi bila sawah yang dapat dipandang sebagai ranah tidak ada.

Pierre Bourdieu dalam teori praksis sosialnya mengajukan konsep *habitus* dan *field*. Dalam kajian ini yang dimaksud *habitus* adalah sistem *subak*, sedangkan *field* adalah sawah. *Habitus* yang dalam hal ini adalah *subak*, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dalam menghadapi realitas sosial. Manusia dibekali dengan sederetan skema yang terinternalisasi untuk mempersepsi, mamahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. *Habitus* bisa dikatakan sebagai ketidaksadaran-kultural, yakni pengaruh sejarah yang dianggap alamiah. *Habitus* mendasari *field* yang dalam hal ini adalah sawah diartikan sebagai jaringan relasi antara posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. *Field* adalah semacam hubungan yang terstruktur serta tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan (Takwin, 2009: 114).

Masyarakat Bali juga memiliki cara pandang yang membagi kategori-kategori sosial menjadi tiga klasifikasi sebagai satu kesatuan yang juga bersifat komplementer. Pembagian tiga kategori ini karena masyarakat Bali memasukkan satu kategori yang memediasi pertentangan yang terjadi antara dua kutub oposisi biner untuk landasan mencapai titik keseimbangan tersebut. Namun demikian ini tidak menghilangkan sifat hukum *ma-bhineda* itu sendiri dalam rangka menciptakan keseimbangan dan harmoni tersebut. Seperti di dalam konsep dualitas *rwa-bhineda* di atas, pembagian tiga kategori ini juga menemukan ekspresinya dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Salah satu konsep yang paling utama adalah ideologi *Tri Hita Karana*.

*Tri Hita Karana* ini kemudian berkembang menjadi ajaran keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan sekaligus juga tentang ketergantungan satu sama lainnya dalam satu sistem kehidupan. Dikatakan demikian, karena, dalam pandangan masyarakat Hindu Bali, masyarakat selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal itu dilandasi oleh satu kesadaran bahwa alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lainnya terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan. Dengan demikian nilai utama masyarakat Hindu Bali adalah keseimbangan atau keselarasan itu sendiri (Dharmayudha dan Cantika, 1991:6).

Prinsip utama keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan lingkungan alamnya ini menjadi pandangan dunia masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem pengetahuannya, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pandangan ini sangat berguna bagi masyarakat Bali dalam usaha memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Karena prinsip-prinsip utama ini menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan sikap, nilai-nilai, perilaku, serta pola hubungan sosial masyarakat Bali, dan prinsip-prinsip ini terinternalisasi serta terinstitusionalisasi dalam struktur sosial kehidupan masyarakat Bali, maka dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai dari ideologi *Tri Hita Karana* ini menjadi *corevalues* dalam kehidupan budaya masyarakat Bali itu sendiri. *Core values* ini dapat juga menjadi basis bagi standar yang digunakan institusi-institusi utama seperti keluarga, kelompok kekerabatan, dan desa adai di Bali mengevaluasi anggota-anggotanya. Standar inilah yang menjadi kriteria untuk memberikan kesempatan kepada setiap insan manusia Bali mencapai kemajuan dan memperoleh *reward* dari sikap dan tindakannya di masyarakat.

Implikasi dari adanya pandangan yang mengandung *core values* seperti di atas, unsur-unsur dalam struktur sosial yang membangun masyarakat Bali menerapkan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* itu sesuai dengan lingkungan kehidupannya. Pada tataran individu, manusia Bali sebagai lingkungan dunia mikrokosmos (*buana alit*), misalnya, diyakini bahwa kehidupan manusia merupakan wujud yang dinamis dari gerak hubungan unsur-unsur *atman* (jiwa), *prana* (tenaga, kekuatan), dan *sarira* (unsur badan kasar) (Kaler, 1983). Berdasar dan setangkep dengan itu maka pranata-pranata sosial masyarakat Bali yang lebih luas sebagai lingkungan dunia makrokosmosnya, dari organisasi keluarga sebagai pranata sosial yang terkecil, kelompok kekerabatan (klan), desa adat, organisasi *subak*, hingga masyarakat Bali secara keseluruhan, menerapkan pola yang sama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dari ketiga unsur di atas dalam membangun pola aktivitas budaya sehari-hari melalui peneguhan pelaksanaan konsep-konsep *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* (Gorda, 1996).

Melalui konsep *parhyangan*, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa segala yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah bersumber dari dan, karena itu, pasti akan kembali menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran ini mendorong manusia dan masyarakat Bali untuk meningkatkan *crada dan bhakti* (iman dan taqwa) terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Waca* sesuai dengan ajaran-ajaran agama, keyakinan, serta tradisi yang dianutnya. Tidak mengherankan karena itu pada setiap lingkungan pranata sosial di Bali selalu ada di bangunan tempat suci untuk memuliakan Tuhan sebagai wahana bagi manusia berhubungan dengan Tuhan. Begitu pula diyakini bahwa segala produk budaya dan peradaban manusia dan masyarakat Bali diciptakan adalah sebagai persembahan kepada Tuhan atau kepada para Dewa yang sering disebut dengan *yadnya*. Ini dapat di lihat, misalnya, dari makna-

makna simbolik yang religius dominan bersembunyi dan terkandung pada pelaksanaan *yadnya*, aktivitas tradisi atau adat, serta hasil-hasil karya budaya dan kesenian Bali (Dhannayudha dan Cantika, 1991; Gorda, 1996; Sudiasa, 1992).

Melalui konsep *pawongan*, selanjutnya, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa pada hakikatnya manusia itu sama sebagai makhluk dan hamba Tuhan yang berbudaya, dan, karena itu, perlu dikembangkan sikap saling *asah, asih, dan asuh* serta bekerja sama demi tujuan hidup manusia bersama sebagai makhluk sosial (Abdulsyani, 1987). Prinsip ini relevan dengan ajaran Hindu dalam Weda yang menjadi dasar keyakinan masyarakat Hindu Bali, yaitu ajaran tentang *Tat Twam Asi* yang secara harfiah berarti "ia adalah kamu juga". Dengan ajaran *Tat Twam Asi* ini dimaksudkan bahwa sesungguhnya semua manusia itu adalah *satu* dan sama sebagai makhluk Tuhan. Karena itu, diyakini bahwa menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri pula (Mantra, 1993; Parisada Hindu Dhanna, 1968).

Dalam praktiknya, terutama di lingkungan keluarga, ajaran ini terefleksi dalam pelaksanaan upacara *manusa yadnya, pitra yadnya, dan rsi yadnya*. Dengan upacara *manusa yadnya*, orang tua mewujudkan rasa syukurnya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah dikaruniai anak-anak dan karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak *suputra* (anak-anak yang baik). Sebaliknya, anak-anak memiliki kewajiban untuk hormat dan membayar hutang terakhir kepada orang tua melalui upacara *pitra yadnya* yang diyakini orang Bali dapat mengantarkan *atman/jiwa* orang tua mereka menuju kesatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa (*moksa*). Upacara *rsi yadnya*, selanjutnya, merupakan bentuk penghormatan seluruh anggota keluarga kepada para *rsi* dan guru karena

mereka telah memberikan ilmu pengetahuan suci yang digunakan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat seluruhnya (Gorda, 1996).

Hubungan harmonis sebagai aplikasi ajaran *Tat Twam Asi* ini tidaklah hanya terjadi di lingkungan keluarga saja. Dalam kehidupan sosial masyarakat Bali pada umumnya dikembangkan azas-azas hubungan sosial dalam hidup bermasyarakat, seperti azas *suka duka; paras paras* (hidup rukun); *salunglung sabayantaka* (baik buruk, manis pahit dirasakan bersama); dan azas *saling asah asih, dan asuh*; serta kehidupan gotong royong yang kental mewarnai aktivitas kemasyarakatan di *desa adat* dan pranata-pranata sosial lainnya (Dharmayudha dan Canlika, 1991).

Unsur yang ketiga dari ajaran *Tri Hita Karana* adalah *palemahan*. Melalui konsep ini, manusia dan masyarakat Bali meyakini perlunya hubungan yang harmonis antara manusia dengan unsur-unsur dan kekuatan alam lainnya. Hubungan seperti ini disimbolkan dengan ungkapan "*kadi manik ring cecepu*" (seperti janin dalam rahim ibunya) (Putra, 1973; Kaler, 1983). Dengan ini manusia Bali mengembangkan kesadaran bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari alam, karena alamlah yang memberi manusia kesejahteraan. Bahkan manusia Bali meyakini bahwa unsur-unsur dan kekuatan alam ini adalah saudara manusia seperti disimbolkan bahwa setiap bayi yang lahir selalu bersama empat saudaranya (*ari-ari*, air ketuban, lamas/pembungkus ari-ari dan air ketuban, dan darah). Wujud cinta kasih manusia Bali terhadap unsur-unsur dan kekuatan alam semesta ini diekspresikan dalam bentuk upacara korban kepada para *bhuta* (*buthayadnya*), di samping secara aktif memelihara dan melestarikan alam lingkungannya (Gorda, 1996; Atmadja, 1998).

Deskripsi di atas tentu masih bersifat supel. Ada banyak elaborasi yang dapat dijelaskan yang menggambarkan aktivitas riil budaya masyarakat Bali yang mencerminkan pelaksanaan unsur-unsur *core values* di atas,

baik pada tataran individu, keluarga, kelompok kekerabatan, *seka*, *subak*, desa adat, organisasi fungsional, maupun pada kelompok masyarakat Hindu Bali secara keseluruhan. Pada level manapun ideologi ini dipraktikkan, dasarnya adalah hubungan harmonis antara ketiga eksistensi di atas haruslah tetap dijalankan. Di lingkungan desa, misalnya, desa yang memiliki komitmen untuk melaksanakan ideologi *Tri Hita Karana* ini, pada struktur permukaannya, setidaknya, desa harus memiliki *parhyangan* desa sebagai tempat warga desa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa; hubungan antar masyarakat desa haruslah demokratis dan harmonis: serta adanya upaya pemeliharaan lingkungan baik secara *sekala* maupun *niskala*.

Sejalan dengan gagasan *Tri Hita Karana* di atas, konsep klasifikasi tiga dimensi juga tampak dalam penerapan pada kehidupan sosial budaya masyarakat Bali adalah konsep *triangga*, *trimandala*, dan *triloka*. Dikatakan setangkup karena konsep-konsep itu juga merupakan manifestasi dari adanya relasi oposisi biner pada hubungan antara manusia sebagai unsur *buana alit* dengan lingkungan kosmiknya sebagai *buana agung*. Konsep *triangga* menjelaskan bahwa manusia harus memperlakukan struktur diri dan masyarakatnya sesuai dengan kedudukan *hulu-teben* (*atas-bawah/suci-leteh*) dari masing-masing unsur. Konsep ini menjelaskan adanya tiga unsur badan (diri, bangunan, organisasi, sistem nilai) sesuai dengan kedudukan *hulu-teben*, yaitu: *utama angga*, *madya angga*, dan *nista angga*. Konsep *trimandala*, selanjutnya, menjelaskan penataan atau pengaturan lingkungan (rumah, pura, desa) sesuai dengan kedudukan *hulu tebenya* menjadi tiga bagian, yaitu: *utama mandala*, *madia mandala*, dan *nista mandala*. Akhirnya, konsep *triloka* menjelaskan kepercayaan masyarakat Bali bahwa alam semesta kosmik ini sesungguhnya terdiri dari tiga bagian sesuai kedudukan *hulu tebenya*, yaitu dunia *swah loka* (duniannya para Dewa), dunia *bhwah loka* (duniannya manusia), dan dunia *bhur loka*

(dunianya tumbuh-tumbuhan, binatang, dan roh-roh yang lebih rendah derajatnya dari manusia).

Selain kepolitikan yang legal rasional dalam bentuk lembaga Desa Dinas dan yang bersifat tradisional dalam bentuk Desa Pekraman seperti yang telah dibahas di atas, di Bali termasuk di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat banyak kepolitikan yang berbentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sudah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat tradisional adalah lembaga subak. *Subak* merupakan organisasi petani pengelola sistem irigasi lahan sawah. Menurut Sirtha (2008: 8) fungsi utama *subak* adalah mengatur pengairan untuk pertanian dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat *subak* antara lain menata jaringan irigasi, mengatur pembagian air, mengatur penggiliran pola tanam, dan melaksanakan kegiatan upacara. Pelaksanaan organisasi *subak* berdasarkan hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Hindu Bali.

Secara organisasi, *subak* berada di luar *banjar* atau desa adat. Karena itu, organisasi *subak* bisa melibatkan orang-orang atau petani-petani dari beberapa *banjar* atau *desa adat*. Sebagai satu organisasi *adat*, *subak* juga memiliki *klian subak*, aturan *subak*, dan *purasungsungan subak.bedugul*. Secara *sekala*, organisasi ini memang merupakan organisasi yang mengelola sistem irigasi pada lahan-lahan pertanian di Bali. Tetapi, secara *niskala*, organisasi *subak* juga memiliki pusat aktivitas sosio-religius pada Pura-pura *subak bedugul*.

Dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, maka pranata *subak* ini menjadi pudar. Hal itu disebabkan salah satunya karena aliran irigasi sudah tidak cukup untuk mengairi persawahan yang ada. Kondisi ini diungkapkan oleh Wayan Suastika, pengamat hama dan penyakit tanaman sebagai berikut :

Mengapa *subak* menjadi hilang, karena irigasi yang menjadi andalan *subak*, airnya sudah tidak mencukupi lagi. Irigasi masih ada tapi tidak ada

airnya, saya juga tidak tahu persis kenapa tidak ada air, apa mungkin karena aliran airnya ditutup oleh adanya perumahan, saya juga kurang tahu. Petani Sasetan lebih banyak mengandalkan curah hujan, karena sasetan adalah daerah hilir bila hujan akan banjir, bila musim kemarau seperti sekarang petani tidak bisa berbuat apa-apa karena kekurangan air. Sebetulnya kalau menurut teori semakin kecil luas sawah kan seharusnya air semakin banyak, justru terjadi kebalikannya, padahal infrastruktur irigasi terus diperhatikan oleh Dinas Pertanian, malahan sekarang ada pola khusus yang bekerjasama dengan TNI, bilamana ada saluran yang tersumbat maka Babinsa langsung melaporkan hal tersebut untuk diambil tindakan, tapi kenyataannya hasilnya belum ada hasil. Dengan adanya pembagian air utamanya dari dam oongan 1 dan dam oongan 2, petani semakin terpuruk akibat kurangnya air. Akhirnya selanjutnya, ya, itu tadi, subak pelan-pelan akan hilang (hasil wawancara dengan Wayan Suastika, pada tanggal 17 Februari 2016).

Mengenai irigasi *subak* yang sudah tidak ada lagi, Ketut Satariawan juga mempunyai pendapat yang sama yang diungkapkan sebagai berikut :

Sistem pengairan disini mempergunakan mesin sedot, karena irigasi disini sudah tidak berfungsi lagi. Irigasi sudah ditutup atau dihalangi oleh beton rumah. Untuk mendapatkan air, got dibendung kemudian airnya dinaikkan memakai mesin pompa, bapak lihat sendiri airnya, bau..karena limbah dibuang ke got. Kalau tidak memakai pompa maka tidak akan mendapatkan air. Bagaimana bisa hidup, di satu sisi susah untuk mendapatkan air untuk mengairi sawah. Kadang-kadang juga diprotes oleh masyarakat sekitar karena air got yang bau, akibat got dibendung kemudian airnya dipergunakan untuk menyiram bunga atau sayuran, karena ada juga beberapa lahan disini dikontrakkan oleh pemiliknya ditanami sayur mayor (hasil wawancara dengan Ketut Satariawan, pada tanggal 17 Februari 2016).

Selain masalah irigasi, masalah lain yang menyebabkan sistem *subak* ini menghilang karena sekarang ini pengerjaan sawah tidak lagi dilakukan secara gotong royong, namun digantikan oleh traktor, sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Mardia, *PekasehSubakKapaon* dan petani sebagai berikut :

Beda pada zaman dulu petani dalam mengolah sawah mempergunakan sapi, tanam padi dengan gotong royong, waktu pengerjaannya atau prosesnya yang lama, Kalau pake sapi pengerjaan lahan bisa sampai 20 hari, sedangkan pakai traktor hanya hitungan hari. Tapi sekarang serba cepat dan gampang, mengolah sawah sudah pake traktor dengan cara sewa, tanam padi dengan cara ngongkosin. Jadi, menanam padi sekarang tidak dengan sistem *subak* lagi yang mengutamakan gotong royong (Hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Sebagai akibat memudarnya sistem *subak*, fungsi pekasehpun menjadi berubah, salah satunya adalah ikut mengesahkan jual beli tanah yang ada di wilayahnya, seperti yang dituturkan oleh I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan Ketua LPM Ssetan sebagai berikut :

*Subak* sudah tidak ada, lahan sudah tidak ada, petani juga tidak ada, sedangkan pekaseh masih ada, sehingga sekarang *pekaseh* punya fungsi lain yaitu ikut mengesahkan jual beli tanah yang ada di wilayahnya, saya juga tidak tahu kenapa pekaseh ikut mensahkan jual beli tanah, apa mungkin dari BPN yang mensyaratkan seperti itu saya juga kurang tahu, tapi yang saya dengar bahwa pekaseh ikut mensahkan jual beli tanah, artinya bahwa pekaseh sudah tidak lagi mengurus air, musim tanam, yang diurus sekarang adalah mensahkan jual beli tanah, itu artinya pekaseh sudah beralih fungsi. Kalau dulu masih ada sawah, pekaseh mendapat hasil dari mengelola tanah negara, tetapi sekarang tanah negara sudah diambil alih oleh desa karena pura ulundanu sudah diurus oleh desa, tanah

negara tersebut luasnya kurang lebih 30 are, tapi dari 30 are itu diambil oleh desa sumerta kira-kira seluas 6 are, karena tanah pelabe pura di sumerta dijadikan sekolah, kenapa tanah tersebut diberikan, karena kita tidak punya surat kepemilikan tanah tersebut, hanya mengakui saja tanah negara tersebut, sehingga hasil jerih payah menjadi pekaseh dari mensahkan jual beli tanah, itu kira-kira (hasil wawancara dengan I Made Sukaja, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa sistem *subak* yang dikelola secara kekeluargaan kian memudar di Kecamatan Denpasar Selatan. Memudarnya sistem *subak* tersebut salah satunya disebabkan karena sistem irigasi yang menjadi tulang punggung sistem *subak* sudah tidak berfungsi lagi, yang sebagian besar disebabkan oleh maraknya perumahan-perumahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Selain tidak berfungsinya sistem irigasi, hal lain yang menyebabkan memudarnya sistem *subak* adalah karena tidak ada lagi gotong royong masyarakat untuk mengerjakan sawah, tapi sudah digantikan oleh traktor. Berbeda dengan jaman dulu ketika pengerjaan sawah masih dikerjakan dengan sistem *subak* yang mengandalkan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan oleh masyarakat adat sebagai suatu satuan keluarga besar. Namun sayangnya, saat ini gotong royong ini terutama dalam pengerjaan sawah sudah sangat jarang dilakukan.

Suatu lembaga atau organisasi sebagaimana halnya *subak* dapat berjalan dengan baik apabila organisasi tersebut memiliki aturan-aturan serta sangsi-sangsi yang jelas. *Subak* sebagai pelaku kegiatan pertanian khususnya kegiatan pertanian lahan basah (persawahan) dan pelaku kegiatan pengalihfungsian lahan persawahan seharusnya memiliki aturan-aturan dan sangsi-sangsi kuat dalam mengatasi terjadinya kegiatan alihfungsi lahan persawahan. *Subak*

seharusnya menjadi pilar utama dalam pencegahan alihfungsi lahan.

Namun kondisi ini tidak mampu dilakukan oleh *subak* khususnya *Subak Kerdung*. Aturan-aturan pelarangan kegiatan alihfungsi lahan sawah dan sangsi-sangsi terkait pelanggaran aturan pelarangan kegiatan alihfungsi lahan sawah tidak mampu diwujudkan dalam *awig-awig* ataupun dalam bentuk *perarem subak*. *Awig-awig* dan *perarem* hanya mengatur teknis melakukan kegiatan pertanian di *subak* tersebut. Kondisi ini dibenarkan oleh seluruh informan kunci (100%) menyatakan bahwa *awig-awig* dan *perarem subak* itu hanya mengatur mengenai teknis kegiatan pertanian di *Subak Kerdung*.

Tidak adanya aturan dan sangsi tertulis yang disepakati bersama anggota *subak* dalam usaha mencegah terjadinya alihfungsi lahan di *Subak Kerdung*, menjadi alasan kuat maraknya kegiatan penjualan lahan. Aturan-aturan dan sangsi-sangsi yang lemah dari *Subak Kerdung* juga mengakibatkan tidak tertatanya sistem jual beli lahan di daerah *subak*. Dan ini juga yang mengakibatkan lahan-lahan sawah di *Subak Kerdung* banyak dikuasai oleh orang-orang di luar wilayah *subak* bahkan luar kota. Kondisi ini terlihat jelas karena *Pekaseh Subak Kerdung* tidak memiliki data kepemilikan lahan persawahan di sepanjang wilayah *subak*-nya. Hal ini sama dengan pendapat Wibowo dalam Prakarsa (2010: 18) berpendapat bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Kelembagaan merupakan suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang

diinginkan (North, 1990: 14). Menurut Bulkis (2005: 9) kelembagaan berarti seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Bobi, 2002: 1). Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam organisasi menjadi suatu kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk mewujudkan kepentingan umum atau bersama (North, 1990: 16). Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian dilihat dari kode etik dan aturan main, sedangkan sebagian lagi dilihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan manajemennya. Saat ini kelembagaan biasanya dipadukan antara organisasi dan aturan main. Kelembagaan merupakan suatu unit sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut (Etzioni, 1982: 7).

Kehadiran kelembagaan formal yang diperkenalkan oleh agensi pembangunan modern dianggap justru banyak menjadi *impinging factor* (faktor pengganggu stabilitas sistem nafkah asli pedesaan), dan mengalami kegagalan dalam menjalankan misi pemerataan ekonomi dan menjamin kehidupan pedesaan secara lestari. Modernitas pedesaan telah memunculkan sederetan dampak yang tidak diinginkan berupa ketimpangan akses terhadap sumber-sumber nafkah bagi masyarakat di pedesaan dan lumpuhnya kelembagaan penjamin ketahanan hidup asli (Dharmawan, 2007 : 72).

Seperti yang dikatakan oleh Dharmawan (2007: 72) di atas, bahwa modernitas pedesaan juga turut mendorong terganggunya stabilitas sistem nafkah asli pedesaan dan lumpuhnya kelembagaan penjamin ketahanan hidup dari pertanian. Padahal modernisasi yang melanda berbagai kawasan dewasa ini termasuk yang terjadi di Kecamatan

Denpasar Selatan mengidentifikasi terlibatnya masyarakat desa dalam proses tersebut. Realisasi dari modernisasi tersebut adalah bentuk perkembangan yang menyangkut aspek sosial ekonomi. Namun pada kenyataannya modernisasi itu tidak bisa menjamin adanya pemerataan sosial ekonomi khususnya dalam hal kesejahteraan.

Modernisasi merupakan upaya negara maju untuk memodernisasikan negara berkembang agar negara-negara berkembang meniru negara maju dalam segala aspek, terutama tentu saja dalam *mode of proction* kapitalisnya. Jiwa modernisasi yang didasari oleh Revolusi Industri adalah mulainya manusia dianggap sebagai faktor produksi, sehingga terjadi penghisapan tenaga kerja manusia oleh manusia. Secara ringkas dapat dikatakan, apa yang dimaksud dengan modern tersebut memiliki banyak kesamaan dengan paham kapitalisme, yaitu misalnya teknologi maju yang efisien yang tentu saja untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai ekonomis dan efisien yang ada dalam modernisasi adalah nilai-nilai kapitalisme juga. Intinya adalah, hanya dengan membentuk masyarakat kapitalis modern, negara-negara terbelakang bisa meraih kemajuan.

Usaha modernisasi oleh Amerika Serikat adalah usaha menjalarnya pola-pola ekonomi kapitalis ke seluruh dunia, dengan mencita-citakan masyarakat yang mengandung semua yang baik dan sempurna. Modernisasi yang lahir di Barat akan cenderung ke arah Westernisasi, memiliki tekanan yang kuat meskipun unsur-unsur tertentu dalam kebudayaan asli negara ketiga dapat selalu eksis, namun setidaknya akan muncul ciri kebudayaan Barat dalam kebudayaannya (Schoorl, 1988). Modernisasi yang masuk melalui *change agents* (Harison, 1988), akan cenderung kepada homogenisasi sistem ekonomi, sehingga akhirnya modernisasi, pembangunan, dan kapitalisme satu sama lain akan memiliki arti yang semakin konvergen. Teori utama yang dipakai dalam modernisasi adalah teori Rostow

tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. (Swarsono Alvins, 2004).

Menurut Harison (1988), modernisasi akan berpengaruh terhadap perubahan susunan dan pola masyarakat, dengan terjadinya diferensiasi struktural. Demikian juga dengan kapitalisme yang telah dibuktikan sejarah, serta dikritik oleh Marx, akan menimbulkan struktur yang penuh konflik (Soekanto, 2006)

Teori Modernisasi yang berlandaskan teori evolusi, mengharapkan suatu perubahan masyarakat secara bertahap, dari keadaan serba sama kepada semakin terdiferensiasi tokoh modernisasi klasik, misalnya Colleman menginginkan bahwa individu yang modern diharapkan akan memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi.

Dalam hal ini aksesibilitas adalah kemampuan menerima sesuatu oleh anggota masyarakat dan daya terima masyarakat pada umumnya (Morris, 1981: 8). Inovasi diartikan sebagai masuknya ide, praktek atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat (Rogers, 1981:29). Masuknya nilai perilaku dan teknologi baru ke dalam suatu putaran budaya masyarakat dan setiap anggota menerima dengan kesadaran sehingga terjadi internalisasi. Sedangkan internalisasi adalah proses perluasan identitas. Identitas itu diartikan ke dalam satu kristalisasi konsep yang disebut sebagai empati dan konsep mempunyai pengertian kurang lebih adalah sebagai akibat dari aspek sosial ekonomi sehingga tumbuh motivasi untuk mewujudkan aspek tersebut. Kemampuan psikis seperti diatas berkaitan pada peningkatan kemampuan memperbandingkan ke dalam diri sendiri dengan keadaan orang lain. Fenomena itu mengejawantah di dalam kemampuan melihat potensi diri dengan tolak ukur dari luar.

Lebih jauh, Inkeles menyatakan manusia modern adalah terbuka terhadap pengalaman baru, independen terhadap bentuk otoritas tradisional, dan percaya terhadap

ilmu pengetahuan. Jika kita lihat, bahwa apa yang diinginkan adalah sesuai dengan pribadi dan pola hidup masyarakat kapitalis. Intinya, apa yang dimaksud dengan modernisasi adalah juga nilai-nilai kapitalisme itu sendiri, yaitu mengejar kemajuan, konsumsi tinggi, efisiensi, ekonomi uang, dan lain-lain (Budiman Arif, 2000).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Sanderson (2011: 61) kepolitikan juga merujuk kepada cara-cara terorganisasi sebuah masyarakat dalam memelihara hukum. Hukum memerankan peran yang penting dalam kaitanya dengan hubungan kerja antara petani atau keluarga petani yang beralih profesi tidak menjadi petani. Hal itu dituturkan oleh Made Susastra sebagai berikut:

Setelah keluarga saya tidak punya sawah lagi, lalu saya bekerja disalah satu perusahaan yang berlokasi disebuah ruko di Jalan Tukad Pakerisan. Pertama saya dikontrak selama 6 bulan, terus diperpanjang lagi 6 bulan. Eh, nggak taunya terus diperpanjang terus setiap 6 bulan. Saya jadi bertanya-tanya apa aturan gitu ya? kalau begitu kapan saya jadi karyawan tetap. Tapi saya nggak mau pusing, saya banting setir menjadi pedagang. Awalnya sih banyak merugi karena belum pengalaman. Sekarang sih, penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sebagai karyawan yang dikontrak-kontrak terus, nggak ada habis-habisnya (hasil wawancara dengan Made Susastra, pada tanggal 11 Februari 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketut Gajendra sebagai berikut:

Tadinya saya ingin keluar dari kehidupan petani. Keluarga saya sudah tidak punya sawah lagi. Saya mencoba bekerja disalah satu cafe yang ada di wilayah Legian, Kuta. Tapi sistem kerjanya sistem kontrak yang diperpanjang setiap 6 bulan. Sekarang sudah 3 tahun saya bekerja di café itu, namun status saya masih karyawan kontrak. Saya nggak tau apa memang begitu peraturannya, tapi saya sih gak

masalah karena penghasilannya lumayan besar, belum lagi tip-nya (hasil wawancara dengan Ketut Gajendra, pada tanggal 11 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa upaya untuk mencari nafkah di luar pertanian bagi generasi muda petani di Kecamatan Denpasar Selatan terbentur pada sistem hubungan kerja dan sistem kontrak yang selalu diperpanjang terus. Sebagian tidak tahan dengan sistem kontrak tersebut yang akhirnya sukses menjadi pedagang, namun sebagian yang lain bertahan karena menurutnya penghasilan dari profesi yang ditekuninya relatif lebih besar dari penghasilan petani sehingga yang bersangkutan tidak peduli atas statusnya sebagai pekerja kontrak.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan di Kecamatan Denpasar Selatan atau Bali pada umumnya, mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak yang diperpanjang terus menerus. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur sistem kontrak yang disebut dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dengan istilah Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) melarang sistem kontrak yang dilakukan untuk terus menerus. Perpanjangan sistem kontrak hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali saja untuk jangka waktu yang sama dengan periode kontrak pertama. Jadi, bila seorang karyawan pada periode pertama dikontrak selama 6 bulan, maka perpanjangan kontraknya tidak boleh lebih dari 6 bulan dan perpanjangan kontrak itu hanya boleh 1 kali saja. Setelah perpanjangan kontrak tersebut, karyawan tidak boleh dikontrak lagi, tapi harus diangkat menjadi karyawan tetap.

Meskipun ada peraturan perundang-undangan yang tidak memperbolehkan sistem kontrak yang dilakukan secara terus menerus, tapi perusahaan-perusahaan di Bali pada umumnya masih menggunakan sistem kontrak yang

terus menerus tersebut. Hal itu disebabkan karena selama ini tidak ada sanksi yang tegas dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Selain itu dari pihak pekerja sendiri, tidak ada pilihan lain untuk menyetujui sistem kontrak tersebut, apalagi kalau penghasilannya dirasakan sudah cukup besar.

4. Pembagian kerja secara seksual dan ketidaksamaan secara seksual ini meliputi cara dimana lelaki dan perempuan dialokasikan pada tugas dan peran tertentu dalam pembagian kerja sosial. Ia juga mencakup cara tingkat sejauh mana lelaki dan perempuan menduduki posisi tingkatan, kekuasaan, dan hak-hak yang tidak sama dalam sebuah masyarakat. Walau pembagian kerja secara seksual dan ketidaksamaan secara seksual merupakan kenyataan universal, ada sangat banyak variasi bentuknya di antara berbagai masyarakat (Sanderson, 2011: 62).

Pembagian kerja seksual adalah pembagian kerja yang didasarkan atas jenis kelamin. Pada umumnya di masyarakat ada pembagian kerja seksual di mana beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lain semata-mata dilakukan oleh laki-laki. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas disetiap masyarakat ini membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja seksual yang berbeda.

Hal ini berkaitan dengan visi yang melihat bahwasannya kaitan antara ada tidaknya dominasi dalam pembagian kerja seksual dengan struktur masyarakat dan perubahan sosial bisa dibagi ke dalam empat golongan. Pertama, mereka yang mengatakan pembagian kerja seksual berlaku universal, tetapi selalu berarti dominasi laki-laki. Kedua, ada yang mengatakan bahwa posisi perempuan secara tradisional tidak tersubordinasi, tetapi dengan kolonialisme mejadi termarginalisasi. Ketiga, adapula yang mengatakan bahwa posisi perempuan selalu tersubordinasi baik pada zaman feodal, kolonial, pasca kolonial, tetapi bentuk subordinasinya berbeda-beda sesuai dengan sistem yang ada saat itu. Keempat, ada yang mengatakan bahwa

subordinasi terdapat pada saat perempuan terkungkung dalam lingkup domestik dalam sistem feodal yang masih patriakal. (Saptari dan Holzner, 1997: 75)

Situasi budaya yang mengutamakan laki-laki atau dikenal budaya patriarkhi sebagaimana halnya masyarakat Bali termasuk masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan melihat peran laki-laki dan perempuan. Peran tradisional dahulu menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah di sektor publik dan perempuan melakukan aktifitas dalam rumah tangga di sektor domestik.

Masyarakat mempunyai *stereo type* bahwa perempuan bekerja pada sektor domestik, di rumah, di dapur untuk mempersiapkan makanan bagi suami dan anak. Laki-laki bekerja di sektor publik sebagai pegawai/karyawan dan petani, ranah di mana laki-laki bisa mendapatkan upah/gaji atau penghasilan, kondisi yang umum pada masyarakat, sama sekali tidak ada profesi yang dijalankan oleh perempuan, kecuali sebagai istri dan ibu di rumah. Laki-laki ditempatkan pada posisi primer, sedangkan perempuan sekunder. Young (2005: 25) menyebutkan bahwa struktur sosial gender membuat perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembagian kerja. Anak perempuan juga dilekatkan dengan kegiatan, seperti mencuci dan menyiram tanaman. Anak perempuan bertugas membantu ibu dalam pekerjaan domestiknya. Anak laki-laki dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik. Oleh karena itu beberapa menunjukkan gambar anak laki-laki yang sedang belajar. Ada nilai atau bobot positif kepada pekerjaan di sektor publik dan sebaliknya, bobot yang rendah pada pekerjaan di sektor domestik. Kapitalisme memperkuat seksisme dengan memisahkan pekerjaan bergaji dengan pekerjaan domestik. Patriarki membawa laki-laki pada posisi yang diuntungkan terhadap akses ekonomi dan pelayanan personal (Saulnier, 2000: 56). Masyarakat juga menempatkan perempuan dan laki-laki secara stereotipikal.

Laki-laki dianggap pintar, kuat, pantas untuk bekerja di ranah publik, dan pantas memimpin. Sementara perempuan lembut, pandai mengasuh anak, pandai merawat sehingga tanggung jawab pekerjaan domestik lebih cocok diberikan kepada perempuan.

Peran gender dominan merupakan peran gender tradisional. Peran yang menunjukkan perempuan menjalankan fungsi-fungsi dalam sektor domestik, sebagai istri atau ibu, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani suami (Sunarto, 2000: 138). Seluruh waktu bahkan sampai dengan masa tuanya, perempuan berbakti untuk keluarga. Sementara laki-laki menjalankan fungsi-fungsi sektor publik, sebagai pencari nafkah. Laki-laki bekerja di kantor, di sawah, atau sebagai aparat keamanan.

Masyarakat patriarki di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan yaitu ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Kebanyakan sistem patriarki juga adalah patrilineal. Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feministas. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.

Keuntungan patriarki bagi perempuan adalah rasa kenyamanan yang didapatkan misalnya dalam masyarakat banyak perempuan menggunakan sistem patriarki sebagai pelindung diri dan harus dilindungi laki-laki agar tidak

terancam keamanannya. Sedangkan kerugian patriarki buat perempuan juga tidak kalah banyaknya, dalam keluarga khususnya penganut Patrilineal akan mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam penerus marga misalnya, kemudian pembagian harta warisan, kepemilikan atas perempuan, belum lagi kasus kriminal seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dilapangan pekerjaan publik dan lain sebagainya yang menjadi budaya dan sistem patriarki pada masyarakat Bali termasuk masyarakat Denpasar Selatan. Ketimpangan kelas berdasarkan jenis kelamin ini sepertinya kurang dipersoalkan di Indonesia karena sistem masyarakatnya yang bersifat patriarkal membenarkan hal ini berlangsung. Bahkan hal ini dianggap wajar karena pembagian peran kedua jenis kelamin ini memang dipersiapkan sesuai dengan nilai-nilai kodratnya masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan.

Menurut MC Donough dan Horrison (1978: 72) menyatakan bahwa dilain pihak ada juga yang membedakan dua aspek dari patriarkhi, yaitu sebagai kontrol terhadap reproduksi biologis dan seksualitas terutama dalam perkawinan monogami, dan patriarkhi sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistem pewarisan.

Menurut Frederick Engles seperti dikutip Arief Budiman (1985: 36), pembagian kerja secara seksual memang bersifat timbal balik sebelum laki-laki mengambil alih kekuasaan, pekerjaan didalam maupun di luar rumah tangga sama saja, keduanya tidak akan membuat keadaan yang bekerja di dalam maupun di luar lebih kaya dari yang lainnya. Namun ketimpangan terjadi pada saat pekerjaan di luar rumah memberikan kekayaan yang tidak seimbang dengan pekerjaan yang di dalam rumah. Hal inilah yang kemudian menjadikan pria berada dalam posisi yang lebih kuat dalam masyarakat, sedangkan wanita menjadi lebih lemah.

Pada masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan, sebelum terjadinya alih fungsi lahan persawahan, pembagian kerja secara seksual ini terlihat sangat jelas. Perempuan lebih didudukan untuk menjalankan peran domestik, sedangkan laki-laki lebih berperan ke luar sebagai pencari nafkah keluarga, entah sebagai petani yang menggarap tanahnya sendiri atau sebagai buruh tani. Namun setelah terjadinya alih fungsi lahan persawahan dimana banyak sentra-sentra bisnis bermunculan di Kecamatan Denpasar Selatan, sentra-sentra bisnis baru ini membutuhkan tenaga kerja tidak hanya tenaga kerja laki-laki saja, namun juga tenaga kerja perempuan. Dari sinilah kemudian perempuan-perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan juga tertarik untuk berperan mencari nafkah bagi keluarganya, entah itu sebagai penghasilan tambahan atau justru sebagai penghasilan utama menggantikan suaminya yang tidak bisa mencari nafkah selain dari pada bertani, padahal lahan pertanian khususnya persawahan sudah semakin berkurang di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Ni Komang Waryani, penduduk Kelurahan Sesetan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Waktu sawah-sawah di sesetan masih ada, atau masih banyak, *tiyang* cukup dirumah saja sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan suami sebagai petani yang mengolah tanah sendiri sangat mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi setelah sawah-sawah itu berubah menjadi ruko dan perumahan, termasuk sawah suami yang terjual untuk membeli motor, renovasi rumah dan kebutuhan sekolah anak-anak, penghasilan suami menjadi sangat berkurang, padahal suami bisanya hanya bertani. Kesempatan kerja yang ditawarkan oleh usaha-usaha baru yang bermunculan, tidak bisa dilakukan suami, yaitu tadi, kemampuannya hanya bertani. Akhirnya saya-lah yang bekerja pada usaha-usaha baru itu, karena ternyata mereka membutuhkan tenaga kerja perempuan. Hingga saat ini saya sudah hampir 10

tahun bekerja pada usaha rumah makan atau restoran di wilayah Sesetan, yang tidak jauh dari rumah saya. (hasil wawancara dengan Ni Komang Waryani, penduduk Kelurahan Sesetan, tanggal 29 November 2015).

Hampir senada dengan hasil wawancara di atas, Ni Wayan Astiti, penduduk Desa Pemogan mengatakan :

*Tiyang*, terpaksa bantu cari nafkah keluarga. Penghasilan suami dari bertani sudah sangat berkurang. Sawah-sawah sudah berubah menjadi ruko-ruko, kantor-kantor, bank-bank dan juga perumahan. Dari 8 tahun yang lalu, saya bantu cari nafkah dengan bekerja pada usaha *laundry*, yang tentu saja tidak bisa dikerjakan suami *tiyang*. Dari situ, saya tidak hanya bekerja saja, tapi saya juga belajar bagaimana mengelola *laundry*. Akhirnya sudah dari 3 tahun yang lalu saya berusaha *laundry* sendiri, suami malah sekarang bantu-bantu saya, antar-jemput *laundry*, belanja bahan-bahan *laundry*, pokoknya bantu-bantu lah. (hasil wawancara dengan Ni Wayan Astiti, penduduk Desa Pemogan, tanggal 7 Desember 2015).

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi komersial di Kecamatan Denpasar Selatan, berimplikasi pada pembagian kerja secara seksual. Pada masyarakat patriarkhi seperti di Kecamatan Denpasar Selatan, sebelum terjadinya alih fungsi lahan persawahan, laki-laki semula menjadi tulang punggung keluarga, namun setelah adanya alih fungsi lahan persawahan, kaum perempuan mulai berpartisipasi untuk mendapatkan penghasilan keluarga, bahkan ada yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga.

Berbeda dengan pembagian kerja secara sosial dalam hal pencarian penghasilan/nafkah, dimana yang tadinya perempuan tidak ikut berperan dan berubah menjadi berperan dominan, dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan Hindu, perempuan di Kecamatan Denpasar

Selatan memiliki peran penting. Seperti misalnya dalam ritual yang ada kaitannya dengan subak, perempuan memiliki peran yang sentral dalam pelaksanaan ritual-ritual subak. Sebagai salah satu daerah dengan budaya dan adat yang masih kuat, maka perempuan Bali sering dihadapkan pada isu-isu ketidak setaraan gender. Walaupun dari observasi di lapangan maka isu kesetaraan gender terutama pada pelaksanaan ritual subak tidak sepenuhnya benar. Justru dalam pelaksanaan ritual subak akses bagi perempuan sangat terbuka, terutama akses akan pengambilan keputusan. Hal ini dapat dibuktikan pada saat anggota perempuan harus memutuskan semua persiapan ritual sampai dengan pelaksanaannya, tanpa campur tangan anggota subak laki-laki. Peran masing-masing gender dalam hal ini adalah khas. Jadi dalam hal ini kesetaraan gender lebih berkaitan dengan budaya, sehingga terkadang perempuan memaknainya sebagai suatu kewajiban.

Ritual sebagai salah satu unsur yang terkait dengan pura subak juga berperan penting dalam setiap gerak langkah subak. Kondisi dilematis antara pelestarian kearifan lokal (revitalisasi pertanian) dan perkembangan Bali sebagai daerah wisata memberikan dampak secara menyeluruh (*multiplier effects*) pada keberadaan subak dengan kegiatan ritualnya. Permasalahan yang dihadapi umat Hindu di Bali tentang bagaimana keefektifan pelaksanaan ritual baik secara individu maupun kolektif dan perubahan pada elemen subak yang lain seperti luasan lahan pertanian, mobilitas anggota subak serta sarana irigasi yang tidak terhindarkan implikasi adanya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan pemecahannya. Hal yang menjadi menarik adalah di tengah perubahan-perubahan yang terjadi maka subak masih tetap melaksanakan kegiatan ritual yang berkaitan dengan kegiatan di lahan pertanian. Situasi seperti ini oleh (Harris *et al*, 2004: 36) disebut dengan konsep "*changing continuities*" menggambarkan apa yang tetap

bertahan dalam perubahan sebagaimana terjadi dalam sebuah proses perkembangan. Elemen lain seperti lahan pertanian, anggota subak dan sistem irigasi boleh berubah, akan tetapi ritual yang berkaitan dengan elemen pura subak tetap bertahan.

Walaupun sangat sulit untuk menjelaskan secara logis makna dari setiap pelaksanaan ritual tersebut, akan tetapi realitasnya ritual tersebut menjadi spirit yang mampu menjamin keajegan pertanian dan produksi pangan pada organisasi sistem subak. Di samping itu adanya kepercayaan dan keyakinan akan agama Hindu yang dianut anggota subak, maka ritual seperti sebuah *habitus* bagi anggota subak, sehingga subak akan merasakan kehilangan identitas apabila tidak melaksanakan ritual dalam pengusahaan lahan pertanian mereka. Konsep *habitus* yang dikemukakan Bourdieu (1983) yang menyatakan bahwa akan ada keterkaitan antara praktik, *habitus* dan ranah (*practice, habitus and field*), pemaknaan realitas kehidupan dan spiritualitas (Zohar and Marshall, 2004: 61) merupakan beberapa konsep yang saling mendukung dalam menjelaskan fenomena ritual di lahan pertanian yang tetap diajarkan oleh subak dalam rangka menjamin ketahanan pangan dan katahanan hayati.

Sebagai agama yang diakui oleh negara maka ritual dalam agama Hindu akan berbeda dengan ritual suku yang masih eksis di beberapa daerah. Ritual dalam agama Hindu memiliki legitimasi sehingga dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga pengakuan akan ritual-ritual dalam agama Hindu lebih mempermudah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan lebih mempermudah menggunakannya sebagai modal pemberdayaan masyarakat. Fenomena ini yang kemudian menimbulkan penguatan pada kebalian orang Bali (identitas orang Bali sebagai umat Hindu dan anggota adat).

Dalam mengimplemtasikan konsep harmonisasi Tri Hita Karana ternyata peran perempuan sangatlah besar. Malahan pada beberapa kegiatan seperti persiapan dan pelaksanaan ritual peran tersebut sangat dominan. Perempuan sebagai bagian dari subak sangat menentukan pelaksanaan ritual pertanian yang berkaitan dengan *awig-awig* subak. Walaupun terkadang ritual yang dilakukan secara personal sebagai bagian dari keluarga Hindupun menjadi tanggung jawab perempuan. Kegiatan ritual yang dilakukan sangat intensif dan merupakan realitas kehidupan perempuan sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota subak. Hal ini bila dikaitkan dengan adanya pura yang harus *disungsung* sebagai bagian keluarga Hindu dan anggota subak yang termasuk dalam Desa Pekraman, maka dapat dikatakan bahwa ritual sebagai realitas kehidupan perempuan dan organisasi subak. Sebagai anggota desa Adat ada Pura Kahyangan Tiga yang harus *disungsung*, sedangkan sebagai bagian dari anggota subak mereka memiliki pura subak yang harus *disungsung*.

Walaupun sering perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan dikatakan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam setiap perannya, akan tetapi dalam hal penentuan kegiatan ritual dalam keluarga dan subak, ternyata perempuan memiliki otoritas. Jadi pada saat akan melakukan kegiatan ritual di subak ternyata yang menentukan hari pelaksanaan ritual adalah *sangkep* (rapat) *krama istri* subak. Setelah diperoleh kesepakatan antar *krama istri*, baru kemudian disiarkan kepada seluruh anggota subak yang lainnya. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa dalam komunitas Hindu dan juga subak ternyata ketimpangan peran yang selalu didengarkan dialami oleh perempuan tidak terjadi. Pengambilan keputusan dalam beberapa kegiatan dapat dilakukan oleh *krama istri*. Dalam pelaksanaan ritual di komunitas Hindu di Bali termasuk subak, tidak terjadi ketimpangan peran gender.

Malahan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, ternyata banyak sekali kewenangan yang dimiliki oleh *krama istri*. Misalnya saja anggota perempuan subak memiliki peran khusus dalam mengatur organisasi subak. Dalam pelaksanaan usaha subak memang anggota secara struktural adalah anggota subak pria, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemasaran produk dan pemeliharaan jaringan dengan pihak pembeli dilakukan oleh anggota subak perempuan. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa organisasi subak tidak memposisikan perempuan sebagai anggota kelas dua, tetapi subak memberikan kewenangan yang sama kepada perempuan. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya pembatasan peran gender dalam *awig-awig* subak yang menjadi kaki dan tangan dari organisasi subak, sekaligus akan mematahkan pendapat bahwa pada masyarakat dengan adat dan budaya yang masih berlaku kuat, biasanya perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pria. Terbukti di Bali terutama dalam organisasi tradisional subak ketimpangan posisi ini tidak ditunjukkan baik dalam bentuk peraturan maupun implikasinya di lapangan.

Perlu mendapat perhatian pemerintah terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan Dinas Pertanian terkait dengan ruang lingkup subak untuk lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan sebagai aset yang memiliki potensi yang sama dengan petani pria. Untuk ke depannya tidak akan terdengar lagi slogan-slogan bahwa "petani itu selalu dianalogikan dengan pria". Hal ini untuk lebih memberikan pemberdayaan yang lebih merata dalam konteks gender. Kenyataan bahwa etos kerja merupakan prinsip kehidupan petani. Dengan prinsip ini maka petani sebagai anggota subak akan terus berusaha untuk bekerja. Prinsip kehidupan petani berupa etos kerja berlaku baik bagi petani pria maupun perempuan. Karena memang secara normatif jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan adalah spesifik gender. Walaupun memang pada

beberapa kasus, masa kini banyak pekerjaan petani pria diambil alih oleh petani perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pembagian kerja secara seksual dalam hal pengelolaan subak di Kecamatan Denpasar Selatan yang mendudukan perempuan berperan sentral dalam upacara ritual subak, pelan tapi pasti menghilang dengan semakin habisnya sawah di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non pertanian. Kalau hal ini dibiarkan saja, maka dapat dipastikan ritual-ritual subak sebagai bentuk rasa syukur telah dikaruniai sawah yang subur akan segera menghilang di Kecamatan Denpasar Selatan.

5. Keluarga dan kekerabatan. Semua masyarakat mempunyai sistem keluarga dan kekerabatan, atau pola-pola sosiokultural yang teratur yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan reproduksi. Namun, sekali lagi, sifat khas sistem ini sangat bervariasi dan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Lebih dari itu, sub-sub-kultur yang berbeda dalam suatu masyarakat seringkali memperlihatkan perbedaan pola keluarga dan kekerabatan (Sanderson, 2011: 62).

Sistem kekeluargaan yang berlaku di suatu daerah, dipengaruhi oleh adat istiadat atau keberadaan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (kondisi) setempat. Masyarakat Bali menganut sistem kebapaan atau patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Menurut Artadi (2003: 31) sistem kebapaan atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Sistem patrilineal di Bali nyata tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya, serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Sementara

itu, dengan keluarga ibunya hubungan demikian tidak dijumpai.

Sistem budaya patriarki masyarakat *desa pekraman* di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis *purusa*, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Menurut prinsip hukum *rwabhinneda*, perbedaan gender laki-laki dan perempuan menggambarkan ide yang selaras tentang konsep *bhuana agung* dan *bhuana alit* (Pursika dan Sukadi, 2008: 61). Dalam konsep masyarakat Hindu di Bali, Tuhan itu terdiri dari Tuhan perwujudan laki-laki (kekuatan *purusa*) yang disebut sebagai Dewa dan Tuhan perwujudan perempuan (kekuatan *predana*) yang disebut Dewi. Hubungan antara *bhuana agung* dan *bhuana alit* juga mencerminkan hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah). Karena itu, para Dewa menjelma menjadi kaum laki-laki yang berkuasa sebagai pemimpin bumi untuk mewakili kekuasaan Tuhan (para Dewa) di Bumi. Oleh karena itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Sebagai pemimpin umat, laki-laki menjadi pemimpin dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Sebagai pemimpin negara, laki-laki memiliki kekuasaan atas kekuasaan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kepemimpinan. Kaum perempuan sebagai manifestasi para Dewi, memiliki tugas memelihara manusia dan berkuasa menjadi Dewi kuburan (*Dewi Durga*), Dewi Pertanian (*Dewi Sri*), Dewi kesejahteraan (*Dewi Laksmi*), Dewi Ilmu Pengetahuan (*Dewi Saraswati*).

Kedudukan para Dewa yang direpresentasikan oleh kaum laki-laki dan para Dewi yang direpresentasikan oleh kaum perempuan inilah dengan konsep hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah) yang membawa implikasi hubungan superordinat dan subordinat antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada pembagian kerja yang bersifat dualistik, tetapi juga bersifat komplementer (saling

melengkapi). Laki-laki yang berkuasa pada ranah publik (*hulu*) dan perempuan berkuasa di ranah domestik (*teben*).

Peran keluarga dalam perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat juga sangat penting. Dimana keputusan keluarga yang kemudian mengarahkan perubahan pola perilaku dan pola konsumsi yang ditunjukkan sehingga mempengaruhi besarnya jumlah pendapatan yang harus didapatkan pada tiap harinya atau tiap bulannya. Semakin berkembangnya dan semakin luasnya pengetahuan keluarga pada proses adaptasi atas adanya industrialisasi tersebut maka semakin besar tuntutan yang akan muncul dari keluarga diakibatkan pola konsumsi yang mulai meningkat. Berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, yang dimaksud dengan keluarga pada masyarakat adat Bali tidak hanya keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya saja. Masyarakat adat Bali mengenal adanya keluarga besar dalam suatu pekarangan atau bahkan keluarga dalam arti luas sebagai satu kesatuan dalam masyarakat adat yang berdiam dalam satu desa *pakraman*.

Secara geografis, daratan pulau Bali didominasi oleh daerah pegunungan yang membentang di bagian tengah pulau Bali dari barat sampai ke timur. Membentangnya daerah pegunungan ini telah membagi dua wilayah pulau Bali yaitu wilayah Bali selatan sebagai daerah pertanian dan pantai yang subur dan wilayah di balik pegunungan yang disebut dengan daerah *Den Bukit* (daerah kabupaten Buleleng). Kondisi ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam konsep *rwa-bhmeda* pembagian daerah dataran rendah dan daerah pegunungan ini telah memunculkan konsep *kaja* dan *kelod*. Konsep *kaja* mengacu pada daerah gunung/bukit dan daerah *kelod* mengacu pada daerah pantai. Di samping itu, masyarakat Bali juga mengenal konsep *kangin-kauh*. *Kangin* merupakan arah matahari terbit, dan *kauh* mengacu pada arah matahari terbenam.

Keadaan ini berimplikasi pada perbedaan penataan lingkungan fisik, sosial, dan religius antara masyarakat Bali selatan dengan masyarakat *Den Bukil*. Ini karena masyarakat Bali menempatkan gunung sebagai daerah *hulu luan* karena sebagai tempat bersemayamnya para dewa; dan daerah pantai sebagai daerah *teben*. Dua konsep ini menimbulkan pula konsep suci dan *leteh* serta berbagai dampak yang ditimbulkannya. Karena itu, arah *kaja-kangin* (utara-timur/timur laut) dianggap sebagai arah daerah yang suci, sedangkan arah *kelod-kauh* (selatan-barat/barat daya) sebagai arah yang profan/tidak suci. Tidak mengherankan kemudian bahwa dalam struktur keluarga dan masyarakat *desa/banjar adai* di Bali, tempat suci atau pura keluarga dan pura desa umumnya diletakkan di bagian *kaja-kangin* dari lingkungan keluarga atau desa adat sebagai daerah suci. Sebaliknya, wilayah untuk kepentingan profan seperti pembuatan wilayah peternakan atau pertanian, atau kuburan, dan di lingkungan keluarga sebagai tempat beternak, dapur, dan kamar mandi umumnya diletakkan di bagian *kelod-kauh* lingkungan keluarga atau desa adat sebagai daerah *teben leteh*. Sesuai dengan konsep *hulu-teben* ini, orang Bali umumnya memandang daerah atau wilayah sebatas kepala orang dewasa ke atas dianggap sebagai daerah *hulu/suci*, dan daerah sebatas perut ke bawah dianggap sebagai wilayah *teben/leteh*. Karena itu, dianggap menyalahi aturan jika orang Bali meletakkan barang-barang atau benda-benda yang profan berada di atas kepala manusia. Begitu pula sebaliknya, dilarang untuk menempatkan benda-benda suci atau sakral berada di bawah.

Konsep *hulu* dan *teben* ini juga memiliki implikasi pada penataan hubungan di dalam keluarga antara anak dan orang tua, antara anggota keluarga yang masih hidup dengan leluhur-leluhumnya, hubungan antar stratifikasi sosial (kasta), dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Secara lebih luas hubungan-hubungan ini bahkan

menjelaskan hubungan-hubungan antara keluarga (*kuren*) dengan *dadia*, hubungan *dadia* dengan *soroh*, hubungan keluarga dengan *banjar*/desa adat, hubungan desa adat dengan desa dinas, hubungan masyarakat lokal Bali sebagai satu kesatuan dengan masyarakat bangsa Indonesia, hubungan masyarakat dengan lingkungannya, dan hubungan masyarakat Bali dengan masyarakat global.

Akibat dari dianutnya sistem patriarkhi ialah kedudukan perempuan berada di bawah sub-ordinat laki-laki. Melihat kedudukan yang demikian, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di keluarga, kaum perempuan biasanya memiliki hak-hak dan kewajiban dalam sektor domestik, sedangkan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban di sektor publik. Lihat saja kenyataannya di masyarakat, anak-anak perempuan dan kaum ibu biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, menyediakan bahan-bahan untuk lauk pauk bagi keluarga, memberikan makan ternak, berjualan di rumah/pasar, dan menyiapkan berbagai perlengkapan upacara agama di lingkungan rumah tangga. Anak laki-laki dan kaum bapak malah sebaliknya, yaitu berkegiatan di luar rumah, mengerjakan lahan pertanian, mendapatkan nafkah untuk keluarga, mengikuti rapat-rapat keluarga dan rapat-rapat *desa pekraman*, memimpin keluarga, terlibat dalam kegiatan sosial dan politik serta kepemimpinan masyarakat. Pihak laki-laki pun biasanya memimpin upacara agama di lingkungan tempat suci keluarga dan di pura *desa pekraman*.

Tidak hadirnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga, menimbulkan kecemasan bagi pasangan suami istri, mengingat di Bali yang nota bene masyarakatnya menganut sistem patriarkhi, memiliki sanksi adat yang dinamakan dengan *Hak camput*. Ningrat (2010: 45) menyebutkan bahwa *Hak camput* adalah hak Desa Adat

mengambil alih hak kepemilikan tanah keluarga yang tidak memiliki keturunan lanjutan. Hak ini didasarkan atas anggapan bahwa apabila pasangan suami istri yang hanya memiliki anak perempuan saja, dan ketika anak perempuannya menikah keluar, maka harta kekayaan yang dimilikinya tidak ada yang mengurusinya ketika pasangan suami istri itu meninggal kelak. Sehingga dari pandangan ini, semakin mendiskriminasikan perempuan, sebagai anak yang tidak terlalu diharapkan dalam sebuah keluarga.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak berhenti di situ saja, sebagai masyarakat yang menerapkan hukum patriarkhi, perempuan Bali juga tidak memiliki hak waris dalam keluarga. Hak waris hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, akibatnya anak perempuan di Bali tidak mendapatkan hak waris dalam lingkungan keluarga. Jika dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, keadaan orang tua yang sudah lanjut usia atau mungkin sudah meninggal, maka seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada anak perempuannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Manuskrit IX.104, yang diterjemahkan sebagai berikut.

Setelah meninggalnya ayah dan ibu, para saudara laki-laki (putra-putra pewaris) setelah berkumpul, bolehlah mereka membagi harta warisan itu (harta orang tua mereka), karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu semasih orang tua mereka ada.

Harta warisan menurut hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, yaitu: (1) material (yang berwujud), seperti: sawah, tanah tempat tinggal, tempat ibadah (pemerajan, sanggah, dan lain-lain), alat pemujaan (*siwakrana*), keris yang bertuah, dan harta material lainnya dan (2) immaterial (yang tidak berwujud), seperti: menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), melaksanakan pengabenan setelah orang

tua meninggal (pitra yadnya), warisan yang bersifat *ayahana karang* (tugas/kewajiban) kepada *desa pekraman*, dan harta immaterial lainnya (Gede Pudja, 1977: 32).

Menurut Utari (2006) Hukum Adat Bali yang tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat, sampai masa tahun 60'an sangat dirasakan ketidakadilan gender, terutama pemaksaan kehendak terhadap perempuan sangat tinggi, seperti: praktek kawin paksa, poligami, pemingitan gadis dalam usia belia dengan alasan menjaga kesuciannya, kawin dalam usia muda, dan adanya strata sosial kasta yang melarang perempuan kawin dengan orang lain, hanya dalam lapisan kastanya saja, bila keluar maka ia dibuang dari keluarga, banyak terjadinya kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan. Hal senada juga diungkapkan oleh Sukerti dan Ariani (2014) bahwa anak perempuan Bali masih mendapat perlakuan yang diskriminasi terutama dalam bidang hukum adat waris, hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan gender. Perempuan Bali Hindu umumnya boleh dikatakan kurang dihargai atau dipandang tidak begitu penting dalam keluarga. Hal itu dapat diketahui dari ada istilah bahwa anak perempuan sebagai "*takilan pisaga*" (bekal tetangga). Dengan sebutan seperti itu seolah-olah anak perempuan diseting atau dirancang untuk pergi meninggalkan rumah orang tua dan keluarganya. Ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan juga dapat dilihat dari penelitian yang diungkapkan oleh Wiasti (2008) bahwa ketimpangan gender dapat dilihat dalam beberapa bidang, seperti dalam bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, dan bidang keluarga berencana (KB).

Sebenarnya jika dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat sebagai dwitunggal. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan

Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Parwati, ini adalah keadaan ideal.

Kedudukan perempuan dapat digambarkan dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra Bab.III. sloka 58 dan 59.

58: "Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib"

59: "Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati perempuan kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan".

Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama (Manawa Darmacastra IX, 96):

96: "Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama"

Gambaran tentang peran perempuan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa dapat dilihat dalam Kitab Bhagawadgita Bab I sloka 41,42 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

41: "Bila tirai kebatilan merajalela oh Kresna , wanita menjadi jalang, maka moral serta warna (dalam masyarakat) akan campur aduk"

42: "Keruntuhan moral perempuan akan membawa keruntuhan keluarga serta arwah nenek moyang akan jatuh keneraka, dan segala sesajen air, makanan yang dipersembahkan tidak berguna baginya".

Tanggungjawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan ahklak masyarakat. Perempuan memegang peranan sentral dalam kehidupan dan kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara.

Semangat moral yang dipetik di atas pada prinsipnya menempatkan lelaki dan perempuan dalam mitra yang sejajar. Namun hal ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat Hindu Bali, akibatnya terjadilah diskriminasi berbasis gender. Sehingga diperlukannya sebuah upaya sebagai solusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungan antar anak dengan orang tuanya, orang Bali meyakini bahwa antara anak dan orang tua, di samping menjalin hubungan kesejajaran yang bersifat komplementer, hubungan itu juga bersifat sub-ordinalif. Dalam hal ini anak haruslah setia, hormat, dan patuh kepada orang tuanya, karena orang tua adalah *guru rupaka* yang sama kedudukannya dengan para dewa bagi anak. Apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan orang tua pada dasarnya haruslah dianggap baik oleh anak dan menjadi kewajiban anak untuk menjaga kehormatan orang tuanya.

Hubungan subordinatif dan komplementer antara anak dan orang tua seperti ini tampak secara sosial dan religius dalam pelaksanaan upacara daur kehidupan. Orang tua, dalam hal ini, berkewajiban menyelenggarakan seluruh upacara *yadnya* daur kehidupan hingga anak-anaknya mencapai tingkat kedewasaan. Melalui upacara *yadnya* ini sesungguhnya orang tua mendidik anak-anaknya untuk menjadi dewasa, cerdas, berkepribadian, dan terampil baik secara pribadi, sosial, maupun religius. Sebaliknya, anak berkewajiban menyelenggarakan upacara *ngaben* bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Melalui upacara ini ditanamkan konsep anak membayar hutang kepada orang tuanya dan menyembah serta mendoakan orang tuanya agar dapat kembali bersatu dengan *Sang Parama Atman*.

Tujuan ini akan lebih mudah dicapai jika anak benar-benar bisa menjadi *suputra* bagi orang tuanya.

Hubungan antara anak dengan orang tua tidak sebatas pada saat orang tua masih hidup. Hubungan tersebut terus berlangsung bahkan setelah orang tua meninggal. Di sini, orang tua yang sudah meninggal beserta leluhur-leluhur terdahulunya dipersonifikasikan dalam kehidupan di alam nirwana (alam para dewa). Untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tua yang sudah meninggal dan para leluhur-leluhur sebelumnya dibuatkanlah tempat persemayaman roh mereka yang telah disucikan di tempat pemujaan keluarga baik di *sanggah* keluarga atau di merajan *dadia* atau di pura *kawitan*.

Hubungan yang terus berlanjut seperti di atas secara *niskala* (transenden), menjelaskan pula terbentuknya level hubungan geneologis keluarga-keluarga di Bali dari struktur keluarga sebagai satu *kureti* (keluarga inti), keluarga *tunggalin sanggah* (keluarga luas dalam satu kompleks lingkungan keluarga), keluarga *tunggalindadia* (keluarga luas, gabungan dari beberapa keluarga *tunggal natah/sanggah*), keluarga *tunggalin kawitan* (keluarga luas dari satu garis leluhur), dan keluarga *tunggalinsoroh/wangsa* (keluarga luas dari satu garis leluhur yang membedakan kasta). Keseluruhan tingkatan keluarga inilah sesungguhnya pula yang membentuk sistem kekerabatan di Bali yang berkembang umumnya menurut garis keturunan laki-laki (patrilinial). Susunan seperti ini juga yang merupakan salah satu pembentuk organisasi sosial di Bali yang kompleks berdasarkan sistem kekerabatan, di samping adanya organisasi sosial berdasarkan wilayah teritorial adat (banjar adat dan desa adat) serta organisasi sosial secara sukarela atas dasar kepentingan tertentu yang disebut *seka*.

Adanya hubungan kekeluargaan dalam tingkatan-tingkatan keluarga menurut garis keturunan patrilinial ini jelas masih menunjukkan adanya hubungan konsep *hulu danteben* dalam praktik sistem kekerabatan dan sistem sosial

di Bali. Di sini *kawitan* (asal mula) dapat dipandang sebagai *hulu* dari keluarga-keluarga inti di Bali. Sebaliknya, keluarga-keluarga inti adalah *tekennya*. Karena *hulu* mengandung konsep kesucian (menjadi bagian dari kekuasaan *buana agung*) dan *teben* mengandung konsep profan dan menjadi bagian kekuasaan *buana alit*, maka hubungan yang terbentukpun konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Di sini keluarga inti menunjukkan hubungannya dengan *kawitan* melalui upacara-upacara suci dan pewarisan nilai-nilai keutamaan keluarga. Sebaliknya, keluarga inti menerima warisan peninggalan-peninggalan keluarganya (umumnya tanah dan beberapa bentuk kekayaan keluarga lainnya) untuk kepentingan kelangsungan hidup keluarga-keluarga inti tersebut.

Seperti telah dikemukakan di atas, implikasi dari alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi bisnis, telah mendatangkan pendatang. Pendatang baik dari kota maupun dari desa. Hal ini membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan yang semula masyarakat petani agraris berubah ke arah masyarakat modern. Dengan perkataan lain masyarakat *desa pekraman* di Kecamatan Denpasar Selatan telah mengalami pergeseran sosial budaya termasuk mengalami perubahan pada penerapan budaya patriarkhinya. Hal ini disebabkan oleh semakin modernnya kehidupan masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan.

Masyarakat Bali termasuk Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan modern sekarang ini tidaklah terstruktur hanya dalam sistem-sistem kekerabatan, sistem stratifikasi sosial dalam sistem kasta, dan sistem gender saja, melainkan juga terstruktur dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorial adat, organisasi sistem pertanian (*subak*), dalam struktur sosial politik kenegaraan dan pemerintahan, dan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan modern berdasarkan profesi dalam hal-hal inipun konsep *rwa-*

*bhinneka* tidak bisa diabaikan dalam menciptakan relasi-relasi makna. Dalam hubungannya dengan organisasi adat, masyarakat Bali mengenal *banjar* dan desa adat. Umumnya organisasi *banjar* adalah bagian dari desa adat. Secara kosmologi, Swellengrebel (1960) menilai bahwa konsep desa adat merupakan wilayah *hulu/kaja*, sedangkan konsep *banjar* merupakan wilayah *teben kelod*. Dengan hubungan seperti ini organisasi *banjar* umumnya lebih mengacu kepada kegiatan administratif gotong royong, dan aktivitas sosial ekonomi, karena pengaruh administratif kekuasaan raja-raja Bali-Jawa di masa lampau. Sedangkan organisasi desa adat lebih mengacu kepada aktivitas-aktivitas sosio-religius. Ini karena desa adat juga menyungsumpura *kahyangan tiga* (*pura Desa/Bale Agung, Puseh, dan Dalem*) sebagai pusat aktivitas ritual keagamaan desa adat. Hubungan antara *banjar* yang lebih berorientasi pada aktivitas-aktivitas keduniawian dan desa adat yang lebih berorientasi kepada aktivitas-aktivitas sosial religius inilah menunjukkan bahwa keduanya tampak saling melengkapi tetapi juga mengandung makna relasi ordinasi, di mana *banjar* menjadi sub-ordinasi dari desa adat.

Hal itu sebagai ciri kuatnya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam sistem masyarakat desa. Karena pada umumnya, masyarakat desa memiliki hubungan yang sangat erat sesama warga. Ikatan ini sangat berguna sebagai *aset sosial* karena menjadi landasan penting terbangunnya fundamental sosial penting berupa *social networking* (jejaring sosial) yang memungkinkan aktivitas ekonomi rumah tangga dapat disusun secara konstruktif di atasnya. Hubungan sosial pertetanggaaan asli menjadi dasar pembentukan relasi ekonomi antar rumah tangga dan hubungan-hubungan antar anggota komunitas dalam menyongsong kegiatan nafkah dan sistem penghidupan pedesaan secara keseluruhan (Purnomo, 2007: 34).

Jejaring sosial merupakan salah satu dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jejaring dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok. Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jejaring ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jejaring sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jejaring dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005: 21). Selanjutnya, jejaring itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jejaring sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerja sama atau jejaring sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya.

Sebagai implikasi dari alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan jejaring sosial tradisional yang sudah ada di desa-desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan, pelan tapi pasti tergantikan oleh jejaring sosial baru yang berasal dari masyarakat pendatang yang bersifat multietnik dan multikultural. Jejaring sosial yang tadinya bersandarkan sistem kekerabatan dan kerja sama mulai digantikan dengan jejaring sosial yang didasari pada hubungan bisnis atau hubungan kerja yang disebut sebagai mitra kerja dan hubungan antara si majikan dengan si pelayan. Kondisi seperti ini dibenarkan oleh Ketut Maduartha, mantan Bendesa Adat yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Setelah sawah-sawah beralih fungsi menjadi perumahan dan sentra-sentra komersial, jejaring sosial yang katakanlah jejaring sosial tradisional yang dilandasi sistem kekerabatan dalam kerja sama, pelan tapi pasti, digantikan oleh jejaring sosial yang berdasarkan hubungan mitra bisnis, atasan dan bawahan, majikan dan pelayan. Dasar jejaring sosial baru ini selalu pada perhitungan untung rugi (Hasil wawancara dengan Ketut Maduartha, pada tanggal 18 Juni 2016)

Hampir senada dengan pendapat di atas, Gede Winata menyatakan sebagai berikut :

Jejaring sosial yang tadinya kental dengan sistem kekerabatan yang diwarnai dengan adanya kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan digantikan oleh relasi yang berdasarkan untung rugi semata. Alasan kenapa ? ya-lah, sekarang masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan sudah berubah menjadi masyarakat yang multietnik dan multikultural, meskipun belum seperti yang terjadi di Kawasan Kuta (Hasil wawancara dengan Gede Winata, pada tanggal 18 Juni 2016)

Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa jejaring sosial yang sudah ada pada desa-desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan secara perlahan-lahan mulai digantikan oleh jejaring sosial baru yang berasal dari kaum pendatang yang menghuni perumahan-perumahan yang dihasilkan oleh alih fungsi lahan persawahan yang sebagian besar menguasai sentra-sentra bisnis baru. Kaum pendatang yang multietnik dan multikultural ini umumnya adalah kaum pedagang yang menjalin hubungan berdasarkan perhitungan untung rugi.

6. Pendidikan. Pendidikan adalah sistem pengajaran kultural atau intelektual yang formal atau semi-formal. Kebanyakan masyarakat mempunyai sistem pendidikan yang tidak begitu formal, tetapi tidak ada masyarakat yang tidak

mengembangkan prosedur untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan atau nilai kepada generasi berikutnya (Sanderson, 2011: 62).

Perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Gambaran pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain. Aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian input-proses-output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas yang layak oleh berbagai stakeholder yang terkait.

Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/pemerintahan, maka keterkaitan pendidikan dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukkan sebagai berikut:

*Pertama*, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.

*Kedua*, berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandaskan sekulerisme telah menyuburkan paradigma hedonisme (hura-hura), permisivisme (serba boleh),

materialistik (*money oriented*), dan lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat saat ini lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-hasil materi ataupun keterampilan hidup belaka.

*Ketiga*, berlangsungnya kehidupan politik yang oportunistik telah membentuk karakter politikus machiavelis (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan Indonesia.

Jauh sebelum adanya pendatang di Kecamatan Denpasar Selatan, pendidikan di kecamatan ini lebih didasarkan pada pendidikan agama Hindu. Banyak interpretasi yang diberikan masyarakat Bali sendiri terhadap konsep *Ajeg Bali* tergantung pada latar belakang kehidupan mereka. Kalangan pejabat politik dan pemerintahan, misalnya, dari beberapa wacana cenderung memberi makna *Ajeg Bali* dari sudut kepentingan politik dan pemerintahan dan retorika janji-janji sosial politik mereka kepada konstituennya. Beberapa praktisi agama dan rohaniawan Hindu yang *concern* dan komit terhadap ajaran Hindu yang lebih universal, misalnya, memberikan makna *Ajeg Bali* atau *Ajeg Hindu* sebagai upaya pemurnian pelaksanaan ajaran Hindu yang bersumber dari Weda dengan menekankan pada jiwa *Ajeg Bali* atau *inner power* agama Hindu itu sendiri, yaitu *tapas*, *yadnya*, dan *dharma* (Agastya, 2004: 62). Tidak jauh beda dari pandangan ini, Setia (2004: 36) sebagai pengamat sosial, budaya, dan agama Hindu Bali menyatakan konsep *Ajeg Bali* haruslah memiliki makna sebagai lestarinya agama Hindu yang lebih universal yang bersumber dari ajaran Weda. Tidak ketinggalan, para seniman dan budayawan besar Bali juga berkomentar bahwa *Ajeg Bali* harus dimaknai sebagai upaya pengembangan kehidupan berkesenian orang Bali sebagai inti persembahan kepada kemegahan dan keindahan Tuhan yang memungkinkan orang Bali Hindu berkreativitas dalam

pengembangan budaya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kultural (*cultural confidence*) (Geriya, 2004: 42).

Sejalan dengan dimensinya masing-masing itu, kalangan pariwisata di Bali, para ekonom dan pebisnis Bali, praktisi lingkungan, dan lain-lain juga memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Termasuk di sini, walau agak termarginalkan, kalangan ilmuwan, pengamat, dan praktisi pendidikan juga mengemukakan detinisinya tentang konsep *Ajag Bali* sebagai proses pemberdayaan orang Bali (Hindu) untuk mampu mengembangkan kebudayaan Bali berbasis ajaran Hindu secara kreatif dan dinamis, tidak saja dalam tataran lokal, tetapi juga yang menghargai pengembangan kebudayaan nasional dan mampu berwawasan serta berkompetisi dan berkolaborasi di tingkat global.

Diterimanya konsep *Ajag Bali* ini tidak dapat dilepaskan dari misi sekolah dalam melaksanakan fungsi sosio-kulturalnya, di samping misi sosio-pedagogis dan misi sosio-akademis, Sukadi (2006: 45) yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan kebutuhan masyarakat lokal Bali dalam rangka pembentukan dan pengembangan SDM modern berkarakter Bali (Sujana, 2004: 21). Di samping itu, juga pendidikan sekolah tidak dapat lepas dari upaya menjalankan kepentingan utama misi kehidupan berbangsa dan bernegara serta upaya pembinaan dan pengembangan mutu sumber daya manusia Bali berwawasan global. Dengan begitu secara keseluruhan, konsep *Ajag Bali* dari perspektif pendidikan mungkin dapat dirumuskan menjadi upaya pengembangan SDM Bali yang memiliki kemampuan *think globally, act locally, and commit nationally* (Stopsy and Lee, 1994: 37)

Dilihat dari sisi kepentingan yang terakhir ini, lembaga pendidikan memang memiliki kepentingan dan peranan yang vital dan strategis dalam rangka gerakan moral *Ajag Bali* ini. Pertama, seiring dengan runtuhnya pemerintahan orde baru yang menjalankan pemerintahan

dengan dominasi dan hegemoni kekuasaan negara melalui konsep nasionalisme politik atau nasionalisme negaranya (Widja, 2001: 52), tuntutan gerakan pendidikan masyarakat lokal yang menuntut pendidikan berbasis masyarakat luas (*broad-based education*) juga tumbuh (Suryadi, 2002: 63).

Kedua, harus jujur diakui bahwa penerapan paradigma pendidikan nasional yang cenderung menggunakan pendekatan sentralistik untuk mengutamakan kepentingan nasional bangsa dan negara selama ini dinilai telah gagal dalam membangun identitas atau jati diri kebangsaan Indonesia (*nation and character building*) dan dalam pembangunan manusia Indonesia berwawasan global (Tilaar, 1999: 34). Karena itu, dalam rangka membangun nasionalisme yang lebih berbasis budaya (Widja, 2001:23), memberikan hak-hak sosial, budaya, politik, dan ekonomi kepada masyarakat lokal dengan mengembangkan demokrasi yang lebih menjernihkan keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara kekuasaan negara dan dinamika proses-proses sosial budaya masyarakat lokal tanpa dominasi dan hegemoni satu sama lain merupakan alternatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi alih fungsi lahan persawahan terhadap menunjukkan pengaruh yang positif. Interaksi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan dengan kaum pendatang telah menambah wawasan penduduk asli Kecamatan Denpasar Selatan, terutama pandangan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus untuk kehidupan mereka yang akan datang. Hadirnya sentra-sentra bisnis baru yang dalam rekrutmennya mempersyaratkan level pendidikan minimum SLTA juga mendorong masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan untuk lebih memperhatikan pendidikan. Hal ini menyebabkan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang tamat sekolah SMA ke atas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Namun untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, pada umumnya penduduk Kecamatan Denpasar Selatan terkendala dengan biaya. Pendidikan itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah atau jikapun bersekolah hanya sampai pada tingkat SLTA saja.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas.

Oleh karena itu, untuk dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi, masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan terpaksa harus menjual sawahnya lagi. Lahan erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Alih fungsi yang terjadi secara keruangan mengakibatkan berubahnya tata guna lahan. Utomo (2014: 86) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan komersial dan lahan pemukiman.

Khusus untuk sawah, alih fungsi lahan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Alih fungsi secara langsung terjadi akibat keputusan para pemilik lahan yang mengalihfungsikan mereka ke penggunaan lain, misalnya untuk area komersial, perumahan, infrastruktur atau fungsi lainnya. Alih fungsi kategori ini didorong oleh motif ekonomi, dimana penggunaan lahan setelah dialih fungsikan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan lahan untuk sawah. Sementara itu, alih fungsi tidak langsung terkait dengan makin rendahnya peluang dalam memperoleh pendapatan (*income opportunity*) dari lahan sawah tersebut akibat kegiatan tertentu seperti terisolirnya petak-petak sawah di pingiran perkotaan karena alih fungsi lahan di sekitarnya. Dalam jangka waktu tertentu, lahan sawah yang dimaksud akan berubah ke penggunaan nonpertanian.

Berdasarkan fakta empirik yang ditemukan di Kecamatan Denpasar Selatan menunjukkan bahwa ada dua jenis proses alih fungsi lahan persawahan yaitu alih fungsi sawah yang langsung dilakukan oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Proses alih fungsi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola

dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni. Hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya, sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan *bargaining*. Sedangkan tipe yang kedua adalah alih fungsi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai *planner* yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan khususnya lahan persawahan berpotensi hilangnya produksi beras di Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan yang semula produktif untuk usaha tani padi sawah tetapi saat ini lahan pertanian padi sawah sudah banyak yang mengalami alih fungsi menjadi lahan-lahan yang dikomersialkan. Salah satu implikasi alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan yang bersifat permanen adalah implikasi pada struktur sosial. Implikasi pada struktur sosial ini tetap akan terasa dalam jangka panjang meskipun alih fungsi lahan sudah tidak terjadi lagi.

Istilah struktur sosial sebagaimana diungkapkan Redcliffe Brown adalah sebagai pengaturan kontinyu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau pola perilaku yang dimapankan secara sosial (Kaplan dan Manner, 2000 : 139). Dalam memberikan pengertiannya Redcliffe Brown mengemukakan bahwa struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat (Garna, 1996: 150).

Teori lain telah melakukan konseptualisasi tentang struktur sosial secara berbeda, seperti Evans Pritchard mengemukakan bahwa struktur sosial adalah konfigurasi

kelompok-kelompok yang mantap; dan menurut Talcot Parsons, suatu sistem harapan atau ekspektasi normatif (*normative expectations*); Leach mengatakannya sebagai seperangkat norma atau aturan ideal; sedangkan Levi-Strauss berpendapat bahwa struktur sosial adalah model (Kaplan dan Manner, 2000 : 139). H. P. Fairchild (1975) mengemukakan bahwa struktur sosial diartikan sebagai pola yang mapan dari organisasi internal setiap kelompok sosial.

Struktur sosial sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Eratnya dua fenomena ini digambarkan J. B. A. F. Mayor Polak (1966) lewat pendapat bahwa antara kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan. Ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan dalam kebudayaan juga akan diikuti oleh perubahan dalam struktur masyarakat, demikian pula sebaliknya.

Beberapa strukturalis-sosial berupaya menjelaskan struktur kemasyarakatan dengan merumuskan beberapa kaidah tertentu yang menjadi landasan organisasi. Redcliffe Brown mengajukan beberapa prinsip struktural untuk menyoroti beberapa hal dalam sistem kekerabatan adalah kaidah ekuivalensi saudara sekandung, kaidah solidaritas garis keturunan, dan seterusnya, kesemuanya tersebut adalah suatu sistem yang berlaku dalam masyarakat.

Pengertian konsep struktur sosial dapat bersifat kompleks dan abstrak sekali. Namun, dapat pula lebih bersifat sederhana dan konkrit. Mengingat sasaran pembahasan tentang struktur sosial dalam kajian ini adalah masyarakat desa yang relatif bersahaja, maka konsep yang akan digunakan sebagai instrumen pembahasan adalah yang termasuk bersahaja pula. Betapapun beragamnya pandangan tentang struktur sosial ini, banyak diantara yang disebut sebagai teori struktur sosial dalam kenyataannya memperlakukan cara yang bermanfaat dalam membedakan serta mengkonseptualisasikan berbagai bagian dari

suatu sistem sosial dan hubungan antara bagian-bagian itu. Ide yang mendasar dalam struktur sosial sebagaimana dikemukakan oleh Beattie adalah bagian-bagian, atau unsur-unsur dalam masyarakat itu yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematis (Garna, 1996: 150).

Garna (1996: 151) mengemukakan bahwa konsep struktur sosial merupakan dasar atau teras bagi pendekatan struktural-fungsional, yang diajukan oleh para antropolog Inggris. Aliran struktural fungsional dalam antropologi yang dikembangkan oleh A.R. Radcliffe Brown, mengembangkan aliran ini dengan pra anggapan bahwa masyarakat analogi dengan organisme yang bekerja secara mekanik. Menurut Radcliffe Brown, bahwa masyarakat itu semacam organisme yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan melainkan juga memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup organisme itu (Kaplan dan Manner, 2000: 77-78). Dengan demikian masyarakat itu mempunyai syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Jaminan adanya hubungan yang memadai dengan lingkungan dan adanya rekrutmen seksual;
- b. Diferensiasi peran dan pemberian peran;
- c. Komunikasi;
- d. Perangkat tujuan yang jelas dan disangga bersama;
- e. Pengaturan normatif atas sarana-sarana;
- f. Pengaturan ungkapan efektif;
- g. Sosialisasi; dan
- h. Kontrol efektif atas perilaku disruptif.

Menurut Koentjaraningrat (1987: 172) bahwa Radcliffe Brown dalam mengembangkan konsep-konsep pendekatan struktural fungsionalnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim dan Mauss . Salah satu konsep yang dikembangkan oleh Durkheim tentang struktural fungsionalisme yang cukup mewarnai pemikiran

Brown adalah dasar berpikir analogi organik, yang melihat masyarakat sebagai satu kesatuan organisme. Durkheim melihat masyarakat sebagai keseluruhan organisme yang memiliki realitas tersendiri, artinya keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar keadaan tetap normal. Apabila fungsi itu tidak dipenuhi maka akan berkembang keadaan patologis. Konsep Mauss yang mempengaruhi Radcliffe Brown salah satunya adalah konsep tentang morfologi sosial dalam integrasi masyarakat. Mauss dan Beuchat mengembangkan konsep ini berdasarkan deskripsi atas gejala-gejala pengelompokan dan pola aktivitas sosial yang menyertainya dalam masyarakat Eskimo dalam rangka mengikuti siklus dan ritme alam. Pandangan akhir mereka tentang morfologi sosial (pembentukan kelompok dan pola-pola aktivitas secara kebudayaan dalam konteks tuntutan lingkungan alam), adalah pasangan antara alam dan kebudayaan ternyata tidak selamanya berada dalam ritme yang konsisten. Tidak selamanya perubahan dalam unsur-unsur alam atau unsur-unsur yang berkaitan dengan alam mengakibatkan perubahan yang sama pada bentuk-bentuk pengelompokan (morfologi sosial) serta pola-pola aktivitasnya (Martodirdjo, 1991: 41).

Saat ini masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan tidak mungkin menggantungkan hidupnya hanya dengan menjadi petani saja. Diperlukan penghasilan dari pekerjaan lain agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga. Petani harus memiliki sistem nafkah ganda. Pola nafkah ganda di pedesaan merupakan proses-proses dimana rumahtangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang beragam untuk *survival* atau bertahan hidup dan untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sumarti, 2007: 26). Sajogyo (1991: 51) menyatakan rumah tangga petani melakukan pola nafkah ganda berbeda-beda menurut tiga lapisan sosial masyarakat, yakni : (a) Lapisan atas, yaitu

menguasai tanah lebih dari 1 hektar, mereka mempunyai strategi akumulasi modal dimana surplus pertanian dipakai untuk membesarkan usaha luar pertanian dan sebaliknya; (b) Lapisan menengah, menguasai tanah antara 0,5 - 1 hektar, mereka mempunyai nafkah ganda sebagai strategi bertahan hidup atau konsolidasi, dimana potensi ekonomi pertanian dan sektor luar pertanian berkembang dalam taraf rendah; dan (c) Lapisan bawah, menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar dan tidak menguasai tanah sama sekali, mempunyai usaha kerja luar pertanian sebagai katup penyelamat yang menutup defisit pertanian. Dalam pengertian tersebut ditunjukkan bahwa strategi nafkah ganda yang dilakukan oleh rumah tangga di pedesaan sangat berkaitan dengan pola penguasaan lahan yang terdapat pada rumah tangga yang bersangkutan.

Hasil penelitian Sayogjo (1991: 63) menemukan bahwa di dalam penelaahan ekonomi masyarakat tani, yang dimaksud nafkah ganda yakni usaha di luar sektor pertanian yang bertujuan menutupi kekurangan dari sektor pertanian. Hasil penelitian White (1995: 18) menemukan bahwa (a) terjadi (sebagian) proses "orang terdorong ke luar (pertanian), imbalan di luar pertanian lebih rendah, orang menjalaninya karena terpaksa; dan (b) sebagian lain merupakan proses orang tertarik ke dalam (nafkah bukan pertanian) dimana imbalan di luar pertanian yang lebih baik. Ada kecendrungan rumah tangga di lapisan bawah (miskin) yang terkena proses terdorong keluar sebagai strategi bertahan hidup (Widiyanto, 2010:47-48).

Kondisi tersebut di atas dibenarkan oleh I Komang Winduarsa yang petikan wawancanya sebagai berikut :

Petani disini baru akan untung bila mengerjakan sawah lebih dari 1 hektar yang dimilikinya sendiri. Yah, minimal dari 1 hektar, baru mencukupi kebutuhannya. Kalau cuma punya sawah 0,5-1 hektar saja, petani masih perlu penghasilan tambahan. Masih harus bekerja pada sektor lain. Apalagi kalau tanahnya kurang dari 0,5 hektar atau

malah tidak punya tanah sama sekali alias hanya jadi buruh tani, tentu penghasilan dari bertani di sawah tersebut tidak mencukupi. Petani seperti ini, *absolutely* harus bekerja di sektor lain. Padahal setelah terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, kebanyakan petani disini tinggal memiliki sawah 1 atau 2 are saja (hasil wawancara dengan I Komang Winduarsa, 27 Desember 2015).

Hal tersebut dibenarkan oleh Wayan Suasti sebagai berikut :

Bagi petani yang punya sawah 1 hektar atau lebih pasti dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Padahal setelah petani di Kecamatan Denpasar Selatan banyak yang menjual sawahnya yang kemudian dijadikan perumahan, sebagian besar petani disini hanya memiliki sawah kurang dari 0,5 hektar. Banyak juga yang sudah tidak memiliki sawah lagi. Jadi mau nggak mau harus bekerja pada sektor lain, selain hanya bertani saja, tentunya (hasil wawancara dengan Wayan Suasti, 2 Februari 2016).

Kedua hasil kajian di atas membuktikan sekali lagi bahwa hasil penelitian Sajogyo (1991: 51) yang membagi petani menjadi 3 (tiga) yaitu petani yang memiliki tanah 1 hektar atau lebih, petani yang memiliki tanah 0,5 - 1 hektar dan petani yang hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali (petani gurem). Hasil wawancara juga mendukung temuan White (1995: 18) yang mengatakan bahwa petani harus mencari nafkah di luar pertanian karena imbalan dari pertanian tidak lagi mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara itu imbalan yang didapat dari pekerjaan di luar pertanian relatif lebih baik. Pada umumnya petani yang menjual sawah karena alih fungsi lahan pertanian, mencari nafkah di luar pertanian hanya untuk bertahan hidup.

Istilah "*perekonomian subsistensi*" umumnya digunakan khusus dari perekonomian desa agraris yang sudah tidak lagi "*menghidupi*" petaninya. Produksi subsistensi adalah bagian dari produksi pertanian yang

dikonsumsi oleh para anggota rumah tangga itu sendiri. Produsen sekaligus merupakan konsumen dari interaksi pasar tidak terjadi. Menanam sayur-sayuran untuk konsumsi sendiri, beternak ayam atau bebek, mencari makanan dari tempat sampah, membangun atau memperbaiki rumah adalah beberapa contoh dari produksi subsistensi di kota. Termasuk kegiatan seperti mengambil air dari sumur, mengumpulkan kayu bakar, menyiapkan makanan sehari-hari, mengajar sendiri anak-anaknya serta merawat anggota keluarga yang sakit (Evers, 1986:100).

White (1995: 26) membedakan rumahtangga petani ke dalam tiga kelompok dengan strategi nafkah yang berbeda.

- a. Rumah tangga yang atau mengusahakan tanah pertanian luas, yang menguasai surplus produk pertanian di atas kebutuhan hidup mereka. Surplus ini seringkali dimanfaatkan untuk membiayai pekerjaan di luar sektor non pertanian, dengan imbalan penghasilan yang relatif tinggi pula. Pada golongan pertama, strategi nafkah yang mereka terapkan adalah strategi akumulasi dimana hasil pertaniannya mampu diinvestasikan kembali baik pada sektor pertanian maupun non pertanian.
- b. Rumah tangga usaha tani sedang (usaha tani hanya mampu memenuhi kebutuhan subsisten). Mereka biasanya bekerja pada sektor non pertanian dalam upaya melindungi diri dari gagal panen atau memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan mengingat usaha pertanian bersifat musiman. Strategi mereka ini dapat disebut dengan strategi konsolidasi.
- c. Rumah tangga usaha tani gurem atau tidak bertanah. Biasanya mereka bekerja dari usaha tani maupun buruh tani, dimana penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar. Rumahtangga ini akan mengalokasikan sebagian dari tenaga kerja mereka tanpa modal, dengan imbalan yang rendah kedalam kegiatan luar pertanian. Pada rumah tangga golongan yang ketiga

ini menerapkan strategi bertahan hidup (Widiyanto, 2010: 15).

Chambers (1992:52) membagi strategi nafkah rumah tangga ke dalam tiga tahap, yaitu : *Desperation*, *Vulnerability*, dan *Independence*. Masing-masing tahap tersebut memiliki prioritas pemenuhan kebutuhan yang berbeda pula. Pada periode *desperation*, tujuannya adalah bertahan hidup (*survival*), cara yang ditempuh adalah dengan menjadi buruh lepas, memanfaatkan *common property*, migrasi musiman, dan meminjam dari patron. Tahap kedua adalah *vulnerability*, jaminan keamanan adalah tujuan utamanya, diperoleh dengan mengembangkan asset, mengadaikan asset, dan berhutang. Tahap ketiga, *independence* adalah kehormatan diri, misalnya membebaskan diri dari status klien, melunasi hutang atau mengembangkan aset yang mereka miliki (Widiyanto, 2010: 17).

Bersamaan dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam sistem pertanian dan pemanfaatan lahan di Kecamatan Denpasar Selatan pada umumnya telah tumbuh pula aktifitas kerja ke luar pertanian. Aktivitas ini ditandai oleh kejadian tipikal adanya pergeseran okupansi. Sumberdaya nafkah dari bertani digunakan sebagai basis nafkah oleh rumah tangga petani. Dalam perspektif teori pilihan rasional, setiap rumah tangga petani bebas memanipulasi dan menentukan kombinasi pemanfaatan sumberdaya nafkah yang paling memungkinkan dan paling sesuai dengan pengambil keputusan. Kombinasi penggunaan masing-masing sumberdaya nafkah akan berkembang menjadi strategi nafkah yang penting. Proses manipulasi pada setiap sumberdaya nafkah untuk mendapatkan penghasilan ekonomi rumah tangga akan tercermin pada setiap aktifitas nafkah yang ditetapkan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Dengan demikian, strategi nafkah merepresentasikan serangkaian pilihan penggunaan sumberdaya nafkah dan aktifitas nafkah yang dilakukan

rumah tangga untuk mencapai tujuan rumah tangga. Tujuan membangun suatu strategi nafkah tidak selamanya murni pada pencapaian profit ekonomi. Dalam setting tradisi budaya petani Bali, tujuan-tujuan non ekonomi seringkali bermakna lebih penting (Purnomo, 2007: 43).

Ellis (1998: 71) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal penting yang mendorong terjadinya diversifikasi sumber nafkah pada masyarakat petani:

- a. Karena sistem produksi bersifat musiman untuk mengisi waktu tunggu panen atau musim panen berikutnya, maka hal ini mendorong petani untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.
- b. Perbedaan pasar tenaga kerja, hal ini mendorong pemanfaatan berbagai peluang kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan subtansinya atau standar hidupnya.
- c. Strategi mengurangi resiko, melalui berbagai upaya yang dilakukan diharapkan petani mampu menghindari resiko kelaparan, kebutuhan subtansinya tidak terpenuhi dan resiko lainnya.
- d. Sebagai perilaku penyesuaian, maksud penyesuaian di sini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga tidak akan terjadi kekurangan.
- e. Strategi menabung dan investasi sementara berbagai strategi nafkah yang dilakukan dalam upaya memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bentuk tabungan atau investasi walaupun bersifat sementara, misalnya beternak sapi, dianggap sebagai tabungan yang apabila swaktu-waktu dibutuhkan dapat dijual.

Dalam konteks rumah tangga pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan, pilihan strategi nafkah *on farm* yang diterapkan tentu saja dipengaruhi oleh luas lahan garapan. Besar kecilnya pendapatan petani dari usahataniya ditentukan oleh luas lahan yang dikuasainya karena luas lahan tersebut dapat mempengaruhi produksi

per satuan luas. Apabila usia petani, tingkat pendidikan, lama bertani, jumlah tanggungan keluarga ikut menjadi penentu bagaimana arah pilihan strategi nafkah maka hal ini bisa menyebabkan komposisi mata pencaharian akan bergeser ke sektor non pertanian.

### **C. Implikasi terhadap Suprastruktur**

Implikasi alih fungsi lahan persawahan pada kehidupan petani di Kecamatan Denpasar Selatan juga terjadi pada tataran suprastruktur. Oleh Sanderson suprastruktur ini disebut superstruktur. Namun dalam pembahasan ini dinyatakan istilah suprastruktur seperti yang sering digunakan berbagai kalangan.

Suprastruktur ideologis meliputi cara-cara yang telah terpolakan, yang dengan cara tersebut para anggota masyarakat berpikir, melakukan konseptualisasi, menilai dan merasa, sebagai lawan kata dari apa yang mereka lakukan secara aktual Kalau struktur merujuk kepada perilaku, maka suprastruktur merujuk kepada pikiran. Suprastruktur mencakup beberapa sub-komponen meliputi (1) ideologi; (2) agama; (3) ilmu pengetahuan; (4) kesenian; dan (5) kesusastaan. Untuk pembahasan kesenian dan kesusastaan akan digabung menjadi kebudayaan, mengingat implikasi alih fungsi lahan persawahan lebih berpengaruh pada kebudayaan dari pada kesenian maupun kesusastaan.

1. Ideologi ini merujuk kepada karakteristik kepercayaan, nilai dan norma yang menonjol dalam suatu masyarakat atau dalam beberapa bagian dari suatu masyarakat. Kepercayaan memberikan asumsi-asuj kognitif tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kepercayaan ini menyangkut hakekat alam semesta, teknik pendidikan anak yang bagaimana yang menghasilkan anak-anak berkepribadian sehat, perbedaan-perbedaan apa yang ada antara laki-laki dan perempuan, dan masih sangat banyak lagi. Nilai adalah konsepsi tentang sesuatu yang bernilai yang didefinisikan secara sosial. Ia menentukari pemahaman kita tentang apa yang baik dan buruk, indah atau jelek, disukai atau tidak

disukai dan seterusnya. Norma menunjukkan standard-standard atau aturan bersama yang berkaitan dengan tindakan sosial yang pantas dan tidak pantas. Ia adalah perintah dan larangan yang berusaha ditanamkan suatu masyarakat ke dalam diri para anggotanya. Semua masyarakat menciptakan kepercayaan, nilai dan norma, tetapi diversitas gejala ini sangat besar.

Menurut Althusser (2010: 39), ideologi adalah sebuah representasi relasi individu-individu imajiner pada kondisi nyata dari eksistensinya. Terjadinya transposisi imajiner atas kondisi-kondisi eksistensi nyata disebabkan oleh eksistensi dari sejumlah kecil manusia sinis yang mengandalkan representasi dunia yang dipalsukan yang diimajinalisasikannya demi dominasi dan eksploitasi terhadap rakyat, sehingga sanggup memperbudak kecerdasannya dengan mendominasi imajinasi.

Selanjutnya Althusser (2010: 51) juga menjelaskan bahwa ideologi bertindak atau berfungsi dengan suatu cara yang merekrut subjek-subjek di antara individu-individu (ideologi merekrut mereka semua), atau mengubah individu-individu menjadi subjek-subjek (ideologi mengubah mereka semua) melalui operasi yang sangat presisi, yang dinamakan interpelasi. Individu diinterpelasi sebagai suatu subjek (bebas) agar ia dapat taat sepenuhnya pada perintah-perintah subjek, yakni agar dia dapat (sepenuhnya) menerima ketaatannya, agar dia membuat gerak-gerik atau tindak tanduk dari ketaatannya sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Tidak ada subjek kecuali dengan, dan demi ketaatannya. Itulah sebabnya mereka menjalaninya sendiri.

Ideologi dalam kajian ini merupakan pemikiran atau pemahaman yang dimiliki individu dalam masyarakat untuk memilih pekerjaan yang dianggap sesuai dan menguntungkan, sebagaimana diungkapkan oleh Koming Djuwita sebagai berikut :

Keluarga saya adalah keluarga petani. Ayah, paman, sepupu, semuanya petani. Tapi saya tidak mau menjadi petani. Pengalaman keluarga saya jadi petani itu tidak enak. Lebih sering merugi karena gagal panen. Saya lalu menjadi karyawan di Hardys Supermarket, kebetulan rumah saya dekat Hardys. Eh, nggak taunya jadi karyawan itu nggak enak juga. Disuruh-suruh, dibentak-bentak. Lalu saya mengambil kursus menjahit, sambil kerja di Hardys tentunya. Setelah selesai saya coba menerima order jahitan. Eh, laku. Kebaya saya disukai oleh ibu-ibu dari perumahan-perumahan yang banyak tumbuh di jalan Tukad-Tukad. Sekarang saya sudah mempunyai *boutiq* khusus kebaya yang berlokasi di pinggir jalan yang cukup strategis. Itulah pengalaman hidup saya untuk bisa lepas dari kehidupan petani (hasil wawancara dengan Koming Djuwita, pada tanggal 8 Februari 2016).

Hal yang hampir sama juga diceritakan oleh Wayan Komara sebagai berikut:

Setelah ayah saya menjual sawahnya karena *iming-iming* harga yang tinggi, keluarga kami jadi tidak punya sawah lagi. Ayah saya jadi buruh tani, tapi saya tidak mau mengikuti jejaknya. Saya kan kaum masih muda, masih bisa berkembang. Saya lalu ambil kursus otomotif, kebetulan saya kan lulusan SMK otomotif juga. Setelah lulus saya direkrut oleh salah satu dealer sepeda motor terkemuka di Jalan Sesetan. Jadi montir-lah. Dengan pekerjaan itu saya bisa memberikan kehidupan yang nyaman buat anak istri saya (hasil wawancara dengan Wayan Komara, pada tanggal 8 Februari 2016).

Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa generasi muda masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan tidak mau lagi menjadi petani. Apalagi bagi mereka yang orang tuanya sudah menjual sawah mereka sehingga tidak memiliki tanah lagi. Mereka lebih memilih mencari nafkah dengan menggeluti profesi lain yang menurut mereka lebih menguntungkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa sepertinya manusia memiliki esensi sebagai makhluk ideologi yang tak mungkin lepas darinya, seolah-olah ideologi merupakan udara tempat manusia menghirup nafas untuk melangsungkan hidup. Dengan adanya ideologi, dapat menolong manusia untuk memperoleh sumberdaya pemenuhan kebutuhan bagi diri sendiri dan kelompoknya, juga mencegah lawan-lawannya untuk memperoleh hal yang sama.

Setiap individu dalam kelompok harus mampu menjaga keberlangsungan usaha pemenuhan kebutuhan, wujud konkretnya adalah produksi. Usaha-usaha itu dilakukan sedemikian rupa dan setiap usaha yang dianggap baik bagi produksi dipertahankan, dibakukan dan diwariskan kepada generasi penerus, senantiasa direproduksi. Setiap individu baru dipersiapkan untuk menjadi penerus proses produksi, menjadi alat bagi reproduksi produksi dan pelengkap bagi relasi produksi. Agar keberlangsungan proses reproduksi produksi dan relasi produksi terjaga dengan baik, maka individu-individu dipersatukan dan direkatkan oleh struktur tertinggi yaitu negara.

Dalam tatanan yang lain secara ideologi petani tetap berpedoman pada aspek kenyamanan. Sehingga implikasi alih fungsi lahan persawahan terhadap kehidupan petani dalam aspek super struktur sosial terkait juga dengan moral ekonomi petani. H.D. Evers dalam Damsar (2000: 90-92) mengemukakan bahwa moral ekonomi petani timbul pada saat mereka menghadapi permasalahan untuk menjual sawahnya atau tidak ketika sawahnya di tawar dengan harga yang tinggi atau sangat tinggi. Para petani seringkali mengalami dilema. Moral ekonomi petani, menurut H.D. Evers timbul karena adanya pertentangan dalam diri petani sendiri. Apabila petani tergiur untuk menjual sawahnya maka ia akan kehilangan mata pencahariannya dari bertani, sementara itu bila ia bertahan untuk tidak menjual

sawahnya yang bersangkutan akan tetap menghadapi kesulitan hidup sedangkan kebutuhan hidup terus melonjak setiap harinya. Petani berusaha mencari jalan keluar sendiri. Di antaranya adalah dengan memilih jalan tengah dengan menjual sawah sebagian dan mempertahankan sebagian sehingga pertentangan batin pun untuk sementara tidak ada lagi. Kondisi seperti ini disampaikan oleh Nyoman Darma sebagai berikut:

Terus terang pada waktu itu, waktu *tiang* mendapat penawaran yang tinggi atas sawah *tiang*, *tiang* pun menjadi bingung. Tidak mau dijual, *tiang* banyak hutang, kebutuhanpun bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau sawah dijual, terus *tiang* mau cari makan dengan apa, *tiang* kan tidak punya keahlian apa-apa. Akhirnya *tiang* ambil jalan tengah, sawah *tiang*, *tiang* jual sebagian, sebagian lagi *tiang* pertahankan. Untuk sementara *tiang* lega. Tapi ya itu tadi, *tiang* terus dikejar kebutuhan hidup yang semakin melonjak, *tiang* berpikir daripada banyak hutang lagi, *tiang* jual lagi itu sawah yang tersisa. Sekarang saya tidak punya sawah lagi (hasil wawancara dengan Nyoman Darma, 23 Januari 2016).

Berbeda dengan Nyoman Darma yang menjual sawahnya sebagian, tapi akhirnya terjual semuanya, I Wayan Arthana dalam menghadapi dilema untuk menjual atau tidak menjual sawahnya ketika menghadapi tawaran yang tinggi, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut :

Tertarik sih untuk menjual dengan tawaran yang tinggi. Apalagi tanah saya tidak luas, hanya tanah warisan yang luasnya hanya 2 are saja. Tanah 2 are mau diapakan coba, mau dipakai bertani hasilnya pasti sangat tidak menguntungkan. Tapi kalau dibangun rumah, saya jadi nggak punya sawah. Sementara itu untuk tetap tinggal di rumah keluarga sudah penuh sesak. Akhirnya solusi yang saya ambil, sawah saya jual semua, hasilnya saya belikan tanah di daerah Bangli, dapat 8 are, yang

kemudian saya bangun rumah sesuai dengan idaman saya. Untuk bekerja, di Bangli saya juga terus dapat menggeluti profesi saya sebagai tukang (hasil wawancara dengan I Wayan Arthana, 13 Desember 2015).

Dari kedua hasil wawancara di atas dapat diketahui pada waktu sawah petani ditawarkan dengan harga tinggi, petani menghadapi dilema untuk menjual sawahnya atau tidak. Bagi yang memiliki moral ekonomi yang cerdas, seperti I Wayan Arthana, hasil penjualan seluruh sawahnya dibelikan tanah atau sawah di tempat lain yang relatif masih murah sehingga yang bersangkutan dapat membeli tanah yang lebih luas dan dapat membangun rumah sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, bagi petani yang kurang cerdas sebagaimana halnya Nyoman Darma, menjual sawahnya sedikit demi sedikit hanya sekedar untuk menambal kebutuhan hidup, namun akhirnya sawahnya juga habis terjual semua sehingga yang bersangkutan tidak memiliki sejenkal tanah pun.

Moral ekonomi petani sebagaimana halnya petani-petani di Kecamatan Denpasar Selatan menyandarkan diri pada etika subsistensi, dimana pengaturan sosial di dalam komunitas sebagai respek terhadap pemenuhan kebutuhan subsistensi (Scott, 1981: 105). Menurut Macfarlane (1991: 71), beberapa hal yang membedakan moral ekonomi petani dibandingkan ekonomi kapitalis (ekonomi formal), yaitu; (1) ekonomi melekat dalam kehidupan sosial masyarakat; (2) manusia melekat dalam lingkungan alam; dan (3) keterbatasan barang dan jasa disikapi dengan cara membaginya ke anggota komunitas (Widiyanto, 2010:156).

Keluarga-keluarga petani yang harus hidup dari hasil lahan-lahan yang kecil di daerah-daerah yang terlalu padat penduduknya sebagaimana halnya di Kecamatan Denpasar Selatan akan bekerja keras dan lama secara tak terbayangkan untuk memperoleh tambahan yang bagaimanapun kecilnya dalam usaha mereka. Keharusan

memenuhi subsistensi keluarga, yang mengatasi segala-galanya, seringkali memaksa petani tidak saja menjual dengan harga berapa saja hasil sawahnya asal laku, tetapi juga membayar lebih jika membeli atau menyewa lahan. Oleh karena tenaga kerja seringkali merupakan satu-satunya faktor produksi yang dimiliki petani secara relatif melimpah maka mungkin terpaksa melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan banyak kerja dengan hasil yang sangat kecil, sampai kebutuhan subsistensinya terpenuhi (Scott, 1981: 120).

Penyebab terciptanya ketergantungan adalah karena pemenuhan kebutuhan. Masyarakat atau individu akan mengalami situasi ketergantungan ketika mereka tidak mampu untuk mengakses atau memiliki serta memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Faktor dominan yang terjadi adalah marginalisasi dalam bagian-bagian sebagai bentuk penguasaan kelompok masyarakat.

Subtansif ekonomi moral menyandarkan diri pada prinsip dasar keterlekatan. Aktifitas ekonomi produktif akan mempengaruhi kehidupan dan status manusia, namun demikian semua aktifitas tersebut akan dipengaruhi oleh norma-norma, harapan-harapan, dan nilai-nilai komunitas. Dengan kata lain, aktifitas ekonomi dan surplus yang dihasilkan digunakan sebagai sarana mendukung dan meningkatkan kehidupan sosial (Widiyanto, 2010:155).

Sifat pertanian subsisten berkaitan dengan moral ekonomi yang dianut oleh petani yang bersangkutan. Tentang ini, Scott (1976: 126) mengutip tulisan Tanwey (1966: 35), menggambarkan kehidupan petani subsisten sebagai berikut :

Petani subsisten ibarat orang yang terendam air sungai kebirunya. Ia tidak pernah melakukan kegiatan apapun untuk mengubah nasibnya. Sebab, gerakan yang sekecil apapun dikhawatirkan akan menimbulkan gelombang air yang dapat mendorongnya masuk ke dalam mulut dan berakibat yang lebih menyusahkan dirinya. Oleh

sebab itu, daripada mengalami nasib yang lebih buruk, lebih baik diam demi mengutamakan keselamatannya.

Apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Scott tentang penilainnya terhadap petani subsisten adalah (a) menyerahkan diri kepada nasib, (b) bersikap statis, dan (c) takut terhadap risiko kegagalan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika petani subsisten semacam ini relatif tidak akan mengalami kemajuan. Baik kemauan dengancara atau tehnik bertani, kemajuan produktifitas, tingkat pendapatan, dan juga kesejahteraan hidup keluarganya (Mardikanto, 1994:239-240).

Kondisi petani di Kecamatan Denpasar Selatan sejalan dengan ungkapan yang diberikan oleh Scott (1981: 132), bahwa bagaimanapun sesungguhnya petani ibarat orang yang selamanya sudah cukup menenggelamkannya. Secara dialektis Scott memberikan deskripsi bahwa persepsi moral merupakan dasar dari setiap tindakan petani dalam aktivitasnya. Secara moral petani tidak akan mengambil tindakan yang berbahaya, beresiko tinggi dan mengancam tingkat subsistensi mereka namun secara dialektis pula Samuel Popkin (1986 :81) justru menunjukkan bahwa bukan soal moral yang paling menentukan setiap tindakan petani melainkan rasionalitas kerjanya. Dalam pandangan Popkins petani bukan tidak mau ambil resiko dalam segala tindakannya. Persepsi petani kerap kali justru dipengaruhi oleh aspek-aspek spekulatif dan perhitungan untung rugi yang sangat cerdas (Hidayaturrahman, 2014: 52).

Di samping itu untuk bertahan hidup petani di Kecamatan Denpasar Selatan juga melakukan adaptasi supaya kebutuhan subsistennya tercukupi tindakan yang dilakukan adalah dengan mengganti padi dengan beberapa tanaman lain yang juga bernilai ekonomi. Hal ini disebabkan karena kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah ternyata kurang memberikan pengaruh bagi peningkatan keterampilan petani dalam

mengelola lahan pertaniannya. Para petani masih mengelola pertanian mereka secara tradisional, akibatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka pun tidak pernah naik. Mayoritas petani hanya trampil ketika menanam padi atau tanaman-tanaman palawija saja (kacang, jagung) tetapi mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup baik ketika menanam tanaman pangan yang bernilai ekonomi lebih tinggi seperti lombok, tanaman sayuran dan buah-buahan. Hal ini diungkapkan oleh I Nyoman Murda sebagai berikut:

Secara turun temurun, kami hanya diajari menanam padi dan palawija saja. Sebenarnya kami juga ingin menanam sayur-sayuran dan buah-buahan yang mempunyai nilai jual tinggi. Tapi kami harus belajar dari siapa? Petugas penyuluh pertanian pun tidak mengajari hal itu. Yang dibicarakan dalam penyuluhan hanya bagaimana kami menggunakan bibit unggul, pupuk dan pestisida saja. Katanya sih untuk intensifikasi pertanian (Hasil wawancara dengan I Nyoman Murda, pada tanggal 22 Desember 2015)

Wawancara di atas menggambarkan bagaimana petani untuk bertahan hidup mereka harus terus beradaptasi dengan mencoba hal yang baru bagi budaya bertani yang selama ini mereka lakukan. Mereka tidak bisa mengharapkan peran pemerintah, yang mereka bisa lakukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsisten semata. Hal senada juga dilontarkan oleh I Nengah Sukerta sebagai berikut:

Kami tidak mampu menanam tanaman yang lebih menguntungkan dari pada hanya sekedar padi dan palawija saja. Tapi tidak ada yang mengajari kami. Bapak penyuluhpun hanya menganjurkan kami untuk mengupayakan bagaimana meningkatkan panen padi melalui intensifikasi pertanian, dengan menggunakan bibit unggul, pupuk anorganik, pestisida dan sebagainya (Hasil wawancara dengan I Nengah Sukerta, pada tanggal 23 Desember 2015).

Sedikit berbeda dengan kedua informan tersebut di atas, I Ketut Sutariawan, Br. Gaduh yang mencoba menanam bunga selain padi. Namun karena tidak ada yang mengarahkan dan membimbing akhirnya upaya menanam bunga tersebut berakhir dengan kebangkrutan sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

Saya jadi petani dari kecil, awalnya saya sebagai petani di sawah dengan menanam padi, tapi lambat laun saya berubah pola tanam, yang awalnya menanam padi, sekarang menanam bunga untuk dijual ke pasar. Hal ini saya lakukan karena semenjak orang tua saya meninggal kemudian sawah dibagi-bagi dengan saudara-saudara saya, dan saya hanya mendapatkan bagian 7 are, apa yang bisa dihasilkan dengan lahan 7 are itupun pengairannya hanya mengandalkan pompa air saja. Di samping itu jadi petani tidak menjanjikan, jangkakan untuk bantu membiayai anak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja tidak mencukupi. Di samping saya menanam bunga untuk dijual, saya juga menjadi pedagang di Pasar Sanglah. Datang dari pasar baru saya ke sawah. Sekedar untuk menyiram bunga, tapi karena tidak ada yang mengajari bagaimana menanam bunga yang menguntungkan dan juga tidak ada air irigasi lagi, jadinya ya saya bangkrut, tidak menanam bunga lagi (Hasil wawancara dengan I Ketut Sutariawan, pada tanggal 8 April 2015).

Beberapa petani di ketiga lokasi tersebut yang mencoba untuk melakukan jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Menurut hasil kajian lapangan di ketiga lokasi tersebut, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kelompok tani ataupun PPL (Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian) jarang membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan petani. Frekuensi pertemuan dari kelompok tani yang ada jarang sekali. Dengan demikian, sepertinya petani sudah pasrah dengan keadaan yang mereka terima sekarang ini. Mereka

mengelola tanaman pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsisten saja. Tidak ada upaya berarti yang dilakukan kelompok tani untuk memberdayakan anggotanya. Kelompok tani biasanya hanya menjadi perantara dari pemerintah kepada petani ketika ada program-program bantuan untuk petani seperti Kredit Usaha Tani, bantuan pupuk murah dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian lapangan di dua tempat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah cenderung memarginalisasikan kehidupan petani.

Para petani sebagai pemanfaatan lahan-lahan pertanian saling berhubungan. Dinamika hubungan yang terjadi tidak pernah terlepas dari adanya prinsip ekonomi moral (Scott, 1981: 87) dan ekonomi politik (Popkin, 1986: 53). Menurut Scott (1981: 88), petani itu tidak mau mengambil resiko karena mereka berada pada garis subsistensi. Mereka adalah petani gurem dengan luas lahan yang sangat kecil, yang hanya mampu menghidupi pada batas yang minim. Pendekatan ekonomi-moral menganggap hubungan petani didasarkan pada adanya institusi desa dan ikatan patron klien yang menopang kebutuhan subsisten petani "Etika Subsistensi" dari komunitas pedesaan. Pendekatan ini banyak terjadi di dalam komunitas pedesaan tradisional (masyarakat pra-kapitalis). Para petani selalu berusaha menyediakan jaminan penghidupan melalui aturan-aturan "meminimalkan resiko" berdasarkan prinsip "utamakan keselamatan" (*safety first*) (Maharani, 2008: 121).

2. Agama. Agama berisi kepercayaan dan nilai bersama yang bersinggungan dengan keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan sesuatu yang 'bersifat supernatural. Adanya, kekuatan dan kekuasaan sesuatu yang adilrati itu umumnya dianggap secara langsung mencampuri jalannya suatu masyarakat atau paling tidak mempyai hubungan tidak langsung dengannya. Seperti banyak komponen sistem

sosiokultural lainnya, agama merupakan ciri universal kehidupan sosial manusia

Aspek agama dalam kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan setelah terjadinya alih fungsi lahan tidak terdapat perubahan karena agama merupakan keyakinan yang menjadi hak setiap orang. Namun di dalam agama pula khususnya agama Hindu yang menjadi agama mayoritas masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan memberikan nilai-nilai agamis yang dapat dijalankan untuk mensyukuri nikmat dan rejeki yang didapatkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta masih sering dilakukannya kebiasaan melakukan upacara keagamaan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan.

Agama memiliki fungsi dan peran dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Pendapat ini memang masih bisa diperdebatkan. Tetapi, Lauer (1989) pernah menyatakan bahwa bahkan walaupun ada beberapa segi agama dapat menjadi penghambat bagi proses perubahan sosial budaya masyarakat, sangatlah tidak bijaksana untuk menyatakan bahwa agama tidak penting perannya dalam proses perubahan sosial budaya tersebut. Ini berarti bahwa agama tentu lebih banyak memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam proses perubahan sosial budayanya.

Di antara para teoritis sosial sejak jaman klasik hingga modern banyak yang mencurahkan perhatiannya pada masalah peranan agama dalam proses perubahan sosial budaya masyarakat. Comte (Coser, 1971; Johnson, 1994), misalnya, dengan gagasan agama humanitasnya menjelaskan antara lain bahwa dari lintasan historis telah diketahui bahwa agama di masa lampau sudah menjadi satu tonggak keteraturan sosial yang utama.

Oleh karena itu, agama merupakan dasar untuk konsensus universal dalam masyarakat, dan juga mendorong identifikasi emosional individu dan meningkatkan gagasan agama humanitasnya, Comte kemudian mengajukan suatu gagasan untuk meningkatkan

keteraturan sosial dalam masyarakat dengan agama humanitas sebagai cita normatifnya. Dengan agama humanitas ini, Comte sesungguhnya mengajukan gagasan utopis untuk mereorganisasi masyarakat baru secara sempurna yang membuat mereka berhasil menciptakan keteraturan sosial yang dapat disumbangkan oleh pemikiran ilmiah para ilmuwan (sosiolog) yang dilandasi oleh perasaan, cinta, dan sistem moral.

Selanjutnya, Durkheim (1965; Coser, 1971; Johnson,-1994) juga ada menjelaskan tentang makna agama dalam kehidupan masyarakat. Dengan meneliti kehidupan religi masyarakat primitif terutama hubungan antara tipe kelompok sosial dengan tipe totemic. Durkheim berpendapat bahwa corak dari agama apa saja berhubungan dengan suatu dunia yang suci (*sacred realm*) yang berbeda dengan dunia profan dalam kehidupan yang biasa sehari-hari. Lebih lanjut dikatakan bahwa ide tentang dunia yang suci itu juga sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kenyataan sosial, yaitu kehidupan kelompok sosial, dan sebenarnya mewakili kenyataan kelompok itu dalam bentuk simbol (totem). Dengan basis ini, jelaslah bahwa Durkheim sesungguhnya mencari akar munculnya kehidupan religi itu dari kehidupan kelompok masyarakat itu sendiri.

Dengan hubungan antara agama dan kehidupan masyarakat seperti itu, sesungguhnya Durkheim memiliki *concern* dalam menjelaskan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat yang menurut klasifikasi Alpert (Coser, 1971: 139) dapat berfungsi "*as disciplinary, cohesive, vitalizing, and euphoric social forces*". Dalam tataran yang paling umum, agama sebagai institusi sosial berguna untuk memberikan makna kepada hakikat penderitaan manusia dengan mengikatkan individu pada nilai-nilai transenden supra-individu yang sesungguhnya akar utamanya berada pada kehidupan masyarakat tersebut.

Berikut di antara para pemikir klasik, tampaknya Weber yang lebih intens mengkaji hubungan agama dengan proses perubahan sosial dalam masyarakat modern, khususnya dalam terbentuknya masyarakat kapitalis modern terutama di negara-negara barat. Weber dengan konsep asketisme dalam dunia Protestan berhasil menjelaskan hubungan antara asketisme dengan perubahan sosial masyarakat menuju dunia kapitalis (Coser, 1971; Johnson, 1994).

Studi Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme menunjukkan bahwa ideologi agama, khususnya agama Protestan dapat mempermudah perubahan (Abraham, 1991; Goldthorpe, 1992; Horton dari Hunt, 1991; Lauer, 1989;). Menurut Weber dengan merasionalisasikan doktrin teologis Protestan, khususnya Calvinisme-pemikiran Protestan membentuk kepribadian pengusaha yang aktivitasnya berpengaruh terhadap perkembangan kapitalisme. Asketisme Protestan sebagai sumber pendekatan rasional dan sistematis yang mendorong kapitalisme, karena unsur modern kapitalisme, perilaku rasional berdasarkan ide panggilan diturunkan oleh asketisme Protestan. Menurut asketisme Protestan, individu didorong oleh perhatian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dirinya sendiri; dan ia dapat memastikan dirinya berada di dalam keadaan kasih sayang Tuhan melalui tindakan asketisme dalam dunia (Hasan, 1986; Lauer, 1989).

Studi Weber ini mendapat dukungan beberapa peneliti lain. Geertz dalam studinya di Indonesia: "Penjaga dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia", membandingkan dua kota di Indonesia yang berbeda sosial budayanya, yaitu Mojokerto di Jawa Timur dengan penduduk beragama Islam yang berorientasi pasar, dan kota Tabanan di Bali yang penduduknya beragama Hindu bergerak di bidang ekonomi firma yang berasal dari usaha kelompok *tri wangsa* di Bali. Ia menemukan bahwa baik agama Islam modern maupun

agama Hindu ortodok mempunyai peranan yang penting dalam proses perubahan sosial ekonomi masyarakat ke arah modernisasi (Bagus, 1994; Hasan, 1986; Lauer, 1989). Begitu pula studi Bellah, dalam bukunya "Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang" (1992), yang bertujuan mencari akar budaya Jepang pramodern yang mendukung modernisasi di Jepang, menemukan bahwa kehidupan religi jaman Tokugawa mempunyai peranan penting dalam proses modernisasi di Jepang.

Agama Hindu sebagai salah satu agama besar di dunia dengan jumlah umat di tahun 1980 sekitar 583 juta jiwa, dan diproyeksikan akan berjumlah lebih dari satu miliar di tahun 2000an (Horton dan Hunt, 1991) mempunyai peranan yang vital dalam proses perubahan sosial masyarakat, baik untuk kepentingan umat Hindu sendiri maupun untuk ketertiban, perdamaian, dan kemajuan peradaban seluruh umat manusia. Kenyataan sejarah telah menunjukkan tanda-tanda ini (Setia, 1992). Bagaimanakah model peranan agama Hindu dalam proses transformasi sosial budaya masyarakat? Geria (1991) menjelaskan model peranan agama Hindu (peranan normatif) dalam proses transformasi masyarakat.

Pertama, agama Hindu dapat berperan dalam memberikan motivasi, sehingga masyarakat bukan saja dinamis melainkan juga kreatif dalam perubahan. Untuk peran motivatif dan kreativitas, ajaran dan konsepsi agama Hindu yang relevan adalah menyangkut ajaran *Karma Phala*, *Yadnya*, dan etika kerja serta *Catur Purushu Artha*. Kedua, agama Hindu dapat berperan memberikan payung dan tuntunan moral bagi manusia dan masyarakat yang tengah berubah dan berkembang. Tuntunan moral ini penting untuk tetap terjenjangnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Untuk peran tuntunan moral ini, ajaran dan konsepsi yang amat relevan adalah *dharma*, *iri guna*, *iri warga*, *iri kaya parisudha*, dan *iri marga*. Ketiga, agama Hindu juga dapat berperan dalam memberikan pegangan

dan simpul-simpul pengikat untuk tetap utuhnya jati diri. Untuk peran ini, ajaran dan konsepsi yang relevan adalah *tat twam asidan yadnya*. Empat, agama Hindu juga dapat berperan memberikan orientasi dan arah bagi perubahan yang ingin dituju seperti yang digariskan dalam tujuan kehidupan beragama. Untuk peranan memberikan arah dan tujuan hidup ini, ajaran dan konsepsi yang relevan adalah tentang *moksarthatn jagadhiiu ya ca iti dharma* (Geria, 1991, Mantra, 1993). Keempat peranan normatif di atas tidaklah bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan bersifat komprehensif yang dengan ketiadaan peran yang satu akan menimbulkan ketidakkonsistenan pada peran aspek-aspek yang lain.

Gorda (1996), senada dengan Geria dalam studinya tentang Etika Hindu dan Perilaku Organisasi juga telah mengembangkan kerangka konseptual yang tidak jauh berbeda dalam menjelaskan peran agama Hindu dalam proses modernisasi masyarakat Bali. Menurutnya, agama Hindu memiliki nilai-nilai rasional yang turut menyumbang dan menjadi dasar bagi pembentukan etika perilaku wirausaha Hindu di Bali yang memiliki peran besar dalam pembangunan atau modernisasi ekonomi di Bali. Nilai-nilai rasional yang dimaksud diderivasi dari ajaran keyakinan masyarakat Hindu Bali, antara lain ajaran *Panca Cradha* yang memberi dasar bagi penetapan tujuan hidup manusia Hindu, yaitu *Moksartham Jagadhhtla Ya Ca Iti Dharma* (kebahagiaan lahiriah di dunia dan kebahagiaan abadi di sorga).

Hal yang lain adalah ajaran tentang *Tri Hita Karana* yang memberikan pemikiran kepada manusia Bali bahwa dalam pembangunan ekonomi sebagai basis untuk modernisasi, manusia (tidak hanya harus memanfaatkan kualitas sumber daya manusia (*pawongan*) dan sumber daya alam (*palemahan*) seperti yang digunakan oleh modernisasi di negara-negara barat, tetapi juga perlu memberdayakan sumber daya spiritual atau sumber daya *brahman*

(*parahyangan*). Integrasi ketiga sumber daya ini diyakini tidak saja memiliki sumber energi pendorong yang maha dahsyat, tetapi juga mampu membuat keseimbangan dan menjadikan usaha-usaha modernisasi suci secara *niskala* atau spiritual.

Terkait dengan pertanian yang berupa menanam padi di sawah, masyarakat Bali percaya bahwa Bhatari Sri merupakan Dewi Kesuburan yang menjaga agar sawah yang dijaganya tetap subur. Untuk itu masyarakat petani di Bali termasuk masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan *mengempon* Bhatari Sri dengan membangun Pura Ulundanu yang ditempatkan di tengah sawah. Hal seperti ini diungkapkan oleh I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan ketua LPM Sasetan dalam wawancara sebagai berikut.

Masyarakat di Bali pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan pada khususnya percaya bahwa penjaga kesuburan sawah adalah Batara Sri. Untuk itu di tengah sawah selalu dibangun Pura Ulunsiwi yang disebut juga Pura Ulundanu. Di Pura Ulundanu inilah Batara Sri berastana. Masyarakat masih percaya itu sampai sekarang. Bahkan setelah adanya alih fungsi lahan persawahan, bilamana ada masyarakat yang tanahnya dialih fungsikan dari tanah sawah menjadi rumah, maka orang tersebut akan mengembalikan status tanah tersebut dengan cara menghaturkan sesajen ke Pura Ulundanu. Tujuannya mengembalikan status tanah tersebut dengan tujuan agar rumah yang ditempati menjadi aman, tentram (hasil wawancara dengan I Made Sukaja, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan pada khususnya memiliki kepercayaan berdasarkan agama Hindu bahwa Bhatari Sri adalah Dewi Penjaga Kesuburan yang berastana di Pura Ulunsiwi/Pura Ulundanu yang terletak di tengah sawah. Apabila sawah

kemudian dialih fungsikan menjadi fungsi lain menjadi rumah atau perkantoran, maka dirumah atau diperkantoran tersebut pemiliknya harus tetap menghaturkan sesajen ke Pura Ulundanu dengan tujuan untuk mengembalikan status rumah atau perkantoran tersebut agar aman dan tentram, bebas dari kemarahan Bhatari Sri.

Sebagai akibat adanya pergeseran cara bertani yang tidak lagi menggunakan bajak dan cangkul, tetapi menggunakan traktor, maka terjadi pula pergeseran budaya dalam bertani termasuk pemujaan terhadap Bhatari Sri. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan I Wayan Mardia, *Pekaseh Subak Kapaon* dan petani yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Menurut saya ada pergeseran budaya dalam bertani. Dulu ada yang namanya *brata pemaculan*, dulu mau turun ke sawah cangkul dihias, ada sesajen, kemudian mencangkul sawah tiga kali sebagai simbolisasi memulai menggarap sawah. Di jaman sekarang sudah tidak ada lagi budaya tersebut. Selaku pekaseh saya sudah mengedarkan surat yang isinya berkaitan dengan upacara *upakara bebantenan* di sawah, tapi petani sudah tidak lagi peduli dengan hal tersebut dengan alasan, bilamana saya melakukan hal-hal tersebut jangan sampe Betara Sri saya taruh di pagar, karena petani sudah tidak punya *klumpu* (tempat penyimpanan padi). Maka saya ingin minta bantuan kepada pemerintah agar dibuatkan *klumpu* di balai subak, dengan tujuan bagi para petani yang tidak punya *klumpu* (penyimpanan padi), dipersilahkan menaruh di balai subak sebagai simbolisasi menstanakan Betara Sri. Waktu saya kecil dulu setiap ada upacara Betara sri di *klumpu*, orang tua buat jajan wajik, ada jajan *blesbes* yang bahannya dari tepung diisi kacang dibungkus dengan daun pisang dan bantennya lumayan besar, ada *lesung*, ada *alu*, dulu dalam membuat *cili* ada hitungan tidak sembarangan kemudian dihias. Sekarang ini semua sudah hilang, budaya lama sudah mulai ditinggalkan. Coba tanya anak-anak sekarang *nem bangsit*, sudah tidak

mengenal lagi bahasa Bali apa itu *nem bangsit*, dulu di sawah bila nampak punden ada upakarnya, dan biasanya setiap 5 tahun sekali ada yang namanya *ngrasak*, isi *penjor*, melepaskan bebek, kemudian setiap kajeng kliwon menghaturkan sesaji di sawah, sekarang sudah ditinggalkan, termasuk saya sudah meninggalkan budaya tersebut. Artinya saya sudah malas menghaturkan sesaji setiap kajeng kliwon (hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Bali yang beragama Hindu menjunjung tinggi ajaran *Tri Hita Karana*. Pemujaan terhadap Bhatari Sri sebagai Dewi Kesuburan merupakan upaya untuk memberdayakan sumber daya spiritual, yang dalam hal ini adalah Bhatari Sri, sebagai sumber daya *Brahman* (Parahyangan) agar kesuburan sawahnya tetap terjaga.

Setelah ajaran *Tri Hita Karana*, ajaran selanjutnya adalah tentang *tri kaya parisudha*, yaitu *kayika* (berbuat yang baik), *wacika* (berkata-kata yang baik), dan *manacika* (memiliki pikiran dan pengetahuan suci). Bekerjanya modal dasar sumber daya manusia ini secara sinergis diyakini menjadi modal utama dalam pengembangan sumber daya manusia Hindu yang berkualitas.

Ajaran berikutnya adalah tentang *karma phala* (hukum karma/perbuatan) dari *samsara/punarbawa* (kelahiran atau penderitaan kembali). Dikatakan bahwa, penafsiran yang benar atas kedua ajaran ini untuk tujuan-tujuan modernisasi masyarakat Bali memberikan landasan kepada masyarakat Bali untuk selalu berupaya berbuat yang baik dan benar untuk memperoleh pahala yang baik dan benar pula, sehingga diharapkan mampu mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan hidup tertinggi, yaitu dalam bahasa lokalnya disebut *suka lan mawali duka* (kebahagian abadi yang tidak menyebabkan kembali pada kesengsaraan). Dalam dunia bisnis materi (hidup

keduniawian), ajaran ini mengajarkan manusia Bali untuk mengumpulkan harta dan *kama* (memenuhi keinginan) yang sebesar-besarnya berlandaskan ajaran *dharma* (kebajikan), sehingga tidak akan kembali pada kemiskinan yang akan membawa pada penderitaan. Sedangkan, dalam makna spiritual, ajaran ini mengajarkan untuk berbuat baik dalam upaya mencapai *moksa*, yaitu tercapainya kehidupan bahagia yang kekal abadi di sorga.

Tuntunan Hindu dalam Weda (Rgveda 1.41.6 dan 111.29.5 dan Samaveda 502), seperti dikutip oleh Gorda (1996:151), juga memberikan orientasi nilai rasionalitas kepada masyarakat Bali bahwa untuk mencapai sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, seorang manusia Bali haruslah: (1) aktif mengambil prakarsa, bekerja keras, dan meninggalkan tradisi yang sudah ketinggalan jaman; dan (2) kreatif-inovatif; dan (3) berorientasi ke masa depan.

Akhirnya, beberapa nilai lokal Hindu Bali yang juga dinilai menjadi dasar bagi perilaku modern masyarakat Bali dewasa ini, antara lain adalah: nilai *puputan* (pengorbanan sebesar-besarnya secara tulus ikhlas tanpa pamrih), *nyalanang jengah* (mewujudkan cita-cita menjadi kenyataan), *metaksu* (berkharisma dalam profesi), *mulaisarira* (introspeksi diri), dan nilai-nilai sosial seperti *paras paros sarpanaya* (belajar seiring dan sejalan bagi kepentingan bersama), *segilik seguluk sebayantaka* (baik dan buruk dirasakan bersama), dan *saling asah* (membelajarkan), *saling asih* (saling mengasihi), dan *saling asuh* (selalu memberikan kontrol satu sama lain).

Nilai-nilai modern masyarakat Bali seperti digambarkan di atas, bukan hanya sebagai idealisme filosofis belaka. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh Geria (1991), Geertz (1979), Bagus (1994), dan Gorda (1996) menunjukkan bahwa temuan nilai-nilai rasionalitas Hindu yang memberikan sumbangan bagi proses modernisasi masyarakat Hindu adalah sejalan dengan pemikiran dan hasil penelitian ilmuwan dunia seperti Weber (1958) tentang hubungan antara Etika Protestan dan

modernisasi di Eropa, Bellah (1992) tentang modernisasi masyarakat Jepang, Geertz (1979) tentang modernisasi masyarakat muslim di Jawa Timur, dan Redding (1994) yang meneliti peranan nilai-nilai Konfusianisme, Taoisme, dan Budha yang menjiwai kapitalisme di Cina.

Orang Bali sangat percaya bahwa kehidupan sosial di dunia ini diatur dan terikat oleh hukum *rwa-bhineda*. Konsep berpikir ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia di dunia ini selalu terikat dengan dua klasifikasi yang berposisi (oposisi biner). Tetapi, ini tidak sepenuhnya menunjukkan hubungan yang eksklusif melainkan sebagian bersifat komplementer, dalam arti bahwa masing-masing sisi kehidupan itu adalah bagian dari keseluruhan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan tatanan jagad raya ini (Swellengrebel, 1960:41). Dengan cara berpikir seperti ini orang Bali percaya bahwa kehidupan ini tidak lepas dari ikatan-ikatan: *bhuana agung-bhuana alit*, *hulu-luan-teben*, *suci-leleh*, *purusa-predana*, baik-buruk, *dharmadharma*, bahagia-menderita, hidup-mati, sehat-sakit, dan sebagainya (Widja, 1989).

Pola berpikir seperti ini ternyata membentuk pola struktur sosial dan budaya masyarakat Bali. Pertama, orang Bali meyakini bahwa hidup sebagai manusia di jagad raya ini tidak lepas dari ikatan konsep *bhuana agung* dan *bhuana alit*. Kedua unsur dunia ini diyakini ikut mempengaruhi sifat karakter dan tindakan manusia. *Bhuana agung* dalam hal ini melambangkan kekuatan alam semesta yang lebih besar karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa (*Ida Sang Hyang Widhi Waca*). Sedangkan *bhuana alit* melambangkan kekuatan unsur-unsur dalam diri manusia. Karena kekuatan unsur alam semesta (kosmik) ini manusia haruslah selalu menghidupkan kekuatan dua unsur dunia ini agar memperoleh rahmat kehidupan yang baik, bahagia, sehat, dan sejahtera. Mengabaikan salah satu diantaranya dipercaya akan menimbulkan ketidakseimbangan yang

bermuara pada penderitaan, mala petaka, penyakit, dan ketidakbahagiaan (Atmadja, 1998).

Pada tingkat struktur permukaan adanya dua kekuatan kosmik ini mengatur hubungan manusia Bali dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dan dengan kekuasaan supranatural, kekuasaan para dewa/*bhatara*, kekuasaan adikodrati, Yang Maha Tunggal, yakni kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan-hubungan ini ditingkat struktur permukaan, relasi-relasi yang terbentuk secara konsisten menunjukkan adanya oposisi biner ini.

Perlu diketahui juga bahwa dalam pemikiran seperti ini sifat hubungan manusia Bali yang *rwa-bhineda* dengan lingkungan *bhuana alit* dan *bhuana agung*, di samping memiliki relasi yang sejajar karena masing-masing bersifat komplementer, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa hubungan antara *bhuana alit* dan *bhuana agung* juga bisa bersifat subordinasi. Artinya, hubungan manusia dengan kekuasaan *bhuana agung* dianggap lebih utama/superior dari pada hubungannya dengan kekuasaan *bhuana alit*.

Dalam hal ini *bhuana agung* dianggap dapat menguasai *bhuana alit* dan tidak sebaliknya. Sifat relasi-relasi seperti inilah yang nanti tampak akan dijelaskan konsistensinya pada adanya hubungan konsep-konsep *kaja-kelod* (utara-selatan) atau *kangin-kauh* (timurbaral), *hulu-teben* (atas-bawah), *suci-leteh* (suci-kotor), *segara-gunung* (laut-gunung), *purusa-predana*, laki-laki-perempuan, *dharma-adharma* (kebajikan-kejahatan), *cubhaacubha karma* (perbuatan baik-buruk), dan sejenisnya yang mengatur tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.

Sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, masyarakat Bali juga adalah masyarakat Indonesia. Secara sosial politik masyarakat Bali tampaknya juga mengembangkan relasi-relasi kekuasaan sosial politik yang sama dengan model yang telah dijelaskan terdahulu. Bagi masyarakat Bali, secara sosial politik dapat dikatakan bahwa

mereka umumnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok, suku, dan agama. Widja (1989), mengutip Last, menyatakan bahwa masyarakat Bali menempatkan kepentingan Indonesia pertama dan kepentingan Bali sebagai kedua. Dalam kerangka pemikiran strukturalisme, masyarakat Bali dalam wilayah kekuasaan *bhuana alit* menempatkan wacana kepentingan nasional sebagai bagian dari wilayah kekuasaan *bhuana agung*, dan, karena itu, nilai-nilai nasionalisme memberikan nilai-nilai transendental yang merupakan nilai-nilai supranatural yang diyakini dalangnya dari nilai-nilai kesucian para dewa. Nilai-nilai ini harus ditempatkan di *hulu-luan* kepentingannya untuk diimplementasikan dibandingkan kepentingan masyarakat Bali sendiri yang cakupannya lebih kecil, yang dianggap berada di wilayah *leben*, agar menciptakan keseimbangan pada tataran kesemestaan yang lebih luas (makrokosmos). Memang ini bukanlah satu-satunya penjelas mengapa orang Bali menempatkan kepentingan nasional berada di atas kepentingan masyarakat lokal Bali sendiri. Secara historis, berpindahnya orientasi kekuasaan sosial politik dari tangan raja-raja di Bali sebagai wakil atau manifestasi kekuasaan para dewa kepada pemerintahan nasional yang telah disepakati bersama dalam pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia, telah menyebabkan masyarakat Bali memposisikan nilai-nilai utama *keawalaran Wisnu* dalam penjelmaannya di dunia sebagai raja-raja menjadi nilai-nilai keutamaan nasionalisme sebagai nilai-nilai transendental yang dapat menyatukan dan menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam tata kerukunan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia.

Pola berpikir seperti ini tampaknya terjadi pula dalam menempatkan kedudukan orang Bali dalam tatanan kehidupan global di mana nilai-nilai *Tat Wam Asidiyakini* menjadi cerminan nilai-nilai utama dalam upaya menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat Bali sebagai

kekuatan *bhuana alit* dengan kekuasaan nilai-nilai global yang mencerminkan kekuatan kekuasaan *bhuana agung* (Widja, 1989).

Dari berbagai penjelasan di atas tampaklah bahwa secara struktural masyarakat Bali terikat pada berbagai jenis dan tingkatan kategori sosial yang makin kompleks. Semua jenis kategori lingkungan sosial yang telah dijelaskan di atas pastilah telah dimasuki oleh masyarakat Bali dalam kehidupan sosialnya. Dengan kata lain, secara tradisional, seorang manusia Bali sejak lahir haruslah mengorientasikan dirinya pada sejumlah kategori sosial baik secara geneologis, teritorial, maupun karena kekuasaan sosial politik. Ini tentu memainkan peranan yang besar dalam dialektika dan dinamika masyarakat Bali dalam membentuk proses identifikasi dirinya sesuai dengan dinamika konsep *rwa-bhineda*. Sebagai McKean (1973:32) menyatakan: "*for a Balinese, personal identity is the sum total of all 'terikal' (bonds), relationships, of affinities and bonds to kin, temple, voluntary association, hamlet, village group, and so on*".

3. Ilmu Pengetahuan. Ilmu Pengetahuan adalah serangkaian teknik untuk memperoleh pengetahuan dengan mendasari kepada observasi dan pengalaman (yaitu pengumpulan bukti-bukti faktual, demonstrasi dan pembuktian dan lain-lain). Ia tidak hanya meliputi teknik dan prosedur untuk menghasilkan pengetahuan tetapi juga bangunan akumulatif pengetahuan ini sendiri. Dengan memahaminya seperti ini, ilmu pengetahuan bukanlah bagi, kebudayaan yang bersifat Universal, tetapi hanya berkembang di tempat dan dalam waktu tertentu.

Dalam pembahasan ini, ilmu pengetahuan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan keterampilan. Keterampilan ini digunakan oleh masyarakat petani yang telah kehilangan sawahnya. Dengan demikian ilmu pengetahuan ini terkait dengan keterampilan dan terkait pula dengan sistem nafkah petani.

Pendekatan yang dipakai untuk menjelaskan sistem nafkah lebih dijelaskan melalui strategi nafkah yang diartikan sebagai kemampuan mengakses sumberdaya dan aktifitas-aktifitas yang dibangun dengan menggunakan sumberdaya nafkah. Secara sederhana *livelihood* didefinisikan sebagai cara dimana orang memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup. *Livelihood* memiliki pengertian yang lebih luas daripada sekedar *means of living* yang bermakna sempit mata pencaharian. Pengertiannya lebih mengarah pada pengertian *livelihood strategy* (strategi penghidupan) daripada *means of living strategy* (strategi cara hidup) (Turasih. 2012: 90).

Sebagai strategi membangun sistem penghidupan, strategi nafkah merupakan taktik dan aksi yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka dengan tetap memperhatikan eksistensi infrastruktur sosial, struktur sosial, dan sistem nilai budaya yang berlaku.

Berbeda dengan Scott, prinsip ekonomi politik Popkins (1986), mengatakan bahwa setiap petani sepenuhnya rasional. Petani akan rasional untuk berinvestasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik dalam bentuk hewan ternak, tanah, atau benda-benda milik pribadi. Hal ini bisa dilakukan dengan menjual surplus-surplus yang pernah diperoleh. Hubungan-hubungan sosial dipandang memiliki akar kepentingan ekonomi, misalnya hubungan patron klien sengaja dipelihara patron untuk menjaga kekuasaan dan kekayaannya. Anak-anak pun merupakan salah satu bentuk investasi, karena ia akan menjamin hari tua. Rasional dalam kacamata Popkins adalah tindakan untuk selalu dan terutama memperhatikan kesejahteraan dan keamanan diri dan keluarga (Maharani, 2008).

Kedua prinsip ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam memandang pola hubungan yang dilakukan oleh para petani. Ekonomi moral memandang bahwa

hubungan yang dilakukan petani didasarkan atas beberapa prinsip moral yang umum (budaya), sedangkan ekonomi politik didasarkan oleh perhitungan apakah hubungan semacam itu dapat/akan menguntungkan diri dan keluarganya atau tidak (untung atau rugi). Ekonomi moral dan ekonom politik merupakan konstruksi tentang pilihan tindakan dan perilaku yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan (Maharani, 2008: 126).

Hal tersebut terjadi pada masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan. Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang tadinya sebagai petani kini berangsur-angsur berubah menjadi masyarakat pedagang atau masyarakat komersial, seperti yang diungkapkan oleh Wayan Murdana sebagai berikut :

Bertani sudah tidak menarik lagi bagi saya. Apalagi saya sudah tidak punya tanah lagi. Sekarang justru saya menjadi makelar tanah. Kalau dulu saya dirugikan karena proses jual beli tanah, sekarang saya mencari untung dari proses jual beli tanah. Kayak balas dendam ya ? (Hasil wawancara dengan Wayan Murdana, pada tanggal 16 Januari 2016).

Hampir senada dengan hasil wawancara di atas Nyoman Sumarni menyatakan bahwa membuka warung jauh lebih menguntungkan daripada menjadi buruh tani. Hal ini terungkap dalam kutipan wawancara berikut ini :

Setelah sawah saya habis terjual, ludes, saya nggak mau menjadi buruh tani. Hasilnya gak seberapa, nggak menghasilkan apa-apa. Dengan mengumpulkan uang yang masih tersisa saya gunakan untuk membuka warung ini. Meskipun tidak begitu besar, namun warung ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarga saya, bisa beli kendaraan, menyekolahkan anak, bahkan bisa untuk beli perhiasan yang saya inginkan. Dibandingkan tetangga saya yang hanya jadi buruh tani, kayaknya keluarga saya lebih sejahtera (Hasil wawancara dengan Nyoman Sumarni, pada tanggal 16 Januari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan yang dulunya masyarakat agraris telah berubah menjadi masyarakat pedagang yang hidup dengan perhitungan untung dan rugi. Hal ini menjelaskan prinsip ekonomi moral seperti yang dikemukakan Popskin. Ekonomi moral yang telah mengkonstruksi tindakan dan perilaku yang dipengaruhi oleh keadaan yaitu keadaan setelah hidupnya merugi sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan.

Transformasi sosial secara langsung ikut merubah sistem nafkah petani yang sebelumnya sangat tergantung dari alam menjadi ketergantungan oleh harga. Keberhasilan usaha kemudian diukur dengan nominal angka sehingga petani terjebak pada pragmatisme nilai ekonomi.

Dalam setting ekologi pedesaan sebagaimana di Kecamatan Denpasar Selatan, komunitas petani yang berinteraksi intensif dengan alam menghasilkan sejumlah ikatan asosiasional berbasis kolektifitas yang berfungsi sebagai jaring pengaman sistem penghidupan. *Patron klien* merupakan bagian terpenting dari mekanisme *sosial security net* di pedesaan. Jejaring produksi-konsumsi pedesaan tersebut terbukti secara berabad-abad bekerja secara efektif dan mampu menjamin kelangsungan sistem kehidupan rumah tangga pedesaan secara kolektif. Ikatan-ikatan sosial tersebut mampu memelihara ketahanan ekonomi rumah tangga sekalipun dalam situasi yang sangat ekstrim (paceklik dan krisis ekonomi) (Purnomo, 2007 : 52).

#### 4. Budaya

Kebudayaan suatu bangsa dimana pun agaknya berakar dari kebudayaan lama yang dihasilkan oleh nenek moyangnya. Kata kebudayaan seringkali merupakan istilah yang paling luas cakupan maknanya. Setiap orang awam merasa tahu tentang apa yang dimaksud dengan kebudayaan, tetapi masing-masing menghayati menurut rasanya sendiri-sendiri. Para ahli ternyata tidak mudah

membuat batasan definisi yang memuaskan dan dapat diterima semua pihak.

Koentjaraningrat (1974:19) menyebut budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya, artinya daya dari budi, kekuatan dari akal. Menurut Edward B. Tylor dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture* dalam Sujarwa (1998:8) kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1974:19), pengertian kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Seperti juga AL. Kroeber (dalam Alan Dundes, 1968:3.) membuat definisi kebudayaan sebagai berikut:

*A culture is a historically derived system of explicit and implicit design for living, which tends to be shared by all or specially designated member of a group. By culture we mean all those historically created designs for living, explicit and implicit, rational and nonrational, which exist at any given time as potential guides for the behavior of men.*

Kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kesemuanya dapat ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1985:40) memaparkan bahwa dalam perwujudannya kebudayaan dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Ketiga wujud kebudayaan tersebut menjadi objek telaah

para ahli baik sastra, filologi, ilmu sosial, sosiologi, antropologi, maupun arkeologi, sehingga dalam kebudayaan tercermin kembali nilai-nilai yang berkaitan dengan peran anggota masyarakat. Hal tersebut misalnya terwujud dalam bentuk-bentuk doa, upacara-upacara keagamaan, ceritacerita rakyat, dan adat-istiadat.

Kebudayaan mempunyai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Selo Sumarjan (1964:24) mengenai 4 unsur pokok yang meliputi:

- a. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi
- c. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
- d. Organisasi kekuatan (politik)

Sejalan dengan pernyataan Selo Sumarjan, Koentjaraningrat (1985: 186-205), menyebutkan tujuh unsur kebudayaan, mencakup: (a) bahasa, (b) sistem pengetahuan, (c) organisasi sosial, (d) sistem peralatan hidup dan teknologi, (e) sistem mata pencaharian hidup, (f) sistem religi, (g) kesenian.

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.

Secara sederhana, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh

semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan-percobaan yang bersifat empiris (*trial and error*).

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara (Kusumoharyono, 2000). Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian

Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta.

Sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan. Unsur terakhir adalah kesenian. Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan

berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.

Kebudayaan Bali di Kecamatan Denpasar Selatan setelah terjadinya alih fungsi lahan persawahan telah memperlihatkan suatu dinamika dan perubahan yang sangat pesat. Pendorong utama dari perubahan ini adalah fenomena internal dan eksternal yang sangat berpengaruh dalam menstraformasi struktur masyarakat yang semula bersifat agraris kini beralih menuju masyarakat industri dan jasa. Pandangan hidup orang Bali terbentuk dari gabungan alam piker Bali tradisional dan agamaHindu atau filsafat Hindu-Bali (Purwadi, 2005:3). Salah satu wujud pandangan hidup orang Bali direpresentasikan melalui upacara religius.

Sistem upacara religius yang bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang ada di alam gaib. Sistem upacara keagamaan ini melaksanakan, melambangkan, berbagai konsep yang terkandung dalam sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan merupakan wujud kelakuan atau pengejawantahan agama. Seluruh sistem upacara itu terdiri dari anekaragam upacara-upacara yang bersifat harian, musiman atau kadangkala. Masing-masing upacara terdiri dari kombinasi berbagai unsur upacara seperti berdoa, bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari, drama suci, berpuasa, bersemedi, dan bertapa. Upacara-upacara dan tata urutan unsur-unsur tersebut sudah tentu buatan manusia dahulu kala, dan merupakan ciptaan akal manusia.apalagi peralatan upacara seperti gedung pemujaan, masjid, gereja, pagoda, patung-patung dewa. Semua itu adalah bagian dari kebudayaan. Walaupun demikian upacara keagamaan belum lengkap kalau tidak dihinggapi dan dijiwai emosi keagamaan. Di sinilah masuk komponen pertama yaitu cahaya Tuhan yang membuat upacara itu menjadi suatu aktivitas yang keramat.

Implikasi suprastruktur dari terjadinya alih fungsi lahan persawahan ditinjau dari perspektif kebudayaan dan keagamaan khususnya budaya dan agama Hindu Bali yang berkembang di tengah masyarakat Bali, salah satu contohnya adalah hilangnya Pura Ulundanu yang merupakan infrastruktur keagamaan yang digunakan untuk memuja Betara Sri atau Dewi Sri, dewi kesuburan, khususnya kesuburan persawahan. Pura Ulundanu ini lokasinya berada di tengah persawahan. Saat ini Pura Ulundanu ada di tengah perumahan seperti yang terlihat dalam gambar berikut.



**Gambar 4.4 Pelinggih Pura Subak yang Sudah Tidak Berada di Persawahan Lagi**  
**Sumber: Wiratha, 2016**

Akibat alih fungsi lahan ini, fungsi Pura Ulundanu menjadi hilang. Hilang disini bisa berarti hilang keberadaannya atau hilang secara fisik, tapi juga bisa berarti hilang fungsinya. Akibatnya kalau dulu Pura Ulundanu ini diurus oleh seorang Pekaseh, setelah adanya alih fungsi lahan Pura Ulundanu diurus oleh pemerintahan desa, sementara itu Pekaseh beralih fungsi mengerjakan pekerjaan lainnya. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Made Sukaja, mantan Bendesa Adat dan mantan LPM Ssetan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Ketika subak sudah tidak ada, irigasi tidak ada, sehingga sekarang Pekaseh punya fungsi lain yaitu ikut mengesahkan jual beli tanah yang ada di wilayahnya, saya juga tidak tahu kenapa Pekaseh ikut mensahkan jual beli tanah, apa mungkin dari BPN yang mensyaratkan seperti itu saya juga kurang tahu, tapi yang saya denger bahwa Pekaseh ikut mensahkan jual beli tanah, artinya bahwa Pekaseh sudah tidak lagi mengurus air, musim tanam, yang diurus sekarang adalah mensahkan jual beli tanah, itu artinya Pekaseh sudah beralih fungsi. Kalau dulu masih ada sawah, pekaseh mendapat hasil dari mengelola tanah negara, tetapi sekarang tanah negara sudah diambil alih oleh desa karena Pura Ulundanu sudah diurus oleh desa, tanah negara tersebut luasnya kurang lebih 30 are, tapi dari 30 are itu diambil oleh desa sumerta kira-kira seluas 6 are, karena tanah pelabe pura di sumerta dijadikan sekolah, kenapa tanah tersebut diberikan, karena kita tidak punya surat kepemilikan tanah tersebut, hanya mengakui saja tanah negara tersebut, sehingga hasil jerih payah menjadi Pekaseh dari mensahkan jual beli tanah, itu kira-kira (Hasil wawancara dengan I Made Sukaja, mantan Bendesa Adat dan mantan LPM Ssetan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hampir senada dengan wawancara di atas, I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kepaon sekaligus petani, juga mengatakan Pekaseh seperti dirinya kini beralih fungsi

menjadi semacam makelar tanah. Hal itu dilakukan karena Pura yang diurusnya sudah beralih fungsi, seperti dituturkan sebagai berikut :

Bila ada orang yang kebingungan mencari tanah miliknya, dia minta tolong dengan saya, untuk mengantarkan ke lokasi tanah miliknya, karena yang punya tanah ini kebanyakan orang dari Bualu, dari puri, dari Kuta, disamping itu, bila ada deplover yang datang ke saya, ingin membeli tanah mau dijadikan tanah kapling saya carikan lahan, bila ada permasalahan, umpamanya, deplover beli tanah tapi tidak ada jalan, saya dimintai bantuan untuk mencari orang-orang yang mempunyai tanah disekitar tanah yang dimiliki oleh deplover, saya ajak rembug, yang punya tanah itu, saya ajak ngobrol, ini akan ada pembukaan tanah kapling dia perlu jalan, biar sama-sama jalan relakan tanah itu dijadikan jalan (Hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015)

Hasil kedua wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pekaseh sekarang beralih fungsi karena tidak ada lagi pura yang diurusnya sebagai akibat alih fungsi lahan. Hal itu disebabkan karena pura yang dulu ada di tengah sawah, kini sudah hilang. Kalaupun masih ada, tapi keberadaan pura tersebut ada di pinggir jalan, sudah tidak di tengah sawah lagi. Meskipun masyarakat masih ada yang mengemponnya, tapi jumlahnya sudah menjadi sangat sedikit sehingga penghasilan dari seorang Pekaseh menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu para Pekaseh beralih fungsi dengan mengerjakan pekerjaan lain.

Pura Ulundanu yang sudah ditinggalkan oleh Pekasehnya tersebut, selanjutnya diurus oleh pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh I Made Sukaja, mantan Bendesa Adat dan mantan LPM Sesetan sebagai berikut:

Yang saya tahu adalah karena perubahan dari peruntukan tanah sawah menjadi perumahan, serta pengairan sudah tidak ada, petani juga sudah tidak ada, sehingga Pekaseh merasa kesulitan dalam hal

keberlanjutan Pura Ulundanu, itulah yang menyebabkan mengapa Pura Ulundanu diserahkan ke desa untuk mengurusnya (Hasil wawancara dengan I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan LPM Ssetan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Alih fungsi lahan telah mengubah pola struktur sosial masyarakat, terutama fungsi-fungsi lembaga tradisional seperti *subak* dan stuktur organisasinya. Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat yang lainnya yakni I Made Sukaja sebagai berikut :

Karena desa sudah tidak mempunyai penghasilan apa-apa lagi, punya lapangan sudah difungsikan untuk sosial, seperti olahraga, sehingga tidak bisa menghasilkan, sedangkan yang menghasilkan hanya LPD saja, darimana lagi dapat dana, ternyata ada tanah negara yang dulu dikelola oleh Pekaseh, sekarang sudah dikelola oleh desa, tanah tersebut dikontrakkan dengan tujuan uang tersebut dipakai untuk piodalan Pura Ulundanu dan pemeliharaan fisik pura dan lain-lain. Itulah menjadi alasan mengapa tanah negara tersebut dikontrakkan. Dalam hal ini, upakara piodalan yang menjadi beban masyarakat, prajuru desa mencoba mengelola aset desa dengan cara mengontrakkan tanah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, artinya, ketika piodalan masyarakat tidak lagi dikenakan kewajiban-kewajiban, termasuk pemeliharaan fisiknya, karena semuanya sudah ditanggung oleh desa pekraman (Hasil wawancara dengan I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan LPM Ssetan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa akibat alih fungsi lahan persawahan ini berefek domino yaitu dari tergusurnya Pura Ulundanu karena menyempitnya lahan persawahan, semakin sedikitnya masyarakat petani yang mengempon Pura Ulundanu. Pekaseh tidak lagi mengurus Pura Ulundanu. Selanjutnya Pura Ulundanu diurus oleh desa dan karena desa kesulitan

dana maka tanah yang dulu dikelola oleh Pekaseh kemudian dikontrakan, hasilnya digunakan untuk biaya piodalan Pura Ulundanu, pemeliharaan fisik dan sebagainya.

## **BAB V. PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya ada beberapa simpulan yang dapat diambil dalam kajian ini yang terdiri dari: Pertama, proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan terjadi melalui hegemoni, negosiasi dan oposisi. Alih fungsi lahan persawahan tersebut merupakan bentuk hegemoni pengusaha (permodalan) dengan didukung oleh penguasa (pemerintah) yang dilakukan secara halus, canggih dan intelek melalui wacana pembangunan. Pada awalnya petani merasa untung karena dengan masuknya investor yang melakukan pembangunan perumahan dan sarana prasarana kegiatan bisnis di daerahnya, yang berarti ada peredaran uang dalam wilayahnya. Akan tetapi, petani telah terjebak oleh ideologi kapitalis yang diusung oleh pengusaha. Alih fungsi lahan melalui negosiasi terjadi dengan dua cara yaitu pertama negosiasi dilakukan pemilik modal sebagai pemilik uang dengan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan, dengan sumber daya yang dimiliki berupa kekuasaan untuk merubah kebijakan RTRW Kecamatan Denpasar Selatan yang semula menjadi lumbung padi menjadi fungsi lain di luar pertanian. Cara yang kedua negosiasi dilakukan dengan masyarakat pemilik sawah agar mau melepaskan lahan persawahannya untuk digunakan sesuai dengan keinginan para pemilik modal dengan iming-iming untuk membeli lahan persawahan mereka dengan harga tinggi. Proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan meskipun awalnya ada sedikit penolakan atau oposisi/kontra hegemoni namun penolakan itu tidak berkembang menjadi suatu perlawanan terbuka sehingga dapat dikatakan proses alih fungsi lahan persawahan tersebut terjadi tanpa oposisi yang berarti.

Kedua, ideologi yang bekerja dibalik terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan adalah ideologi ekonomi kapitalis, dan gaya hidup terutama fatalisme serta pragmatisme. Kaum kapitalis dalam melakukan alih fungsi lahan

menggunakan dalih pembangunan sehingga mendapat restu dari pemerintah. Ideologi ekonomi kapitalis dalam bentuk pembangunan yang dibumbui dengan janji manis tersebut menghegemoni masyarakat sehingga proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan berjalan dengan begitu cepat tanpa disadari oleh masyarakat.

Kenyataan itu dipercepat dengan perkembangan gaya hidup modern yang konsumtif dan hedonis. Saat ini petani disuguhi kehidupan-kehidupan yang instan dan citra keasyikan dunia modern. Pada situasi itu petani terjebak pada sikap fatalistik, dimana mereka menganggap keadaan yang menimpanya merupakan nasib, akibat ketidak-berdayaan petani terhadap hegemoni dan kekuasaan investor (pemodal) dalam proses alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Fatalisme yang dialami petani merupakan sebuah keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain. Akumulasi gaya hidup fatalisme dan pragmatis menyebabkan alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan begitu massif terjadi.

Ketiga, implikasi alih fungsi lahan persawahan pada kehidupan petani di Kecamatan Denpasar Selatan meliputi implikasi terhadap infrastruktur, struktur sosial dan suprastruktur. Implikasi terhadap infrastruktur meliputi implikasi terhadap teknologi, ekonomi, dan ekologi. Implikasi infrastruktur mempengaruhi pula pola kehidupan masyarakat atau struktur sosial masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan. Implikasi terhadap struktur sosial bisa dilihat dari perubahan stratifikasi sosial, munculnya etnis-etnis lain selain Bali, perubahan kebijakan (*policy*) berkaitan dengan pemanfaatan tanah, pembagian kerja secara seksual, sistem kekeluargaan dan kekerabatan, serta pendidikan. Selanjutnya perubahan infrastruktur, struktur sosial tentunya juga berimplikasi pada tataran suprastruktur yang meliputi ideologi, agama, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Dalam kajian ini kesenian dan kesusastraan digabung menjadi kebudayaan, mengingat implikasi alih fungsi lahan persawahan lebih berpengaruh pada kebudayaan dari pada kesenian maupun kesusastraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. 2010. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneka.
- Abraham, M. F. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga; Suatu teori Umum Pembangunan*. M. Rusli Karim (Penerjemah). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Adhika, I Made. 1994. "Peran Banjar dalam Penataan Komunitas, Studi Kasus Kota Denpasar". *Disertasi ITB*, Bandung.
- Agastya, IBG. 2004. "Menghayati Hakikat Hidup dalam Orientasi Keajegan Hindu". *Bali Post* (Ed). *Ajeg Bali Sebuah Cita-cita*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Agung, A. M. Lilik. 2010. *Ketika Nurani Ikut Berbisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Alisjahbana. 2005. *Sisi gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi : Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Anindya Putra, Gst Putu. 1991. "Kajian Kearah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali dalam Penataan Ruang Kota dan Penerlusuran Syarat-syarat Ruang sebagai Landasan Perwujudan Ruang Kota yang Beridentitas, Studi Kasus Kota Gianyar", *Disertasi Perencanaan Wilayah dan Kota*. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Anitasari, Rahayu Fery, 2008. *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anonim. 1983. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman*. Denpasar: Biro Hukum Dan HAM Setda Provinsi Bali.
- Ardana, I Gst. Gde. 2007. *Inventarisasi Aspek-aspek Nilai Budaya Bali*. Denpasar: Pemda Provinsi Bali.

- Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Astika, I Ketut Sudhana. 1986. *Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- \_\_\_\_\_. 1994. "Seka Dalam Kehidupan Masyarakat Bali". Dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Atmadja, N. B. 1998. "Memudarnya Demokrasi Desa: Pengelolaan Tanah Adat, Konversi dan Implikasi Sosial dan Politik di desa Adat Julah, Buleleng, Bali". *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1979. "Kebudayaan Bali" *Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Bandura, A. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall.
- Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1982. *Pengembangan Arsitektur Tradisional Bali untuk Kesperasian Alam Lingkungan, Sikap Hidup, Tradisi dan Teknologi*. Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali.
- Barker, Chris. 2009. *Culture Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Basrowi. 2003. "Perlawanan Masyarakat terhadap Kekuasaan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dalam Era Transisi: Studi Perlawanan dari Perspektif Fenomenologi". *Disertasi*, Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Bellah, R. N. 1992. *Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang*. (Wardah Hafidz dan Wiladi Budiharja Penterjemah). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bobi. 2002. "Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, kelembagaan dan Peraturan". Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM.

- Bourdieu, Pierre. 1983. *Language and Symbolic Power*. Cambridge : Polity.
- Brassers, Hans. 2004. *Implementing Sustainable Development: How to Know What Work, Where, When and How*. McGill-Queens University Press.
- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi, 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram Di Pedesaan Jawa (Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20)*. Jakarta: LP3ES.
- Budihardjo, Eko. 1986. *Architectural Conservation in Bali*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chambers, Robert. 1992. "Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts ?". *Journal Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1.
- Coser, L.A. 1971. *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Covarrubias, Miguel. 1972. *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Damsar. 2000. *Sosiologi Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Darmawan, D. P., 2007. "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Dalam Konteks Pertanian Berkelanjutan: Suatu Analisis Programasi Linear di Pedesaan Bali, Jawa Timur dan Jogjakarta". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dharmayuda, I.M.S., 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Dharmayudha, I M S. dan Cantika, I W. K. 1991. *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Dhyana, Gede Winata. 2009. "Bergesernya Fungsi Lahan di Kawasan Pantai dan Perbukitan Bali". *Denpasar, Jurnal*. Vol. 12, No. 22, hlm. 12-27.
- Dryzek, John S. 1997. *The Politic of The Earth: Environmental Discourses*, New York: Oxford University Press.

- Dundes, Allan. 1968. *The Study of Folklore*. Engelwood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
- Durkheim, E. 1965. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York. The Free Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, dan Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press Pustaka Bradjaguna.
- Evers, Hans-Dieter. 1986. "Ekonomi Bayangan, Produksi Subsisten, dan Sektor Informal: Kegiatan Ekonomi di Luar Jangkauan Pasar dan Negara". *Prisma* No. 5.
- Fahmid, Imam Mujahidin. 2004. *Gagalnya Politik Pangan Di Bawah Rezim Orde Baru, Kajian Ekonomi Politik Pangan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan (Sandi Kota) dan Institute For Social and Political Economic Issues (ISPEI).
- Fairchild, H. P. 1962. *Dictionary of Sociology*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co.
- Fakih, M. 2002. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fillingham, Lydia Alix. 2001. *Foucault untuk Pemula*, terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Fischer, Frank. 1995. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Foucault, Michel, 1997, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Moder*, Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 1972. *The Archaeology of Knowledge*, terj. A.M. Sheridan Smith. London: Tavistock.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gatersleben, B, and Vlek C. 1998. "Measurement and Determinants of Environ-Mentally Significant Consumer Behavior", *Environment And Behavior*, Vol. 34, No. 3, pp. 335-362
- Geertz, Clifford, 1979. *Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- \_\_\_\_\_. 1976. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (Agriculture involution)*, (Supomo, Trans.). Jakarta: Bhratara K.A.
- Geria, I Wayan. 1991. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Budaya Bali dalam Seni dan Estetika". *Bali Post*.
- Giroux, H.A. 1981. *Ideology, Culture, and the Process of Schooling*. Philadelphia: Temple University Press.
- Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*. Sukadijo (Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gorda, IGN. 1996. *Etika Hindu dan Perilaku Organisasi*. Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Note Books*. New York: International Publisher.
- Griaddhi, I Ketut Writa. 1991. *Subak Dalam Perspektif Hukum: Dalam Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Hall, Stuart. 1997. *Encoding-Decoding Culture, Media, Language*. London: Hutchinson.
- Harker. 2005. *(Habitus x modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Haryatmoko. 2007. "Derrida yang Membuat Resah Rezim Dogmatis dan Kepastian", *Basis*, Nomor 11-12, Tahun ke-56, November-Desember.
- Hasan, Z. 1986. "Individual Development-Oriented Modernity and Forces Promoting it among Students at Four Teacher Training Colleges in Malang, Indonesia". *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Florida: The Florida State University.
- Hidayaturrehman. 2014. "Petani Lokal dan Kapitalisme (Studi Respon Petani Lokal Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa

- Nungga dan Desa Maria Kabupaten Bima)". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1.
- Horton, P.B. dan Hunt, C. L. 1991. *Sosiologi. Edisi keenam*. A. Ram dan T. Sobari (Penerjemah). Jakarta: Penerbit Elangga.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup; teori dan realita*, editor: Alfathri Adlin. Yogyakarta: Jala Sutra
- Husein, Ali Sofyan Husein. 2005. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Irawan, B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 21 No.2 Oktober 2003. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Pertanian Departemen Pertanian.
- Jaqueline, M. Nolan-Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*. ST. Paul Minn : West Publishing.
- Jayadinata JT. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah* Edisi Ketiga. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- JBAF Mayor Polak, 1966, *Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (terj. oleh Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Johnson, D.P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. R.M.Z. Lawang (Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Kaplan dan Manner. 2000. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: BAPPENAS.
- Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani, Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Lapar : Negeri Salah Urus*. Yogyakarta: Resist Book.

- Koentjaraningrat. 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : PT. Dian Rakyat
- \_\_\_\_\_. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Sejarah Teori Antropologi Jilid I dan II*. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kratz, Ulrich, 1974. *Bahasa, Komunikasi, dan Kontrol Sosial, dalam Prisma 6/1974*. Jakarta: LP3ES.
- Lauer, R. H. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Alimandan (penterjemah). Jakarta: Bina Aksara.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Cetakan Kedua. Depok: FISIP UI Press.
- Lefebvre, H. 1968. *The Sociology of Marx*. New York: Vintage.
- Lestari. 2009. *Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan*. Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara.
- Liber, Rochelle. 2009. *Introducing Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern, dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu.
- Macfarlane, Alan. 1991. "Reflections On Peasant and Capitalist Morality". Peasant Seminar at Trinity College.
- Magnis-Suseno, F. 2001. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mantra, I.B. 1993. *Bali: Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.
- Mardikanto, T. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Martodirdjo, Haryo S. 1991. *Orang Tugutil Di Halmahera Struktur Dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*. Bandung: Disertasi: Program Pascasarjana Unpad.

- MC Donough, Roisin dan Rachel Horrison. 1978. "Patriarchy and Relations of Production". A Kuhn dan A.M. Wolpe (ed), *Feminism and Materialism : Women and Modes of Production*. London : Routledge dan Keegan Paul.
- McKean, P.F. 1973. "Cultural In volution: Tourists, Balinese and the Process of Modernization in an Anthropological Perspective". *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Brown University.
- Meganada, I Wayan. 1990. *Morfologi Grid Paterrn Pada Desa di Bali*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mormont, Marc. 1987. "The Emergence of Rural Struggles and Their Ideological Effects", *International Journal of Urban and Regional Research* 7(4), hlm. 559-578.
- Mubyarto. 2004. *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Mustain. 2007. *Petani Vs Negara : Gerakan Sosial Petani melawan hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Nasoetion, Luthfi Ibrahim, 2003. *Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya*, Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- North, North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafa'at. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Parimin, Ardi P. 1986. *Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village, Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept In Bali*. Japan: Disertasi Universitas Osaka.
- Paturusi, Syamsul Alam. 1988. "Pengaruh Pariwisata terhadap Pola Tata Ruang Perumahan Tradisional Bali". *Disertasi*, Bandung: ITB.

- Pearse, Andrew. 1971. "Metropolis and Peasant: The Expansion of the Urban-Industrial Complex and the Changing Rural Structure", dalam *Peasants and Peasant Societies*, Theodore Shanin (ed.), hlm. 69-80. Harmondsworth: Penguin Books.
- Pendit, Nyoman S. 1990. *Komodifikasi dan Komersialisasi di Bali*. Jakarta: PT. Pradana Paramita.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (selanjutnya disebut Perda RT/RW Kota Denpasar).
- Picard, Michel. 2006. *Dampak Komersialisme di Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Piliang, Yasraf Amir. 2009. *Hiper Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta : LKIS.
- Pitana, I Gede, 2003. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi OFFSET.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Popkin, Samuel. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta : Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Powell, Hickman, 1930. *Bali the Last Paradise*. New York: Dodd, Mead.
- Prakarsa, Eko Bagus. "Dampak Alihfungsi Lahan Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Deli Serdang". *Disertasi Fakultas Pertanian, Universitas Sumatra Utara Medan*, 2010.
- Pudja, I Gde. 1997. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari.
- Purnomo, A. M. 2007. "Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan : Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Provinsi Jawa Barat" *Disertasi, Progam Studi Sosiologi, IPB*.
- Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008. "Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)". Penelitian (tidak diterbitkan) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra, I Gusti Made. 1973. *Tata Nuntun Miwah Midabdabin Desa Adat Ring Bali*. Denpasar
- \_\_\_\_\_. 1988. *Pengaruh Pariwisata dalam Perkembangan Bangunan Perumahan Tradisional Bali di Desa Bualu*. Denpasar: Laporan Penelitian Universitas Udayana.
- Radiyta, G. Ritzer, 2011. *Ketika Kapitalisme Berjingkrang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Redding, S. G. 1994. *Jiwa Kapitalis Cina*. (Suharsono: Alih Bahasa). Jakarta: Dinastindo Adiperkasa Internasional.
- Ripley, Randal B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Yakarta: Kencana.
- Sabatier, Paul A and Hank C. Jenkins-Smith, 1989. *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, Co.Schön: Westview Press.
- Said, Edward W. 2001. *Orientalisme*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sajogyo. 1991. *Penanggulangan Kemiskinan; Beberapa Pokok Bahasan*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Era Otonom*. Jakarta: Pusat Penelitian.
- Sanderson, Stephen K. 2011. *Makrososiologi : Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua, Terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
- Sardar, Ziauddin dan Borin Van Loon. 1997. *Cultural Studies for Beginners*. Cambridge : Icon Book Ltd.

- Sardiana, I Ketut, Windia, Wayan P. dan Sudantra, I Ketut, 2011, *Peta Desa: Panduan Mengelola Konflik Batas Wilayah*, Udayana University Press, Denpasar.
- Sarwono, 1989. *Psikologi remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Saulnier, Christine Fynn. 2000. *Feminist Theories and Social Work*. New York: The Haworth Press.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (tej.). Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Perlawanan Kaum Petani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seligson, Mitchell A. 1996. "Agrarian Inequality and the Theory of Peasant Rebellion", *Latin American Research Review*, Vol. 31, No. 2.
- Setia, Putu. 1992. *Cendekiawan Hindu Bicara*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Ajeg Bali Untuk Siapa". *Bali Post*.
- Simatupang, P. dan B. Irawan. 2012. "Pengendalian Konversi Lahan Pertanian : Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi". *Makalah Seminar Nasional "Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian"*, 25 Oktober 2002. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Subak: Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya, dan Agama Hindu*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Skocpol, Theda. 1979. *State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Smith, D.A. dan R.J. Nemeth. 1998. "Urban Development in South East Asia: an Historical Structural Analysis", dalam Drakakis dan Smith (ed.). *Urbanization in Developing World*. New York: Routledge.
- Soebandi, Ketut. 1990. *Konsep Bangunan Tradisional Bali*. Denpasar: Percetakan Bali Post.
- Soemardjan, Selo. 1964. *Setangkai Bunga Sosial*. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1996. "Bisakah Subaltern Speak?" *Marxisme dan Interpretasi Kebudayaan*. Ed. C. Nelson dan L. Grossberg. Basingstronke: MacMillan Education.
- Sri, Dwi Rezki. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumni.
- Stopsky, F. dan Lee, S. 1994. *Social Studies in a Global Society*. New York: Delmar Publishers Inc.
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta : Qalam.
- Sudantra, I Ketut dan Windia, Wayan P., 2012, *Sesana Prajuru Desa: Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Sudiasa, I D K. 1992. "Sosialisasi Anak dalam keluarga pada Masyarakat Bali: Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Kelurahan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Bali". *Disertasi*, IPB Bogor.
- Sudikan, Setya W. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sugiono, M. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sujana, N. N. 2004. "Konflik Sosial di Bali: Fenomena dan Strategi Penanggulangannya". dalam I Nyoman Darma Putra (Ed). *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sujarwa. 1998. *Manusia dan Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Sukadi. 2006. "Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana". Ringkasan *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan). Bandung: UPI.
- Sukerti dan Ariani. 2014. "Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (Studi di kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE-Universitas Indonesia.
- Sukmawati, Emi Liandari, 2009. *Perijinan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sulistyawati. 1985. *Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Rumah Tradisional Bali di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan*. Denpasar: P3M Universitas Udayana.
- Sumarta, Ketut. 2008. *Subak Inspirasi Manajemen Pembangunan Pertanian*. Denpasar: Citra Budaya.
- Sumarti, Titik. 2007. "Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 01, No. 02.
- Sumarwan, A. 2005. "Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru", *Basis*, Nomor 11-12, November-Desember.
- Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sunarto. 2000. Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak. Semarang: Mimbar Offset dan Yayasan Adikarya Ikapi.
- Suputra, Dewa Putu Arwan, Ambarawati, I.G.A.A dan Tenaya, I Made Narka, 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung", *E-Journal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol. 1, No. 1.
- Surpa, I Wayan. 2011 "Implikasi Alih Fungsi Lahan terhadap Eksistensi Pura Subak dan Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar". *Disertasi* pada Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana.

- Suryadi, A. 2002. "Memahami Life Skills". *Media Indonesia*, 14 Pebruari 2002.
- Sutawan, N. 2008. *Keberadaan PurapadaSubak*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Sutha, I Gusti Ketut, 1988, "Ekstensi Serta Peranan Hukum Adat di Indonesia" *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di Fak. Hukum UNUD*, Denpasar.
- Suwena, I Ketut, Ni Putu Ratna Sari dan I G. P. Bagus S. Mananda. 2012. "Studi Tentang Arah Perubahan Subak Muwa Sebagai Akibat Perkembangan Sarana Kepariwisata Di Kelurahan Ubud-Gianyar". Laporan Penelitian Dosen Muda, Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Swellengrebel, J.L. 1960. Bali, Some General Information. Dalam *Bali: Studies in life, Thought and Ritual*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Takwin, Bagus, 2009. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tewney, R.H. 1966. *Land and Labor in China*, Boston : Beacon Press.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 2i*. Magelang: Tera Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan*. Magelang: Tera Indonesia.
- Turasih, Soeryo Adiwibowo. 2012. "Sistem Nafkah Rumah Tangga Petani Kentang Di Dataran Tinggi Dieng (Kasus Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Sodality*. Vol. 6, No. 2, hlm. 196-207
- Utari, N.K.S. 2006. "Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali". Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI). Surabaya.
- Warsana S.P. 2008. "Strategi Untuk Melakukan Penyuluhan Pertanian Untuk Petani Kecil." *Tabloid Sinar Tani*. Edisi 9 Januari 2006.

- Weber, M. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. (Translated by Talcott Parsons). New York: Charles Scribner's Sons.
- White R.E., 1995. *Introduction to the Principles and Practices of Soil Science*. Blackwell Scientific Publ, Palo Alto, CA.
- Wiasti, N.M. 2008. "Gender dan Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi tentang Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Bali". *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Vol. 7, No. 1.
- Widja. I G. 1989. "Bali and Its Society: Continuity and Change". *Makalah*. Disampaikan di Sin Petersburg University, Florida, USA.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah: Suatu Perspektif dalam Menyongsong Tatanan Baru Kehidupan Berbangsa*. Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Windia, Wayan P. dan Sudantra, I Ketut, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Wingarta, P.S. 2006. *Bali Ajeg. Ketahanan Nasional di Bali Konsepsi dan Implementasinya*. Jakarta: Grafika Indah.
- Woods, Michael. 2003. "Deconstructing Rural Protest: The Emergence of a New Social Movement", *Journal of Rural Studies* 19, hlm. 309-325.
- Yadav. Jai Singh. 1998. "Seni dan Filosofi Bangunan Candi di Indonesia-India". Dalam *Candi sebagai Warisan Seni dan Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Cempaka Kencana.
- Yoga, Pradipta. 2006. *Pengikisan Budaya dan Kearifan Lokal Kearah Modernisasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Young, Iris Marion. 2005. "Lived Body versus Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity." In *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays*. New York: Oxford University Press.
- Zoetmulder, P.J. 1995. *Kamus Jawa Kuno*. Jakarta: Gramedia.
- Zohar, Danah, dan Marshall, Ian. 2004. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Jakarta: Pustaka Mizan, 2001.

# DAMPAK PENGGUNAN LAHAN PERSAWAHAN TERHADAP KEHIDUPAN PETANI



Besarnya pengaruh komersialisasi tanah dalam bentuk alih fungsi lahan tidak saja mengakibatkan berkurangnya ketergantungan masyarakat desa terhadap sektor pertanian, tetapi juga mengubah orientasi produksi para petaninya. Perubahan orientasi tersebut terlihat dari tujuan kegiatan produksi yang dilakukan. Pada mulanya kegiatan produksi hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri (konsumsi), kemudian berubah menjadi kegiatan produksi untuk mendapatkan manfaat ekonomi yaitu keuntungan. berkembangnya pariwisata di Bali yang dimulai tahun 1960 dan adanya alih fungsi persawahan yang dimulai tahun 1990- an masyarakat Bali termasuk masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan mulai meninggalkan kegiatan mereka sebagai petani. Alasannya penghasilan dari sektor pertanian kurang menjanjikan, sedangkan dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, mereka mendapatkan penghasilan yang lebih besar

Karena terhegemoni oleh gaya hidup yang hedonis petani di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan tanpa disadari mereka banyak melakukan tindakan fatalistik. Tindakan fatalisme tidak bisa dilepaskan dari sikap kegamangan mereka melihat situasi yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya mereka terjebak pada gaya hidup pragmatis. Sikap pragmatisme petani yang memilih mudah dan cepat, tetapi tidak menghitung secara cermat ketika menjual sawahnya untuk memenuhi keinginannya

Sikap matrealistis memunculkan masyarakat memiliki paham serba materi, sikap konsumtif melahirkan masyarakat untuk ketergantungan terhadap kebutuhan-kebutuhan bukan primer, sikap pragmatis melahirkan masyarakat bermental instant.

